

**KAJIAN POLA
PENYUSUNAN PENANGANAN DAN
PENGENDALIAN URBANISASI**

KAJIAN POLA PENYUSUNAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN URBANISASI

**Nunung Nurwati
Nugraha Setiawan
Opan S. Suwartapradja**



**Pemerintah Provinsi
Jawa Barat**



**Puslit Kependudukan dan
Pengembangan SDM
Lemlit - Unpad**

2005

KAJIAN POLA PENYUSUNAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN URBANISASI

Penulis :

Nunung Nurwati
Nugraha Setiawan
Opan S. Suwartapradja

Kontributor : Dindin Makhmuddin, Imam Susilo
Penyunting Bahasa : Yahya Asari
Perancang Sampul : Udin Wahyudin
Penata Letak : Iceu Nurhayati, Anne D. Julianti
Pendistribusi : Heni Herawati

Sumber Foto : www.rnugraha.net, www.jaktim.beritajakarta.com

Diterbitkan oleh :

Divisi Informasi dan Publikasi
Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM
Lembaga Penelitian – Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Telp./Faks. (022) 2506651
E-Mail : ppk_press@yahoo.com

Cetakan Pertama, Mei 2005

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT),
Nurwati, Nunung

Kajian Pola Penyusunan Penanganan dan Pengendalian Urbanisasi /
Nunung Nurwati, Nugraha Setiawan, Opan S. Suwartapradja; penyunting
bahasa, Yahya Asari. – Bandung : Divisi Informasi dan Publikasi Pusat
Kependudukan dan Pengembangan SDM Lemlit – Unpad, 2005.

xi, 142 hlm. ; 15 X 21,5 cm.

Diterbitkan atas kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bibliografi : hlm 139
ISBN 979-99729-0-6

1. Bandung – Penduduk. 2. Urbanisasi.
I. Judul. II. Setiawan, Nugraha. III Suwartapradja, Opan. S. IV. Asari, Yahya.

304.6

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013*. Bandung.
- Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi. 2003. *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2003*. Bekasi.
- Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2002. *Analisis Volume Kecenderungan Dan Karakteristik Migran Masuk Ke Jawa Barat Tahun 2000*. Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2002. *Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk ke Jawa Barat*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. 2004. *Rencanan Tahunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2003. *Bandung Dalam Angka Tahun 2003*. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 1997. *Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia*, Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 Seri: S4.
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Dinamika Petumbuhan Penduduk Tujuh Kotra Besar di Indonesia: Bandung dan Sekitarnya*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Jawa Barat : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000* Seri L 2.2. Bandung.
- Bagian Humas dan Infokom Pemerintah Kota Bekasi. 2001. *Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2000, Program Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2001 – 2005*
- Black dan Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Dinas Kependudukan Kota Bekasi. 2004. *Buku Panduan Forkasi Operasi Yustisi Kependudukan Bagi Pengurus Rukun Warga Kota Bekasi*.

- Drakakis dan Smith, D 1988. *Urbanization in the Developing World*. Routledge. New York.
- Evers, Hans-Dieter dan Rudiger Korff.2000. *Urbanisme di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Horstman dan Rutz. 1980. *The Population on Java 1971*. Institute of Developing Economic. Tokyo.
- Hugo, Graeme J.1981."Village-Community Ties,Village Norms, and Ethnic and Social Networks : A Review of evidence from the Third World". Dalam Gordon F. De Jong dan Robert W. Gardner, ed., *Migration Decision Making : Multidisciplinary Approaches to Mocrelevel Studies in Develeped and Developing Countries*. United States of America : perganon Policy Studies on International Development. Hlm 186 – 224.
- Keban, Yeremias T. 1996. "Analisis Urbanisasi di Indonesia Periode 1980-1990", dalam Agus Dwiyanto dkk. (ed.), *Penduduk dan Pembangunan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Keputusan Mendagri No. 54 Tahun 1999 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*.
- Keputusan Walikota Bekasi No. 35 Tahun 2001 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Akta Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi*.
- Lampiran Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2003. *Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008*.
- Lee, Everett S. 1981. *Suatu Teori Migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Lembaran Daerah Kotamadya DT II Bandung, 1998, Perda Kotamadya DT II Bandung No. 26 Tahun 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. 1992, *Mobilias Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. PPK-UGM. Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 1996. "Dampak Pembangunan Terhadap Mobilias Penduduk", dalam Agus Dwiyanto dkk. (ed.), *Pemnduduk dan Pembangunan*. Aditya Media.Yogyakarta.

- Pemerintah Kota Bandung. 2001. *Lembaran Daerah Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung No. 1342 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.*
- Pemerintah Kota Bandung. 2001. *Lembaran Daerah Kota Bandung, Perda No. 5 Tahun 2001, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.*
- Pemerintah Kota Bandung. 2004. *Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2004, Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008.* Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013.* Bandung.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2000. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010*
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 2003. *Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2003 Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 – 2007.* Bandung.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 2003. *Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2003 mengenai Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Jawa Barat tahun 2003 – 2007.* Bandung
- Saefullah, A. Djadja. 1996. "Mobilitas Internal Nonpermanen", dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*, Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN dan Lembaga Demografi - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm 89-112. Jakarta
- Saefullah, A. Djadja. 1999, "Migrasi dan Perubahan Sosial Budaya", *Jurnal Kependudukan*, Vol. 1 No. 1 Januari 1999.
- Schoorl, J.W. Prof. Dr. 1988. *Modernisasi.* Gramedia. Jakarta.
- Setiawan, Nugraha. 1998. *Profil Kependudukan Jawa Barat 1997.* Kantor Menteri Negara Kependudukan. Jakarta
- Setiawan, Nugraha. 1999. Struktur Pekerja Migran dan Non Migran di Wilayah Pinggiran Kota Bandung: Sebuah Potensi Konflik?", *Jurnal Kependudukan*, 1(1): 49-53.

- Setiawan, Nugraha. 2004. "Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Barat: Proyeksi Tahun 2005", *Jurnal Kependudukan*, 6(2): 140-162.
- Shryock, Henry S. dan Jacob S. Siegel. 1976. *The Methods and materials of Demography*. Academic Press. New York.
- Smith, D.A. dan R.J. Nemeth. 1998. "Urban Development in South East Asia: an Historical Structural Analysis", dalam Drakakis dan Smith (ed.). *Urbanization in Developing World*. Routledge. New York.
- Soegijoko, B.T.S. dan I. Bulkin. 1994. "Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional: Studi Kasus Jabotabek". *Prisma* 23(2): 21-39.
- Sulastri, Sri. 1999. "*Mobilitas penduduk Menuju Kota Bandung: Analisis data Survei Urbanisasi 1995*". Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN. Jakarta.
- Sunaryo, Urip. 1995. *Changing Migration Differentials and Regional Economic Inequality in Indonesia 1971-1990*. The Flinders University of South Australia. Adelaide.
- Susanto, Astrid S. 1985. "Perubahan Sosial dan Kebudayaan" Bina Cipta . Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Mobilitas Penduduk Sebagai Penggerak Otonomi Daerah". *Jurnal Kependudukan*. Vol 1. No.1 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian	6
1.3. Ruang Lingkup Kajian	6
1.4. Manfaat Studi	7
1.5. Keluaran	7
1.6. Metodologi	7
1.6.1 Pengumpulan Data	7
1.6.2 Daerah Cuplikan	8
1.6.3 Analisis Data	8
1.6.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	8
Bab. II Kajian Mengenai Urbanisasi dan Kebijakan Kependudukan di Jawa Barat	11
2.1. Konsep Migrasi dan Urbanisasi	11
2.2. Gambaran Umum Kependudukan	17
2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	17
2.2.2 Rasio Jenis Kelamin	23
2.2.3 Persebaran Penduduk	26
2.2.4 Kepadatan Penduduk	28
2.3. Gambaran Umum Migrasi dan Urbanisasi	31
2.3.1 Migrasi Seumur Hidup	31
2.3.2 Migrasi Risen	39
2.3.3 Urbanisasi di Jawa Barat	48
2.3.3.1 Penduduk Pedesaan dan Perkotaan	48
2.3.3.2 Tingkat Urbanisasi	51
2.4. Kebijakan Kependudukan	54

Bab. III Analisis Urbanisasi	63
3.1. Kota Bandung	63
3.1.1. Gambaran Umum Daerah	63
3.1.2. Kelembagaan Pengelolaan Kependudukan	65
3.1.3. Kebijakan Kependudukan	68
3.1.4. Kebijakan Tata Ruang Daerah	71
3.1.5. Kondisi Kependudukan	72
3.1.5.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	72
3.1.5.2. Migrasi Masuk	74
3.1.5.3. Penyebab dan Dampak Urbanisasi	88
3.2. Kota Bekasi	90
3.2.1. Gambaran Umum Daerah	90
3.2.2. Kelembagaan Pengelolaan Kependudukan	92
3.2.3. Kebijakan Kependudukan	97
3.2.4. Kebijakan Tata Ruang Daerah	101
3.2.5. Kondisi Kependudukan	104
3.2.5.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	104
3.2.5.2. Migrasi Masuk	105
3.2.5.3. Penyebab dan Dampak Urbanisasi	121
 Bab. IV Kebijakan Penanganan Urbanisasi	 129
4.1 Alternatif Kebijakan Penanganan Urbanisasi	129
4.1.1. Kebijakan Langsung	130
4.1.2. Kebijakan Tidak Langsung	131
4.1.3. Target Pencapaian (<i>Outcome</i>)	133
4.2 Pola Penanganan Alternatif	134
 Bab. V Kesimpulan dan Rekomendasi	 137
5.1. Kesimpulan	137
5.2. Rekomendasi	138
 Daftar Pustaka	 139

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 1990, 2000, 2002,dan 2005 18
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode 1990-2000, 2000-2002, dan 2002-2003..... 20
Tabel 2.3	Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005 24
Tabel 2.4	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000, 2002, dan 2005..... 25
Tabel 2.5	Persebaran Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000, 2002, dan 2005 27
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000, 2002, dan 2005 29
Tabel 2.7	Persentase Migran Seumur Hidup Menurut Umur, Jawa Barat Tahun 2000 32
Tabel 2.8	Persentase Migran Seumur Hidup di atas 10 Tahun Menurut Kelompok Umur Tertentu Jawa Barat Tahun 2000..... 33
Tabel 2.9	Persentase Migran Masuk Seumur Hidup Menurut Status Perkawinan, Jawa Barat Tahun 2000..... 35
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Ijasah yang Dimiliki, Jawa Barat Tahun 2000..... 36
Tabel 2.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Lapangan Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000 37
Tabel 2.12	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000 38

Tabel 2.13	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Kelompok Umur, Jawa Barat Tahun 2000	39
Tabel 2.14	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Perkawinan, Jawa Barat Tahun 2000	40
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Ijasah Tertinggi yang Dimiliki, Jawa Barat Tahun 2000	41
Tabel 2.16	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Lapangan Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000.....	42
Tabel 2.17	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000.....	43
Tabel 2.18	Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/Pedesaan Jawa Barat tahun 2000	44
Tabel 2.19	Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Jawa Barat Tahun 2000.....	45
Tabel 2.20	Migran Lima Tahun yang Lalu Penganut Agama Non Islam Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/ Pedesaan Jawa Barat Tahun 2000	47
Tabel 2.21	Migran Lima Tahun yang Lalu WNA Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/Pedesaan Jawa Barat Tahun 2000	48
Tabel 2.22	Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Pedesaan/Perkotaan Tahun 2002 dan 2005	49
Tabel 2.23	Tingkat Urbanisasi di Jawa Barat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000, 2002, dan 2005	53
Tabel 3.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung	73
Tabel 3.2	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Bandung dalam Lima Tahun Terakhir.....	73

Tabel 3.3	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Kelompok Umur Kota Bandung Tahun 2000.....	75
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Pendidikan yang Ditamatkan Kota Bandung Tahun 2000	76
Tabel 3.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung Tahun 2000.....	77
Tabel 3.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2000.....	77
Tabel 3.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Lapangan Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000.....	78
Tabel 3.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000.....	79
Tabel 3.9	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000	80
Tabel 3.10	Persentase Penduduk Lima Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung.....	82
Tabel 3.11	Persentase Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bandung	83
Tabel 3.12	Persentase Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Bandung ...	86
Tabel 3.13	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000.....	87

Tabel 3.14	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000	87
Tabel 3.15	Jenis Pelayanan KIPEM dan KIK Tahun 2000 – 2005 di Dinas Kependudukan Kota Bandung.....	89
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bekasi Tahun 2003.....	92
Tabel 3.17	Sistem Pusat Permukiman Kawasan Tertentu Jabotabek, Tahun 2015	102
Tabel 3.18	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km ² Kota Bekasi Tahun 2003.....	105
Tabel 3.19	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Kelompok Umur, Kota Bekasi, Tahun 2000	106
Tabel 3.20	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Bekasi 2000.....	108
Tabel 3.21	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Seumur Hidup dan Status Perkawinan, Kota Bekasi 2000	109
Tabel 3.22	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Lapangan Pekerjaan, Kota Bekasi Tahun 2000.....	110
Tabel 3.23	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Pekerjaan Kota Bekasi Tahun 2000.....	111
Tabel 3.24	Persentase Migran Masuk Lima Tahun yang Lalu, ke Kota Bekasi Tahun 2000	114
Tabel 3.25	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Kelompok Umur Kota Bekasi Tahun 2000	115
Tabel 3.26	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Bekasi Tahun 2000.....	116

Tabel 3.27	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Status Perkawinan Kota Bekasi Tahun 2000.....	117
Tabel 3.28	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Lapangan Pekerjaan, Kota Bekasi Tahun 2000	118
Tabel 3.29	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Status Pekerjaan Kota Bekasi Tahun 2000	118
Tabel 3.30	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kota Bekasi Tahun 2000.....	120
Tabel 3.31	Banyaknya dan Distribusi Persentase Migran Masuk ke Masing-masing Kabupaten/Kota di Botabek Menurut Tempat Tinggal Lima Tahun yang Lalu, Hasil SUPAS 1995.	123
Tabel 3.32	Distribusi Produk Domestik Bruto Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Persentase Migrasi Seumur Hidup yang Masuk Ke Lima Kabupaten Menurut Kelompok Umur tertentu Tahun 2000.....	34
Gambar 3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Migran Lima Tahun yang Lalu di Kota Bandung	84
Gambar 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung	85
Gambar 3.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bekasi Tahun 2000.....	112
Gambar 3.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi Tahun 2000	113
Gambar 3.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bekasi Tahun 2000	119
Gambar 3.6	Banyak IMB yang Dikeluarkan Kota Bekasi Tahun 2001 – 2003	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan, yang sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *over-urbanization*, dalam istilah lain sering disebut juga sebagai urbanisasi semu atau *pseudo-urbanization*, jika ini terjadi bisa menjadi penyebab yang menghambat pembangunan. Berkenaan dengan hal itu, Smith dan Nemeth (1988) menyatakan bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan, maupun pengaruh makro terhadap negara.

Namun demikian, jika proses urbanisasi bisa dikendalikan akan memberikan dampak positif. Laporan Bank Dunia (1994) yang dikutip oleh Keban (1996) menyebutkan, ada hubungan positif antara tingkat urbanisasi di suatu negara dengan tingkat pendapatan per kapita. Korelasi positif tersebut telah didukung dengan data empiris, sehingga memberikan keyakinan bahwa urbanisasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan, artinya peningkatan urbanisasi dapat mempercepat pembangunan.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di suatu daerah merupakan potensi pembangunan, dalam artian daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup, akan tetapi walaupun jumlahnya banyak kalau tanpa kualitas bukan merupakan potensi pembangunan, namun menjadi ancaman bagi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, jika di suatu wilayah memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanganan pengendalian dan peningkatan kualitas agar tidak menjadi beban bagi proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, diketahui jumlah penduduk Jawa Barat sejumlah 35,72 juta jiwa, dengan komposisi 18,08 juta jiwa laki-laki dan 17,64 juta jiwa perempuan. Jumlah tersebut membuat Provinsi Jawa Barat menduduki urutan ter atas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam hal jumlah penduduk. Kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama kurun waktu 1990-2000 rata-rata tumbuh sebesar 1,96 persen per tahun. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1980-1990 yang rata-rata tumbuh sebesar 2,30 persen. Namun demikian, Jawa Barat masih tetap menjadi provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Lima tahun kemudian setelah pelaksanaan Sensus Penduduk terakhir, kondisi kependudukan Jawa Barat telah diilustrasikan oleh Setiawan (2004). Dalam tulisannya yang mendasarkan pada hasil proyeksi dengan memakai data dasar hasil SP 2000 nampak penduduk Jawa Barat akan mencapai jumlah sekitar 38,67 juta orang, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 19,57 juta orang dan penduduk perempuan sebanyak 19,10 juta orang. Pada kurun waktu tersebut diperkirakan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2000-2002 sebesar 1,65 persen per tahun, dan antara tahun 2002-2005 sebesar 1,56 persen per tahun. Melihat angka laju pertumbuhan tersebut terlihat adanya penurunan, tetapi yang paling perlu diperhatikan adalah jumlah absolut penduduk Jawa Barat yang diperkirakan pada tahun 2005 tetap akan menempati provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Pada tahun 2000 ada enam kabupaten/kota dengan urutan penduduk terbesar (jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa) yaitu Kabupaten Bandung (4,16 juta jiwa), Kabupaten Bogor (3,51 juta jiwa), Kota Bandung (2,14 juta jiwa), Kabupaten Sukabumi (2,07 juta jiwa), Kabupaten Tasikmalaya (2,06 juta jiwa) dan Kabupaten Garut (2,05 juta jiwa). Pada tahun 2005 kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari dua juta orang menjadi 8 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung (4,58 juta orang), Kabupaten Bogor (3,73 juta orang), Kabupaten Sukabumi (2,20 juta orang), Kabupaten Garut (2,17 juta orang), Kabupaten Tasikmalaya (2,15 juta orang), Kota Bandung (2,14 juta orang), Kota Bekasi (2,05 juta orang), dan Kabupaten Cirebon (2,04 juta orang). Disamping karena wilayahnya luas, daerah-daerah tersebut adalah daerah urban.

Migrasi masuk merupakan salah satu penyebab besarnya jumlah penduduk di Jawa Barat. Banyak alasan mengapa seseorang melakukan migrasi, salah satunya adalah faktor ekonomi, baik karena pindah pekerjaan ataupun untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru dalam upaya untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Selain itu, bagi migran atau *mouvers* dalam menentukan daerah tujuannya erat terkait dengan faktor sosial dan budaya penduduk yang bersangkutan. Dari aspek budaya terkait dengan keberadaan kerabat dan atau teman tetangga yang telah lebih dahulu berada di kota, sehingga keberadaannya di kota dapat dikatakan sebagai pioneer (*tuturus=sunda*). Keberadaan pioneer atau *tuturus* ini mempunyai arti penting, oleh karena dapat dijadikan sebagai “jembatan” bagi calon migran ikutan atau berikutnya (Saefullah, 1999). Dan dari aspek sosial misalnya terkait dengan jarak, yaitu memilih daerah yang dekat. Yang terakhir ini dapat dipahami oleh karena kedekatan daerah memudahkan untuk dapat bertemu dengan keluarga dan atau kerabat di daerah asalnya.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 memberi informasi bahwa migrasi masuk ke Jawa Barat sebagian besar bertujuan ke daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek). Lima kabupaten/kota yang ada di wilayah Bodebek yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, tampaknya telah menjadi daerah tujuan utama para migran yang masuk ke Jawa Barat. Hal ini dapat dipahami, mengingat banyak investasi ditanam di daerah ini akibat adanya imbas dari pesatnya pembangunan ekonomi di Jakarta yang membawa implikasi pada daerah sekitarnya. Di wilayah ini tumbuh dan berkembang dengan pesat pembangunan sarana dan prasarana perumahan, pendidikan dan transportasi, serta menjadi tempat tinggal mereka yang bekerja di Jakarta.

Migrasi masuk dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu migrasi masuk seumur hidup dan migrasi masuk lima tahun yang lalu atau migrasi risen. Hal ini dimaksudkan untuk mempunyai gambaran mengenai karakteristik kedua pola migrasi tersebut. Dari beberapa hasil studi seperti Mantra, (1992) Hugo (1981), Lee (1987), Saefullah (1996) faktor dominan melakukan mobilitas yaitu mobilitas permanen (migrasi). Faktor utama dalam migrasi ini adalah faktor sosial ekonomi, selain faktor sosial, agama dan

politik. Faktor sosial ekonomi yang menjadi alasan utama lebih banyak disebabkan oleh adanya ketimpangan atau perbedaan nilai kefaedahan suatu daerah. Sekalipun dalam kenyataannya pertimbangan untuk melakukan migrasi terkait erat dengan faktor ekonomi, namun dalam pelaksanaannya banyak pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan migrasi dan atau untuk menentukan daerah tujuan. Pengambilan keputusan dalam meninggalkan daerah asal dan atau memilih daerah tujuan tidak terlepas dari teori daya dorong (*push factors*) dari daerah asal dan daya tarik (*pull factors*) dari daerah tujuan (Lee, 1987).

Migrasi masuk ke Jawa Barat tentunya berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2002 tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.067 orang per km², kemudian meningkat menjadi 1.098 orang per km² pada tahun 2003 (BPS,2004) dan pada tahun 2005 diperkirakan menjadi 1.118 orang per km². Jika dilihat sebaran penduduk di Jawa Barat tampak belum merata. Hasil data Susenas tahun 2003 diketahui bahwa daerah yang bertipologi perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kota Bandung (13.258 orang per km²), Kota Bekasi (9.154 orang per km²), Kota Cirebon (7.298 orang per km²), Kota Bogor (7.030 orang per km²), dan Kota Sukabumi (5.528 orang per km²), dengan demikian masih ada 11 kabupaten yang tingkat kepadatan penduduknya di bawah 1.000 orang per km².

Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada tahun 1980 penduduk Jawa Barat yang tinggal di perkotaan sebesar 21,00 persen, pada tahun 1990 sebesar 35,03 persen, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 48,86 persen kemudian 54,40 persen pada tahun 2005. Jika dilihat dari tingkat urbanisasi seperti yang digunakan BPS, bahwa tingkat urbanisasi merupakan proporsi besarnya penduduk perkotaan terhadap total jumlah penduduk, dari hasil proyeksi penduduk tahun 2005 diketahui tingkat urbanisasi tertinggi untuk daerah kabupaten adalah; Kabupaten Bekasi (76,14 persen) dan Kabupaten Bogor (65,69 persen), sedangkan untuk tingkat kota, adalah Kota Bandung dan Kota Cirebon masing-masing sebesar 100 persen, Kota Bekasi (98,05 persen), Kota Bogor (99,23 persen), dan Kota Sukabumi (99,56 persen).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan kependudukan khususnya yang berkaitan dengan mobilitas penduduk dan urbanisasi yang cenderung terus meningkat. Salah satunya adalah dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999. Substansi Inpres dalam hal administrasi kependudukan menyangkut penataan sistem penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu menyangkut juga peningkatan kesadaran dan pengembangan peran serta masyarakat, serta pengembangan kelembagaan kependudukan sebagai penyelenggara administrasi kependudukan di pusat dan daerah. Walaupun dari segi administrasi kependudukan (registrasi) telah diupayakan, namun sampai saat ini hasilnya belum menggembirakan.

Berkaitan dengan era otonomi daerah, maka dimungkinkan di masing-masing daerah membuat kebijakan tentang pengarahannya mobilitas sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka peran daerah provinsi sebagai pelaksana fungsi dekonsentrasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam menjalankan fungsi pengarahannya kependudukan nasional. Salah satunya adalah dalam menjalankan fungsi pengarahannya pertumbuhan penduduk di perkotaan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung lingkungannya, sehingga pada gilirannya pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat menjadi sinergis dengan mengarah pada suatu sasaran pembangunan yang sama. Artinya proses pembangunan kependudukan antar wilayah/daerah di Provinsi Jawa Barat harus saling berkaitan dan berinteraksi secara positif untuk saling menguntungkan satu sama lainnya

Dalam upaya mencermati tingkat urbanisasi di Jawa Barat, berbagai permasalahan yang ditimbulkannya serta kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan diperlukan data dan informasi mengenai hal tersebut. Didasarkan pada hal di atas, Biro Dekonsentrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melakukan kajian tentang pola penyusunan penanganan dan pengendalian urbanisasi di wilayah perkotaan. Kajian ini dilakukan di dua kota besar yang memiliki tingkat urbanisasinya tinggi, dengan karakteristik yang berbeda.

1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian

Perkembangan sosial ekonomi yang berbeda antar daerah mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas dengan maksud memperoleh penghidupan yang lebih layak. Hingga saat ini perindustrian dan kegiatan jasa di Provinsi Jawa Barat masih terkonsentrasi di daerah kota. Ini merupakan salah satu daya tarik bagi penduduk untuk mendatanginya yang akhirnya banyak dari para pendatang menetap di daerah kota, sehingga pertumbuhan penduduk di perkotaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Terkonsentrasinya penduduk di daerah kota akan berdampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya, kaum pendatang memegang peranan cukup penting dalam pembangunan kota, sedangkan dampak negatif diantaranya; tingkat kepadatan penduduk kota menjadi tinggi, timbul pemukiman kumuh, dan muncul konflik antara kaum pendatang dengan penduduk asli. Apabila arus urbanisasi tidak dikendalikan dapat menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks.

Terkait dengan permasalahan tersebut, secara umum tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pola penanganan urbanisasi di beberapa kota di Jawa Barat, dan secara khusus bertujuan untuk mengkaji:

1. Bagaimana karakteristik urbanisasi di perkotaan di Jawa Barat
2. Kebijakan apa saja yang pernah dan sedang dilaksanakan yang berkaitan dengan penanganan dan pengendalian urbanisasi

1.3. Ruang Lingkup Kajian

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan kajian di atas, maka ruang lingkup kajian ini meliputi:

1. Melakukan kajian mengenai karakteristik urbanisasi di perkotaan di Jawa Barat.
2. Melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan tentang urbanisasi yang pernah dan sedang dilaksanakan.

1.4. Manfaat Studi

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menggambarkan urbanisasi yang terdapat di perkotaan Jawa Barat dengan karakteristik yang berbeda sebagai bahan rujukan bagi para pembuat kebijakan kependudukan khususnya yang berkaitan dengan urbanisasi.

1.5. Keluaran

Output atau hasil akhir yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rumusan bahan kebijakan mengenai pola penyusunan penanganan dan pengendalian urbanisasi di Jawa Barat yang sesuai dengan karakteristik urbanisasi.

1.6. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitik. Sifat kajian menggambarkan fenomena yang terjadi melalui pemaparan hasil kajian serta analisis atas fenomena tersebut. Analisis dilakukan tahap demi tahap sehingga keterkaitan dari suatu temuan dengan temuan lainnya mampu memberikan informasi yang sangat lengkap dan menyeluruh dari permasalahan yang sedang diteliti.

Selaras dengan metode di atas, maka kajian ini akan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang digabungkan dengan pendekatan kualitatif. Penggabungan pendekatan ini terutama dilakukan dalam proses pengambilan data. Melalui model pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani sejumlah keterbatasan yang dimungkinkan ada pada saat hanya menggunakan satu pendekatan saja.

1.6.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa aparat pemerintahan/instansi yang terkait dengan kajian ini. Selain itu,

untuk memberikan wawasan mengenai urbanisasi dilakukan pengkajian dan penelusuran berbagai kebijakan dan dokumen yang pernah dilakukan dan yang sedang dilaksanakan, serta mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan urbanisasi untuk dianalisis.

1.6.2 Daerah Cuplikan

Penentuan daerah cuplikan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan karakteristik daerah yang bersifat pengumpulan pendapat publik, dan untuk penelitian yang bersifat demikian umumnya dilakukan dengan menggunakan metode di atas (Black dan Champion, 1999).

Kota-kota yang dijadikan daerah cuplikan ditentukan berdasarkan kriteria memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristik urbanisasinya. Berlandaskan pada pertimbangan di atas dipilih dua kota yang dijadikan daerah cuplikan yaitu Kota Bandung yang mewakili karakteristik urbanit dengan banyak urbanit komuter, dan Kota Bekasi yang mewakili karakteristik urbanit dengan banyak urbanit menetap.

1.6.3 Analisis Data

Untuk kepentingan analisis, data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan diinterpretasikan melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

1.6.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi penyusunan desain penelitian, studi kepustakaan, dan penyusunan instrumen penelitian.

2. Tahap pelaksanaan kajian, adalah studi yang berhubungan dengan proses pengumpulan data. Tahapan ini yang terbagi dua sub-tahapan studi yaitu: studi dokumentasi dan studi lapangan.
 - a. Studi dokumentasi merupakan studi yang didasarkan kepada dokumen dari masing-masing wilayah perkotaan yang dijadikan wilayah studi.
 - b. Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari persoalan kependudukan dari seluruh wilayah perkotaan yang ada di daerah cuplikan dengan didasarkan kepada hasil jawaban responden dari lapangan.
3. Tahap analisis data dan penyusunan rekomendasi serta penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN MENGENAI URBANISASI DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI JAWA BARAT

2.1. Konsep Migrasi dan Urbanisasi

Migrasi adalah proses berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas wilayah administrasi tertentu yang dilalui dalam perpindahan tersebut. Perpindahan yang melewati batas desa/kelurahan saja disebut sebagai migrasi antar desa/kelurahan. Perpindahan yang melewati batas kecamatan disebut migrasi antar kecamatan, yang melewati batas kabupaten/kota disebut migrasi antar kabupaten/kota dan yang melewati batas provinsi disebut migrasi antar provinsi. Penduduk yang melakukan perpindahan disebut migran.

Provinsi dan kabupaten/kota tempat lahir adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal ibunya (secara de facto) pada saat melahirkan. Misalnya seorang ibu bertempat tinggal di Kota Bandung dan melahirkan di Kota Bekasi. Apabila anak tersebut dibawa kembali ke Kota Bandung dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak lahir, maka anak tersebut dicatat sebagai lahir di Kota Bandung. Tetapi apabila anaknya tetap tinggal di Kota Bekasi selama 6 bulan atau lebih, maka anak tersebut dicatat lahir di Kota Bekasi.

Tempat tinggal terakhir adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum responden tinggal di provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang. Tempat tinggal lima tahun yang lalu adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal responden 5 tahun yang lalu dari pelaksanaan Sensus Penduduk. Kriteria tempat lahir, tempat tinggal lima tahun yang lalu, dan tempat tinggal terakhir dijadikan sebagai ukuran untuk membedakan jenis-jenis migrasi

Berdasarkan jenisnya, migrasi dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Migrasi seumur hidup, (*life time migrant*) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya.

Penghitungan jumlah migran masuk dan migran ke luar seumur hidup menggunakan matrik tabel silang antara tempat tinggal sekarang dengan tempat lahir. Jumlah migran masuk seumur hidup ke suatu provinsi adalah banyaknya penduduk yang tempat lahirnya di luar provinsi tersebut. Sedangkan jumlah migran ke luar seumur hidup dari suatu provinsi adalah banyaknya penduduk provinsi lain yang tempat lahirnya di provinsi tersebut.

2. Migran risen (*risen migrant*) adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir sebelum pencacahan.

Jumlah migran masuk risen ke suatu provinsi adalah banyaknya penduduk yang tempat tinggalnya 5 tahun lalu di luar provinsi tersebut. Sedangkan jumlah migran ke luar risen dari suatu provinsi adalah banyaknya penduduk provinsi lain yang 5 tahun yang lalu tinggal di provinsi tersebut.

3. Migran total (*total migrant*) adalah mereka yang pernah pindah antar provinsi tanpa memperhatikan kapan pindahnya, sehingga provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang.

Tingkat migrasi (*migration*) di suatu daerah dapat diketahui dari migrasi neto, yaitu selisih antara migrasi ke luar (*out migration*) dengan migrasi masuk (*in migration*). Jika migrasi ke luar lebih banyak dari migrasi masuk, maka migrasi neto negatif. Artinya jumlah penduduk di suatu daerah itu berkurang. Sebaliknya bila migrasi ke luar lebih sedikit, maka migrasi neto positif. Artinya jumlah penduduk di suatu daerah itu bertambah.

Tingkat migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1000 penduduk daerah tersebut. Angka migrasi ke luar adalah banyaknya migran ke luar dari suatu provinsi per 1000 penduduk provinsi tersebut. Tingkat migrasi netto adalah banyaknya migran netto (masuk dikurangi ke luar) per 1000 penduduk daerah tersebut.

Di negara-negara berkembang gerak perpindahan penduduk yang paling menonjol adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini bukan hanya karena perbedaan pertumbuhan antara desa dan kota, juga karena menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dimana terjadi kesenjangan pertumbuhan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Sehingga migrasi atau mobilitas penduduk dianggap sebagai mekanisme yang membawa masyarakat dari kehidupan yang tradisional ke kehidupan yang modern (Zelinsky, 1971 yang dikutip Saefullah, 1999).

Urbanisasi menurut Philip M Hauser adalah penambahan proporsi penduduk yang tinggal di daerah kota. Konsentrasi penduduk di daerah kota sebagai akibat banyaknya penduduk yang datang dari luar kota. Menurut Tjiptoherijanto (1999), penambahan penduduk yang tinggal di perkotaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; (1) kelahiran alamiah yang terjadi di daerah tersebut, (2) perpindahan penduduk, baik dari perkotaan lainnya maupun dari pedesaan, (3) anexasi, dan (4) reklasifikasi. Dengan demikian, perpindahan penduduk dari desa menuju kota hanyalah sebagian dari faktor yang mempengaruhi tingkat urbanisasi.

Berbagai studi tentang urbanisasi menemukan bahwa ada hubungan antara kemajuan tingkat ekonomi dengan tingkat urbanisasi, semakin maju tingkat perekonomian suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya. Dengan demikian urbanisasi merupakan gejala alamiah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, adanya konsentrasi penduduk yang tinggi atau berlebihan di suatu wilayah dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *aglomerasi* atau *primacy* (Tjiptoherijanto; 1999).

Di negara berkembang termasuk Indonesia urbanisasi lebih berfungsi sebagai faktor penghambat daripada faktor pendorong bagi pembangunan nasional. Urbanisasi dapat menimbulkan

masalah di perkotaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan *public utilitas* dan kesempatan kerja. Gejala yang selama ini terjadi sudah sangat jelas dengan berbagai indikator, misalnya munculnya perumahan kumuh (*slums*) dan pemukiman liar, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di perkotaan (Sukamdi; 2001). Selain itu, menurut Green (1992) dalam Wiyono, (1998) pertumbuhan penduduk yang cepat di perkotaan berdampak langsung terhadap lingkungan melalui berbagai cara, seperti; (1) Karena luas perkotaan terus berkembang, pemerintah mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, (2) Penduduk perkotaan lebih banyak menggunakan air dan energi, serta lebih banyak membuang limbah atau sampah dibandingkan dengan penduduk pedesaan, dan (3) Penduduk perkotaan yang padat akan menyebabkan polusi udara dan air. Selain itu, terkonsentrasinya penduduk dan lokasi industri menyebabkan meningkatnya polusi di perkotaan.

Selanjutnya Keban (1996) mengemukakan, jika dilihat dari pendekatan demografis urbanisasi dapat diartikan sebagai proses peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan sehingga penduduk yang tinggal di perkotaan secara keseluruhan meningkat. Biasanya konsep konsentrasi tersebut dapat diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan perubahan proporsi tersebut, atau kadang-kadang perubahan jumlah pusat kota. Kesulitan yang sering timbul dari konsep tersebut adalah menyepakati definisi kota atau perkotaan.

Dari pendekatan ekonomi-politik urbanisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pengembangan ekspansi kapitalisme (Drakakis dan Smith, 1988). Dengan demikian seringkali disebut sebagai *capitalist urbanization*. Batasan ini terasa memberi tekanan terhadap konsep *political economy* yang biasanya menuduh kapitalisme sebagai asal muasal timbulnya suatu permasalahan.

Urbanisasi jika dilihat dari konsep modernisasi merupakan perubahan orientasi tradisional ke orientasi modern tempat terjadinya difusi modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi politik dari dunia barat (kota) ke masyarakat yang masih tradisional (desa). Pada mulanya banyak yang menilai urbanisasi sebagai suatu kesuksesan pembangunan nasional, karena dalam proses tersebut terjadi replikasi pola barat

dan perluasan nilai-nilai barat dalam bidang teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tataran seperti ini urbanisasi identik dengan modernisasi (Smith dan Nemeth, 1988), dan proses tersebut meningkatkan intensitas kontak sosial per unit waktu sehingga dapat menyebabkan perubahan sosial.

Dari sisi legal formal, urbanisasi dapat dilihat dari perkembangan kota yang telah ada. Secara hukum kota memiliki batas-batas administratif tertentu, dan hanya dapat berubah melalui prosedur legal formal. Konsep ini berlainan dengan konteks fungsional yang batas-batas kotanya lebih ditentukan oleh fungsi atau karakteristik suatu lokasi. Misalnya ada desa yang memiliki batas-batas wilayah administratif tertentu, tetapi sebagian besar wilayahnya terklasifikasi sebagai perkotaan.

Selanjutnya Evers dan Korff (2002) mengemukakan, riset mengenai proses urbanisasi di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh teori-teori urbanisasi Eropa dan Amerika yang berpendapat kota kecil (*town*) atau kota besar (*city*) adalah pusat kemajuan dan pembangunan serta pusat perubahan sosial. Kritik terhadap teori urbanisasi di atas dikemukakan oleh Castells yang mengatakan kota tidak otomatis sebagai pusat modernisasi dan belum tentu pula menghimpun semua struktur modernitas.

Ada 5 macam teori klasik dan neo-klasik tentang urbanisasi:

1. Teori-teori demografis tentang urbanisasi dan migrasi. Teori-teori ini didominasi oleh model faktor pendorong-penarik (*push-pull factor*), yang memandang kota sebagai faktor penarik (*pull factor*) sedangkan desa sebagai faktor pendorong (*push factor*). Teori-teori ini cenderung berifat deskriptif-analitis, yang terbatas pada *framework* demografis.
2. Teori-teori mengenai sistem kota. Teori ini mencakup antara lain kajian-kajian tentang hirarki kota dan tempat-tempat sentral.
3. Teori-teori kultural kota. Teori ini lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek seperti “petani di perkotaan” atau budaya miskin, atau aspek-aspek yang berhubungan dengan kesadaran sosial dan perubahan citra ruang di kota.
4. Teori-teori tentang diferensiasi ruang dan sosial serta segregasi (pemencilan) di perkotaan, yakni ekologi sosial dalam pengertian luas. Analisis wilayah sosial diperkenalkan oleh Shevky dan Bell,

dan ekologi faktorial yang dikembangkan Brian Berry. Model analisis tersebut telah banyak diterapkan dengan menggunakan teknologi komputer terbaru. Dengan metoda ekologi faktorial dapat dilakukan analisis data yang meragukan secara efektif dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Masalah utama dengan pendekatan ini ialah sulit untuk menafsirkan hasil-hasilnya atau memasukkannya ke dalam konteks teoritis. Sampai sejauh ini pendekatan ini belum terbukti dapat menjelaskan fenomena khas *underdevelopment* (keterbelakangan) kota atau membedakannya dari struktur ruang kota-kota yang sudah maju dengan menggunakan metode ekologi faktorial.

5. Teori-teori neo-dualis: dengan menggunakan karya-karya penulis ekonomi politik perkotaan mazhab Perancis (Castell, Lojkine, rangkumannya dalam versi bahasa Inggris ditulis oleh Pickvance, 1976) dan tulisan para teoritis dualis lain, Milton Santos berupaya mengembangkan teori kota Dunia Ketiga, yakni teori urbanisasi *dependen*. Penulis lain, Terry McGee, menaruh perhatian terutama pada ekonomi bazar atau apa yang lebih dikenal sebagai "sektor informal" dan ia telah berhasil menunjukkan hasil penelitiannya yang berskala besar tentang pengasong yang merupakan unsur utama dari sektor informal (McGee dan Yeung, 1978).

Secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara lambat proses urbanisasinya, dan tingkatnya pun lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya. Di kebanyakan negara Asia Tenggara, angkatan kerja sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian yang tinggal di desa-desa dan menganggap tinggal di kota sebagai hal yang istimewa. Tetapi di pihak lain, beberapa negara seperti Indonesia (Jakarta), Filipina (Manila) dan Thailand (Bangkok) memiliki kota besar dengan penduduk jutaan orang.

Urbanisasi yang cepat dan terpusat hanya di satu kota utama mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah seperti kemacetan, polusi dan daerah kumuh. Dominasi berlebihan kota utama menghambat pertumbuhan kota-kota yang lebih kecil, bahkan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, kota utama berekspansi lebih cepat dibandingkan kota kecil.

Rendahnya tingkat urbanisasi keseluruhan, ditambah dengan terkonsentrasinya penduduk di satu kota utama yang memiliki karakter

heterogen, metropolitan dan internasional bukan karakter nasional, serta adanya fakta bahwa kota-kota utama (*primate cities*) ini masih muda (usia di bawah 200 tahun) memperkuat kesan bahwa urbanisme memang asing bagi budaya dan masyarakat Asia Tenggara.

Di masa kini, perkembangan urbanisasi di Asia Tenggara rancu dan cenderung ruwet untuk dianalisa. Salah satunya adalah karena di Asia Tenggara sulit untuk menunjuk suatu gerakan yang benar-benar gerakan sosial kota, gerakan yang berbasis pada permasalahan kota, sebab antara gerakan yang bertujuan untuk mencapai perubahan politik secara umum dan gerakan kota sulit sekali dibedakan.

2.2. Gambaran Umum Kependudukan

2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada bulan Oktober 2000 Provinsi Jawa Barat secara resmi telah berpisah dengan Provinsi Banten. Akan tetapi data yang disajikan pada Tabel 2.1, baik itu data yang berasal dari SP 1990 maupun data SP 2000 yang dilaksanakan sebelum dilakukan pemekaran Provinsi Jawa Barat, adalah data untuk Jawa Barat setelah dilakukan pemekaran. Hal ini perlu dikemukakan, karena data kependudukan yang dipublikasi BPS sebelum tahun 2000 masih memakai wilayah Jawa Barat yang lama, sehingga jika pembaca membandingkan dengan data yang ada pada tulisan ini akan sangat berbeda.

Pada Tabel 2.1 terlihat, penduduk Provinsi Jawa Barat di tahun 2005 diperkirakan akan mencapai jumlah 38,67 juta orang. Diantara kabupaten, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Bandung, sedangkan Kabupaten Bogor menempati posisi kedua. Pada tahun 2005 posisi Kabupaten Bandung dan Bogor terlihat semakin mantap, dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 4,58 juta dan 3,73 juta orang.

Hal di atas bisa dipahami, sebab kedua kabupaten tersebut merupakan daerah industri, serta berbatasan langsung dengan kota besar. Industri telah terbukti banyak menarik migran masuk (Setiawan, 1999), sedangkan posisinya yang berbatasan dengan kota besar menyebabkan banyak menerima migran masuk sebagai

luberan dari kota terutama pada daerah-daerah yang berbatasan langsung (Mantra, 1996). Mahalnya harga tanah dan perumahan di perkotaan, menyebabkan sebagian penduduk yang bekerja di kota lebih memilih atau karena terpaksa harus tinggal di kabupaten sekitarnya, yang dicirikan dengan banyak munculnya kompleks perumahan di wilayah kabupaten yang berbatasan dengan kota.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 1990, 2000, 2002, dan 2005¹⁾

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk			
		1990	2000	2002	2005 ¹⁾
1	Bogor	3.736.897	3.508.826	3.599.462	3.730.593
2	Sukabumi	1.848.282	2.075.141	2.126.404	2.200.608
3	Cianjur	1.662.089	1.946.405	1.993.727	2.055.502
4	Bandung	3.201.357	4.158.083	4.335.578	4.584.423
5	Garut	1.748.634	2.051.092	2.101.534	2.167.487
6	Tasikmalaya	1.814.980	2.064.075	2.103.591	2.153.226
7	Ciamis	1.478.476	1.618.752	1.638.988	1.662.185
8	Kuningan	892.294	984.792	998.484	1.014.602
9	Cirebon	1.649.483	1.931.066	1.977.828	2.038.801
10	Majalengka	1.032.032	1.121.641	1.134.202	1.148.162
11	Sumedang	831.835	968.848	991.467	1.020.813
12	Indramayu	1.447.877	1.590.030	1.610.745	1.634.745
13	Subang	1.206.715	1.329.838	1.352.354	1.381.901
14	Purwakarta	563.102	700.104	724.560	758.061
15	Karawang	1.491.992	1.787.319	1.837.930	1.905.421
16	Bekasi	2.104.459	1.668.494	1.786.709	1.975.114
17	Kota Bogor	271.711	750.819	891.880	1.151.955
18	Kota Sukabumi	119.981	252.420	261.861	276.009
19	Kota Bandung	2.058.649	2.136.260	2.142.914	2.145.315
20	Kota Cirebon	254.878	272.263	274.542	276.845
21	Kota Bekasi	-	1.663.802	1.809.306	2.046.842
22	Kota Depok	-	1.143.403	1.220.817	1.343.690
JAWA BARAT		29.415.723	35.723.473	36.914.883	38.672.300

Sumber: Hasil SP 1990, SP 2000 dan Susenas 2002.

Keterangan: *) Hasil proyeksi Setiawan (2004) dengan metode geometrik.

Sementara pada kelompok kota, jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2005 masih dipegang oleh Kota Bandung dengan jumlah 2,14 juta jiwa. Namun demikian dalam waktu yang tidak begitu lama, bukan tidak mungkin Kota Bekasi yang baru didirikan tahun 1996 akan menjadi kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, mengingat penduduknya meningkat dengan sangat cepat.

Jumlah penduduk yang paling sedikit tahun 2005 pada kelompok kabupaten dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta dengan jumlah 758 ribu orang, sedangkan pada kelompok kota jumlah terkecil dipegang oleh Kota Sukabumi yaitu 276 ribu orang. Dilihat dari luas wilayahnya, ternyata Purwakarta merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil, namun pada kelompok kota, luas wilayah Kota Sukabumi masih lebih besar jika dibandingkan dengan Kota Cirebon. Mungkin karena aktivitas ekonomi Kota Sukabumi tidak seintensif Kota Cirebon, maka perkembangan jumlah penduduknya pun kalah pesat dari Cirebon.

Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat antara tahun 2002-2005 diperkirakan sebesar 1,56 persen per tahun. Angka tersebut merupakan cerminan dari perkembangan jumlah penduduk hasil Susenas 2002 dan hasil proyeksi 2005. Seperti halnya untuk tingkat provinsi, laju pertumbuhan pada kelompok kabupaten dan kota, dihitung dengan memakai metoda yang sama yaitu geometrik, berdasarkan pada data penduduk hasil Susenas 2002 dan hasil proyeksi 2005 yang sudah dihitung terlebih dahulu.

Sebelum membahas lebih lanjut, laju pertumbuhan tahun 2000-2005, ada baiknya kita perhatikan pula laju pertumbuhan antara tahun 1990-2000 yang dikalkulasi berdasarkan hasil sensus, dan periode 2000-2002 dengan data dasar hasil SP 2000 dan Susenas 2002. Pada Tabel 2.2 nampak jelas, pada tingkat provinsi laju pertumbuhan penduduk terus menurun dari tahun ke tahun, tetapi tidak demikian halnya pada tingkat kabupaten dan kota.

Pada periode 1990-2000, terjadi reklasifikasi wilayah beberapa kabupaten/kota. Diantaranya adalah pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten dan Kota Bekasi berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tanggal 10 Desember 1996. Terjadi pula perluasan wilayah Kota Bogor, dengan masuknya 46 buah desa yang berasal dari Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 6 Februari 1995. Hal yang

sama rupanya terjadi juga di Kabupaten dan Kota Sukabumi, pada periode 1990-2000, karena nampak dari laju pertumbuhan yang cukup tinggi untuk Kota Sukabumi.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Menurut
Kabupaten/Kota
Periode 1990-2000, 2000-2002, dan 2002-2003

No.	Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)		
		1990-2000	2000-2002	2002-2005
1	Bogor	-0,63	1,28	1,20
2	Sukabumi	1,16	1,23	1,15
3	Cianjur	1,59	1,21	1,02
4	Bandung	2,65	2,11	1,88
5	Garut	1,61	1,22	1,04
6	Tasikmalaya	1,29	0,95	0,78
7	Ciamis	0,91	0,62	0,47
8	Kuningan	0,99	0,69	0,54
9	Cirebon	1,59	1,20	1,02
10	Majalengka	0,84	0,56	0,41
11	Sumedang	1,54	1,16	0,98
12	Indramayu	0,94	0,65	0,49
13	Subang	0,98	0,84	0,72
14	Purwakarta	2,20	1,73	1,52
15	Karawang	1,82	1,41	1,21
16	Bekasi	-2,29	3,48	3,40
17	Kota Bogor	10,70	8,99	8,90
18	Kota Sukabumi	7,72	1,85	1,77
19	Kota Bandung	0,37	0,16	0,04
20	Kota Cirebon	0,66	0,42	0,28
21	Kota Bekasi	-	4,28	4,20
22	Kota Depok	-	3,33	3,25
JAWA BARAT		1,96	1,65	1,56

Sumber: Hasil SP 1990, SP 2000, Susenas 2002, dan proyeksi 2005 (didah kembali).
Keterangan: Laju pertumbuhan dihitung dengan metode geometrik.

Konsekuensi dari kejadian di atas terhadap laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000 adalah munculnya angka pertumbuhan negatif untuk Kabupaten Bogor (-0,63 persen) dan Bekasi (-2,29 persen), namun sebaliknya laju pertumbuhan Kota Bogor angkanya menjadi sangat besar (10,70 persen). Laju pertumbuhan Kota Bekasi dan juga Kota Depok pada kurun waktu tersebut angkanya tidak bisa dimunculkan, karena pada tahun 1990 belum terbentuk, atau wilayah masing-masing kota itu masih berstatus sebagai bagian dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sebagai bukti bahwa reklasifikasi wilayah memiliki konsekuensi demografis dapat terlihat dari laju pertumbuhan antara tahun 2000-2002. Angka pertumbuhan Kabupaten Bogor dan Bekasi tidak lagi negatif, dan laju pertumbuhan Kota Bogor serta Sukabumi menurun drastis.

Angka laju pertumbuhan pada tingkat Provinsi Jawa Barat memperlihatkan penurunan yang konsisten, dan pada kurun waktu tahun 2002-2005 diperkirakan angkanya telah mencapai 1,56 persen per tahun. Enam daerah kabupaten dan kota, angka pertumbuhannya masih lebih tinggi dari Jawa Barat. Disebut berurutan dari yang tertinggi yaitu, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, dan Kota Sukabumi. Sedangkan 19 kabupaten/kota lainnya memiliki angka pertumbuhan yang lebih rendah.

Pada kelompok kabupaten, laju pertumbuhan yang tinggi diwakili oleh Kabupaten Bekasi (3,40 persen), Bandung (1,88 persen), dan Purwakarta (1,52 persen), sedangkan yang rendah adalah Kabupaten Majalengka (0,41 persen), Ciamis (0,47 persen), dan Indramayu (0,49 persen). Tiga kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan tinggi memiliki karakteristik ekonomi dan geografi yang relatif sama, yaitu merupakan daerah yang memiliki banyak industri dan berbatasan dengan kota besar, sehingga banyak menarik penduduk pendatang.

Kabupaten yang memiliki angka pertumbuhan rendah yaitu Kabupaten Ciamis dan Majalengka sama-sama merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi rendah. Sementara Indramayu kemungkinan akibat banyaknya penduduk yang bermigrasi ke luar daerah, sebab ketika ditelusuri lebih jauh ternyata penurunan laju pertumbuhan yang berarti baru terjadi mulai periode 1980-1990 (Setiawan, 1998).

Angka pertumbuhan tertinggi pada kelompok kota diwakili oleh Kota Bogor (8,90 persen), Bekasi (4,20 persen), dan Depok (3,25

persen). Rupanya keberadaan ketiga wilayah tersebut telah berperan sebagai penyangga yang menerima luberan penduduk DKI Jakarta. Selain itu, juga menerima luberan perluasan industri yang menambah lebih banyaknya migran masuk pencari kerja ke daerah tersebut (Sunaryo, 1995). Soegijoko dan Bulkin (1994) memperkirakan hampir 50 persen dari pasar kerja akibat penanaman modal domestik dan asing terletak di wilayah Jabotabek.

Di pihak lain, Kota Bandung memiliki angka laju pertumbuhan yang paling rendah (0,04 persen) dari kelompok kota, bahkan dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Mungkin karena sudah begitu banyaknya penduduk Kota Bandung (lihat Tabel 2.2), menyebabkan hampir tidak ada lagi ruang yang nyaman bagi pendatang untuk bertempat tinggal di kota tersebut.

Dilaporkan oleh Setiawan (1999) bahwa proporsi migran masuk dari pusat kota ke daerah pinggiran Bandung jauh lebih besar dibandingkan dengan sebaliknya. Perhitungan yang dibuat BPS (1999) memperlihatkan, pada tahun 1995 migran yang ke luar dari Kota Bandung dan masuk ke daerah pinggiran zona 1 yaitu wilayah yang langsung berbatasan dengan kota, jumlahnya sebesar 153,2 ribu orang. Sebaliknya yang bermigrasi ke luar dari zona 1 kemudian masuk ke kota hanya 67,8 ribu orang.

Selain Kota Bandung, yang juga memiliki laju pertumbuhan penduduk rendah pada periode 2002-2005 adalah Kota Cirebon (0,28 persen). Namun demikian karakteristik demografinya sangat berlainan dengan Kota Bandung. Pada tahun 2005, Kota Cirebon hanya memiliki jumlah penduduk 276,8 ribu orang dan termasuk dua kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara kabupaten/kota di Jawa Barat, sementara Kota Bandung memiliki jumlah penduduk 2,1 juta orang.

Penelusuran terhadap sejarah demografi menunjukkan, bahwa Kota Cirebon telah menjadi kota yang pertumbuhannya lebih kecil (3,53 persen) dari Kota Bandung sejak periode 1930-1961, sementara pada saat yang sama Kota Bandung memiliki angka pertumbuhan penduduk 5,85 persen. Pada tahun 1930 proporsi penduduk Kota Cirebon masih berkisar pada angka 32,4 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung, sedangkan tahun 2005 hanya tinggal 12,9 persen. Adapun penyebabnya, karena laju

pertumbuhan Kota Cirebon walaupun berfluktuasi namun memiliki kecenderungan penurunan yang bertahap. Berbeda dengan Kota Bandung yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga kurun 1980-1990, dan terjadi penurunan drastis pada periode 1990-2000.

2.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Jenis kelamin termasuk salah satu karakteristik penduduk yang pokok selain umur. Berdasarkan struktur jenis kelamin bisa diperkirakan kejadian-kejadian atau karakteristik sosial budaya dari suatu masyarakat yang mungkin telah mempengaruhi kondisi demografis. Di daerah konflik ada kemungkinan proporsi penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki, akibat banyaknya laki-laki yang meninggal karena terlibat perang. Demikian pula pada masyarakat perantau, karena pada umumnya yang “ditekan” oleh budaya untuk bermigrasi adalah laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah keluarga.

Dari Tabel 2.3 terlihat, penduduk laki-laki di Jawa Barat lebih banyak dari perempuan, dengan perbedaan sekitar 0,5 juta jiwa baik pada tahun 2002 maupun 2005. Padahal provinsi lain di Jawa selain DKI Jakarta, jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari laki-laki. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari banyaknya migran masuk ke Jawa Barat yang pada umumnya terdiri atas laki-laki (Setiawan, 1998).

Jika dibedakan menurut kabupaten dan kota, walaupun pada umumnya memiliki pola yang sama dengan kondisi Provinsi Jawa Barat, namun ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan yaitu di Kabupaten Ciamis, Subang, Majalengka, Kuningan dan Indramayu, serta Kota Cirebon dan Bogor. Kemungkinan ini bisa disebabkan oleh kurangnya aktivitas ekonomi di lima kabupaten yang disebut pertama, sehingga banyak diantara penduduk laki-lakinya yang bermigrasi ke luar. Agak sulit untuk memperkirakan penyebab kondisi struktur jenis kelamin di Kota Cirebon dan Bogor, namun sebagai gambaran kondisi struktur jenis kelamin seperti itu di Kota Cirebon telah terjadi lama, paling tidak sejak tahun 1980, sedangkan di Kota Bogor baru terjadi pada tahun 2002, sebab hasil SP 2000 masih menunjukkan jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan.

Tabel 2.3
Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	2002			2005		
		Lk	Prp	Lk+Prp	Lk ^{*)}	Prp ^{*)}	Lk+Prp
1	Bogor	1.868.173	1.731.289	3.599.462	1.941.176	1.789.416	3.730.593
2	Sukabumi	1.066.805	1.059.599	2.126.404	1.108.810	1.091.798	2.200.608
3	Cianjur	1.043.370	950.357	1.993.727	1.057.301	998.202	2.055.502
4	Bandung	2.221.740	2.113.838	4.335.578	2.355.112	2.229.310	4.584.423
5	Garut	1.059.265	1.042.269	2.101.534	1.097.476	1.070.011	2.167.487
6	Tasikmalaya	1.069.031	1.034.560	2.103.591	1.083.623	1.069.603	2.153.226
7	Ciamis	797.996	840.992	1.638.988	817.800	844.385	1.662.185
8	Kuningan	494.115	504.369	998.484	505.269	509.333	1.014.602
9	Cirebon	997.746	980.082	1.977.828	1.023.970	1.014.831	2.038.801
10	Majalengka	564.363	569.839	1.134.202	571.052	577.110	1.148.162
11	Sumedang	503.338	488.129	991.467	512.090	508.723	1.020.813
12	Indramayu	799.739	811.006	1.610.745	816.415	818.330	1.634.745
13	Subang	664.407	687.947	1.352.354	682.902	698.999	1.381.901
14	Purwakarta	364.813	359.747	724.560	381.413	376.648	758.061
15	Karawang	921.656	916.274	1.837.930	958.114	947.307	1.905.421
16	Bekasi	929.550	857.159	1.786.709	1.008.243	966.872	1.975.114
17	Kota Bogor	438.800	453.080	891.880	573.634	578.321	1.151.955
18	Kota Sukabumi	132.208	129.653	261.861	138.911	137.098	276.009
19	Kota Bandung	1.080.374	1.062.540	2.142.914	1.079.852	1.065.464	2.145.315
20	Kota Cirebon	133.789	140.753	274.542	136.237	140.608	276.845
21	Kota Bekasi	932.885	876.421	1.809.306	1.037.432	1.009.410	2.046.842
22	Kota Depok	624.160	596.657	1.220.817	683.166	660.524	1.343.690
JAWA BARAT		18.708.323	18.206.560	36.914.883	19.569.997	19.102.303	38.672.300

Sumber: Hasil Susenas 2002 dan Proyeksi Setiawan 2004.

Keterangan: *)Dihitung berdasarkan tren proporsi jenis kelamin antara tahun 2000-2002.

Agar lebih memudahkan analisis struktur jenis kelamin, Tabel 2.4 menampilkan data mengenai rasio jenis kelamin penduduk kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rasio jenis kelamin merupakan ukuran demografi untuk menyatakan perbandingan antara banyaknya laki-laki dengan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki tiap 100 orang penduduk perempuan (Shryock dan Siegel, 1976).

Tabel 2.4
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2002, dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	Rasio Jenis Kelamin		
		2000	2002	2005
1	Bogor	109,1	107,9	108,5
2	Sukabumi	102,4	100,7	101,6
3	Cianjur	102,2	109,8	105,9
4	Bandung	106,2	105,1	105,6
5	Garut	103,5	101,6	102,6
6	Tasikmalaya	99,3	103,3	101,3
7	Ciamis	98,9	94,9	96,9
8	Kuningan	100,5	98,0	99,2
9	Cirebon	100,0	101,8	100,9
10	Majalengka	98,9	99,0	99,0
11	Sumedang	98,3	103,1	100,7
12	Indramayu	100,9	98,6	99,8
13	Subang	98,8	96,6	97,7
14	Purwakarta	101,1	101,4	101,3
15	Karawang	101,7	100,6	101,1
16	Bekasi	100,3	108,4	104,3
17	Kota Bogor	101,6	96,8	99,2
18	Kota Sukabumi	100,7	102,0	101,3
19	Kota Bandung	101,0	101,7	101,4
20	Kota Cirebon	98,8	95,1	96,9
21	Kota Bekasi	99,2	106,4	102,8
22	Kota Depok	102,3	104,6	103,4
JAWA BARAT		102,1	102,8	102,4

Sumber: Hasil SP 2000, Susenas 2002, proyeksi 2005 (diolah kembali).

Pada kelompok kabupaten, angka rasio jenis kelamin tahun 2005 terbesar berada pada oleh Kabupaten Bogor (108,5) dan yang terkecil Kabupaten Ciamis (96,9). Untuk kelompok kota angka terbesar dimiliki oleh Kota Depok (103,4) dan yang terkecil Kota Cirebon (96,9). Jika asumsi yang digunakan untuk menjawab kondisi seperti di atas adalah karena ke luar masuknya migran pada tingkatan kabupaten/kota, maka dapat dikatakan bahwa pada

kelompok kabupaten yang paling banyak menarik migran masuk adalah Kabupaten Bogor, dan pada kelompok kota adalah Kota Depok. Sementara itu Kabupaten Ciamis dan Kota Cirebon diindikasikan sebagai wilayah yang banyak mengirimkan migran ke luar daerahnya.

Rasio jenis kelamin Jawa Barat pada tahun 2005 sebesar 102,4 artinya di Jawa Barat terdapat 1.024 orang laki-laki tiap 1.000 orang perempuan. Angka rasio jenis kelamin di atas angka 100 terjadi juga pada tahun 2000 dan 2002. Namun demikian, jika dibedakan berdasarkan kabupaten/kota, data pada Tabel 2.4 memperlihatkan angka yang bervariasi.

2.2.3 Persebaran Penduduk

Data mengenai persebaran penduduk pada suatu wilayah sangat diperlukan, untuk melihat di bagian mana terjadi pemusatan penduduk dan dibagian mana saja yang memiliki jumlah relatif penduduk sedikit. Data persebaran penduduk menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan proporsi penduduk pada tiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Jawa Barat, angkanya dinyatakan dalam persen.

Tabel 2.5 memperlihatkan, proporsi penduduk terbanyak pada tahun 2005 berada di Kabupaten Bandung (11,85 persen) dan Kabupaten Bogor (9,65 persen). Keadaan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2000. Peringkat ketiga terbanyak tahun 2005 diduduki oleh Kabupaten Sukabumi (5,69 persen), dan ini telah menggeser kedudukan Kota Bandung yang pada tahun 2000 dan 2002 berada di peringkat ketiga tetapi pada tahun 2005 menjadi peringkat keenam (5,55 persen).

Walaupun Kabupaten Bandung dan Bogor sama-sama menjadi daerah yang memiliki persentase penduduk banyak, namun dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2000 memiliki perbedaan. Angka relatif penduduk Kabupaten Bandung pada periode tahun 2000-2005 memperlihatkan peningkatan yang konsisten. Kabupaten Bogor walaupun posisinya tetap berada diperingkat kedua, pada periode 2000-2005 angka relatifnya memperlihatkan penurunan.

Kabupaten Sukabumi yang mengalami peningkatan peringkat dari posisi keempat terbanyak pada tahun 2000 dan 2002, menjadi

peringkat ketiga pada tahun 2005, tidak berarti angka relatifnya meningkat, malah sebaliknya. Proporsi penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2005 ternyata angkanya lebih rendah dari tahun 2000 dan 2002. Lain halnya dengan Kota Bandung, yang mengalami penurunan peringkat dari posisi ketiga pada tahun 2000 dan 2002 menjadi keenam pada tahun 2005, ternyata sejalan dengan penurunan angka relatif penduduknya yang konsisten.

Tabel 2.5
Persebaran Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2000, 2002, dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	Persebaran Penduduk (%)		
		2000	2002	2005
1	Bogor	9,82	9,75	9,65
2	Sukabumi	5,81	5,76	5,69
3	Cianjur	5,45	5,40	5,32
4	Bandung	11,64	11,74	11,85
5	Garut	5,74	5,69	5,60
6	Tasikmalaya	5,78	5,70	5,57
7	Ciamis	4,53	4,44	4,30
8	Kuningan	2,76	2,70	2,62
9	Cirebon	5,41	5,36	5,27
10	Majalengka	3,14	3,07	2,97
11	Sumedang	2,71	2,69	2,64
12	Indramayu	4,45	4,36	4,23
13	Subang	3,72	3,66	3,57
14	Purwakarta	1,96	1,96	1,96
15	Karawang	5,00	4,98	4,93
16	Bekasi	4,67	4,84	5,11
17	Kota Bogor	2,10	2,42	2,98
18	Kota Sukabumi	0,71	0,71	0,71
19	Kota Bandung	5,98	5,81	5,55
20	Kota Cirebon	0,76	0,74	0,72
21	Kota Bekasi	4,66	4,90	5,29
22	Kota Depok	3,20	3,31	3,47
JAWA BARAT		100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil SP 2000, Susenas 2002, proyeksi 2005 (diolah kembali).

Selanjutnya Tabel 2.5 memperlihatkan pula, kabupaten dan kota yang memiliki proporsi penduduk paling sedikit. Peringkat paling kecil diduduki oleh Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Angka relatifnya, pada tahun 2005 masing-masing

sebesar 0,71 persen, 0,72 persen, dan 1,96 persen. Posisi ketiganya telah berlangsung sejak tahun 2000, walaupun memiliki pola yang berlainan. Angka relatif Kota Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta tetap konstan dari tahun 2000 hingga 2005, hal ini berlainan dengan Kota Cirebon yang memperlihatkan konsistensi penurunan.

2.2.4 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data persebaran penduduk kabupaten/kota seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.5, tidak terlihat ada perbedaan yang terlalu mencolok. Pada kelompok kabupaten, interval persebaran penduduk antara terkecil dan terbesar adalah 9,89 persen, sedangkan pada kelompok kota lebih kecil lagi yaitu 4,83 persen. Akan sangat berbeda jika dipakai ukuran kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk diperoleh dengan cara membagi jumlah absolut penduduk dengan luas wilayah tertentu pada waktu tertentu. Ukurannya dinyatakan dalam banyak penduduk tiap luas wilayah dalam km². Kondisi kepadatan penduduk Jawa Barat menurut kabupaten dan kota ditampilkan dalam Tabel 2.6.

Nampak dalam Tabel 2.6, Jawa Barat memiliki wilayah seluas 34.588,89 km² (BPS, 2001), angka itu merupakan luas wilayah setelah berpisah dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Jawa Barat pada awalnya 43.240,06 km² (Bappeda Jabar, 2000), atau telah berkurang 8.651,17 km² (20,01 persen). Jumlah penduduk yang telah beralih status menjadi penduduk Banten menurut hasil SP 2000 diperkirakan sebesar 7,83 juta orang (17,98 persen). Mencermati data ini, bisa dipastikan bahwa setelah berpisah dengan Banten penduduk Jawa Barat menjadi lebih padat, sebab persentase pengurangan luas wilayah lebih besar dari persentase pengurangan penduduk.

Pada kelompok kabupaten, wilayah terluas dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, dan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kabupaten Purwakarta. Dilihat dari peringkat jumlah penduduknya, Kabupaten Sukabumi bukanlah yang terbesar tapi hanya berada diperingkat ketiga (lihat Tabel 2.1), sedangkan Purwakarta sesuai dengan peringkat jumlah penduduknya, selain memiliki jumlah penduduk paling sedikit juga memiliki luas wilayah paling sempit. Pada kelompok kota, yang terluas adalah Kota Depok

dan yang paling sempit Kota Cirebon. Dilihat dari jumlah penduduknya, yang terbanyak adalah Kota Bandung dan paling sedikit Kota Sukabumi. Makna dari hal ini adalah, ada kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk banyak tetapi kepadatan penduduknya rendah, dan kemungkinan lain terjadi hal yang sebaliknya.

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2000, 2002, dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Wil. Km ²	Kepadatan Penduduk (org/km ²)		
			2000	2002	2005
1	Bogor	3.065,52	1.145	1.174	1.217
2	Sukabumi	3.867,16	537	550	569
3	Cianjur	3.460,82	562	576	594
4	Bandung	2.954,02	1.408	1.468	1.552
5	Garut	3.045,33	674	690	712
6	Tasikmalaya	2.740,17	753	768	786
7	Ciamis	2.520,54	642	650	659
8	Kuningan	1.117,00	882	894	908
9	Cirebon	974,00	1.983	2.031	2.093
10	Majalengka	1.210,00	927	937	949
11	Sumedang	1.421,82	681	697	718
12	Indramayu	1.935,27	822	832	845
13	Subang	1.864,00	713	726	741
14	Purwakarta	971,72	720	746	780
15	Karawang	1.578,45	1.132	1.164	1.207
16	Bekasi	1.082,68	1.541	1.650	1.824
17	Kota Bogor	112,74	6.660	7.911	10.218
18	Kota Sukabumi	48,44	5.211	5.406	5.698
19	Kota Bandung	168,06	12.711	12.751	12.765
20	Kota Cirebon	37,36	7.288	7.349	7.410
21	Kota Bekasi	201,55	8.255	8.977	10.156
22	Kota Depok	212,24	5.387	5.752	6.331
JAWA BARAT		34.588,89	1.033	1.067	1.118

Sumber: Hasil SP 2000, Susenas 2002, dan proyeksi 2005 (dibah kembali).

Secara umum, angka kepadatan penduduk Jawa Barat terus bertambah dari tahun 2000 sampai tahun 2005, demikian pula jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota. Kondisi ini sangat wajar, karena pada periode tersebut tidak ada kejadian reklasifikasi wilayah. Tercermin pula dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2005 yang semuanya memperlihatkan angka positif, berbeda dengan periode 1990-2000 ada kabupaten yang memiliki

angka pertumbuhan negatif karena pengurangan luas wilayahnya (lihat Tabel 2.2).

Menurut Horstman dan Rutz (1980) kepadatan penduduk dapat dikategorikan menjadi : kepadatan penduduk sangat rendah (< 150 orang), rendah (150 – 400 orang), menengah (400 - 800 orang), tinggi (800 – 1200 orang), dan sangat tinggi (>1200 orang). Berdasarkan klasifikasi tersebut di Jawa Barat terdapat delapan kabupaten/kota yang tergolong kepadatannya penduduknya menengah, tiga kabupaten/kota berkategori berpenduduk padat, dan sebelas kabupaten/kota digolongkan berpenduduk sangat padat.

Peringkat kepadatan penduduk dari yang terpadat hingga yang terjarang, pada tahun 2000, 2002, dan 2005 tidak mengalami perubahan yang berarti, umumnya peringkat kabupaten/kota tetap, kecuali terjadi pergeseran pada tiga kota yaitu Kota Bogor, Bekasi, dan Cirebon. Wilayah yang penduduknya paling padat adalah Kota Bandung dengan tingkat kepadatan 12.765 orang per km², dan yang berpenduduk paling jarang adalah Kabupaten Sukabumi 569 orang per km². Mencermati hal ini, terdapat perbedaan yang sangat menyolok antar wilayah di Jawa Barat, disatu pihak ada yang kepadatannya di atas 12.000 orang per km², namun di pihak lain ada juga yang kepadatannya di bawah 1.000 orang per km².

Dilihat secara parsial antara kelompok kota dan kelompok kabupaten pada tahun 2005. Kota terpadat dipegang oleh Kota Bandung (12.765 orang per km²), dan yang berpenduduk paling jarang Kota Sukabumi (5.698 orang per km²), selisih antara kedua kota tersebut sekitar tujuh ribuan. Pada kelompok kabupaten, yang terpadat Kabupaten Cirebon (2.093 orang per km²) dan yang paling jarang adalah Kabupaten Sukabumi (569 orang per km²), selisih antara keduanya berkisar 1,5 ribuan. Fakta ini setidaknya memberi gambaran kepada kita, ada ketidakseimbangan jumlah penduduk per satuan luas, antara kabupaten yang masih didominasi oleh pedesaan dengan daerah kota.

Perbedaan peningkatan kepadatan penduduk antara tahun 2000 sampai 2005, nampak sangat ekstrim antara kelompok kota dan kabupaten. Pada kelompok kota, kepadatan penduduk yang meningkat sangat cepat antara tahun 2000-2005 terjadi di Kota Bekasi dengan peningkatan sebanyak 2.868 orang per km². Pada

kelompok kabupaten yang tercepat adalah Kabupaten Bekasi dengan peningkatan 283 orang per km².

Selanjutnya Tabel 2.6 juga menyiratkan, pada semua kota di Jawa Barat peningkatan kepadatan penduduk sangat cepat, kecuali untuk Kota Bandung yang hanya meningkat 54 orang per km² dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Mungkin hal ini disebabkan karena telah begitu padatnya Kota Bandung, sehingga sudah tidak bisa lagi menyediakan ruang yang memadai untuk bermukimnya penduduk, dan seperti telah diuraikan terdahulu banyak diantara mereka yang pindah ke Kabupaten Bandung yang langsung berbatasan dengan Kota Bandung sebagai tempat tinggalnya (Setiawan, 1999).

Pada kelompok kabupaten, walaupun peningkatan kepadatan penduduknya tidak secepat kelompok kota, ada kabupaten yang jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya terlihat agak menonjol. Kabupaten tersebut ditulis berurutan berdasarkan kecepatan peningkatan kepadatan penduduknya adalah, Kabupaten Bekasi, Bandung, Cirebon, Karawang, Bogor, dan Purwakarta. Sepintas kita dapat mengetahui, kabupaten tersebut merupakan wilayah yang berada sekitar kota besar yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi.

2.3. Gambaran Umum Migrasi dan Urbanisasi

2.3.1 Migrasi Seumur Hidup

Penduduk migran sebagian besar berumur antara 20 – 34 tahun, baik untuk migran laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari kelompok umur, penduduk migran yang masuk ke Jawa Barat, paling banyak adalah migran yang berusia 25 – 29 tahun untuk laki-laki, sedangkan migran perempuan persentase terbesar berada pada kelompok umur 20 -24 tahun (Tabel 2.7).

Pada umumnya penduduk yang melakukan migrasi adalah penduduk yang berusia produktif, begitu pula dengan penduduk yang melakukan migrasi ke Jawa Barat. Biasanya migran tersebut karena pindah kerja, mencari pekerjaan, atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Migran yang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan, secara langsung maupun tidak mendesak pemerintah daerah agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, jika tidak diupayakan maka ada kemungkinan angka pengangguran di Jawa Barat akan meningkat seiring dengan banyaknya migran yang belum memiliki pekerjaan. Bagi migran yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Jawa Barat, karena hal ini dapat mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat.

Tabel 2.7
Persentase Migran Seumur Hidup
Menurut Umur, Jawa Barat Tahun 2000

Kel. Umur	Jenis Kelamin		L + P
	L	P	
0 - 4	5,13	5,69	5,40
05 - 09	6,01	6,58	6,28
10 - 14	6,06	7,00	6,51
15 - 19	8,23	10,42	9,28
20 - 24	12,76	15,09	13,87
25 - 29	13,68	14,43	14,03
30 - 34	13,02	12,18	12,62
35 - 39	10,51	9,14	9,86
40 - 44	8,17	6,53	7,38
45 - 49	5,76	4,24	5,04
50 - 54	3,55	2,72	3,15
55 - 59	2,62	1,86	2,26
60 - 64	1,84	1,45	1,65
65 - 69	1,03	1,00	1,01
70 - 74	0,79	0,73	0,76
75+	0,85	0,92	0,88
TT	0,01	0,01	0,01
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, SP 2000

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat pola yang cukup bervariasi. Hampir di seluruh daerah kota, kecuali Kota Sukabumi, migran seumur hidup yang masuk didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 30-34 tahun, rata-rata berada di atas 10 persen. Demikian halnya untuk kabupaten penunjang kota, kecuali Kabupaten Sukabumi dan Cirebon. Untuk kabupaten yang bukan penunjang kota namun mengikuti pola yang sama adalah Kabupaten Karawang.

Menurut teori bahwa penduduk laki-laki cenderung lebih migratori dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi juga di Jawa Barat, dimana migran laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada migran perempuan, walaupun angka perbedaan tersebut tidak terlalu besar, yaitu 52,24 persen migran laki-laki dan 47,76 persen migran perempuan. Kondisi seperti ini ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh John Charles Caldwell di Accra, Ghana, bahwa jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan.

Tabel 2.8
Persentase Migran Seumur Hidup di Atas 10 tahun
Menurut Kelompok Umur Tertentu Jawa Barat Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	20 -24	25 - 29	30 - 34
Kab. Bogor	13,70	14,41	13,42
Kab. Bandung	14,35	14,87	12,98
Kab. Karawang	14,04	14,16	11,68
Kab. Bekasi	16,95	17,13	14,26
Kota Bogor	12,03	12,32	11,74
Kota Bandung	16,62	13,74	10,94
Kota Cirebon	10,26	10,55	10,04
Kota Bekasi	12,44	12,91	12,08
Kota Depok	12,71	13,18	11,62

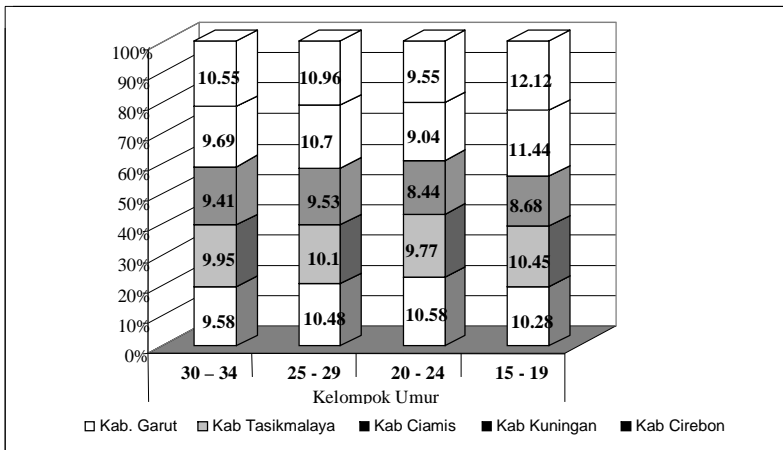
Sumber : BPS Hasil SP 2000

Di samping itu, faktor norma atau nilai yang masih dianut oleh sebagian masyarakat, dimana penduduk laki-laki lebih diberi kebebasan untuk merantau daripada perempuan. Hal ini didasari

dengan pertimbangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mencari nafkah daripada perempuan, sehingga akan mendorong laki-laki untuk berusaha memperoleh penghasilan walaupun harus bermigrasi ke daerah lain yang dianggapnya dapat memberi harapan.

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa sebagian besar migran masuk ke daerah BODEBEK (Bogor, Depok dan Bekasi). Ketiga wilayah ini merupakan daerah penerima migran terbesar, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan langsung dengan ibu kota negara DKI Jakarta. Dengan semakin mahalnya harga tanah dan harga kontrak/sewa rumah di DKI Jakarta, maka para migran memutuskan untuk memilih wilayah di sekitar DKI sebagai tempat tinggal mereka. Walaupun jarak tempuh antara tempat tinggal dengan tempatnya bekerja tidak menjadi hambatan bagi mereka, terutama setelah dioperasikannya kereta api dari Bogor ke Jakarta dan dari Bekasi ke Jakarta, maka faktor jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang bagi para migran, khususnya bagi migran dari kota ke kota.

Gambar 2.1
Persentase Migrasi Seumur Hidup yang Masuk
Ke 5 Kabupaten Menurut Kelompok Umur Tertentu
Tahun 2000



Sumber; BPS, Tahun 2000

Selain itu, persentase migran pada kelompok umur 20 – 24 tahun di Kabupaten Sumedang cukup tinggi (20,97 persen), fenomena ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Salah satu penyebabnya adalah di wilayah Kabupaten Sumedang terdapat beberapa perguruan tinggi seperti; UNPAD, STPDN, IKOPIN, dan UNWIM.

Di Kabupaten Garut, persentase migran seumur hidup yang masuk cenderung tinggi pada kelompok umur 15-19 tahun hingga 25-29 tahun. Hal serupa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan dan Cirebon. Di Kabupaten Kuningan, persentase tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun.

Dilihat dari status perkawinan, tampak migran laki-laki maupun perempuan sebagian besar berstatus kawin. Bila dibandingkan antara migran dan non migran, keadaannya sama yaitu sebagian besar berstatus kawin. Namun demikian migran laki-laki yang berstatus kawin persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki non migran. Sebaliknya, pada migran perempuan persentase yang kawin tampak lebih rendah dibandingkan dengan perempuan non migran. Namun demikian, status kawin ini tidak dapat ditelusuri lebih jauh, apakah mereka melaksanakan perkawinannya di daerah asal atau di tempat yang baru, karena data untuk kebutuhan ini tidak tersedia.

Tabel 2.9
Persentase Migran Masuk Seumur Hidup
Menurut Status Perkawinan, Jawa Barat Tahun 2000

Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Belum Kawin	33,57	37,27	35,96	30,91
Kawin	65,09	60,14	59,18	60,34
Cerai Hidup	0,64	1,47	1,31	2,38
Cerai Mati	0,69	1,11	3,55	6,38
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Hasil SP 2000

Data pada Tabel 2.9 menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus kawin cenderung lebih banyak yang melakukan migrasi. Hal ini dikarenakan penduduk yang berstatus kawin memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan di daerah asal, maka mereka akan mencari pekerjaan di daerah lain, atau mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi merasa belum puas, maka akan mencari pekerjaan di daerah lain yang dianggapnya dapat memberi harapan.

Latar belakang pendidikan yang ditamatkan, migran laki-laki maupun perempuan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu DIII ke atas. Penduduk non migran sebagian besar berpendidikan rendah (belum sekolah/tidak punya ijazah dan SD atau setara). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk migran cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk non migran. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong seseorang untuk melakukan migrasi

Tabel 2.10
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Ijazah yang Dimiliki, Jawa Barat Tahun 2000

Ijazah yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Belum/tdk punya	3,63	96,37	3,63	96,37
SD/Setara	4,51	95,49	5,29	94,71
SLTP/Setara	13,24	86,76	15,41	84,59
SLTA/Setara	26,92	73,08	28,26	71,74
Diploma I/II	19,41	80,59	19,57	80,43
Akademi/DIII	38,39	61,61	38,35	61,65
Perg. Tinggi/Univ	40,33	59,67	38,88	61,12
Jawa Barat	10,60	89,40	9,85	90,15

Sumber : BPS Hasil SP 2000

Tabel 2.11
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Lapangan Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Pertanian	1,96	98,04	1,65	98,35
Industri	22,09	77,91	21,73	78,27
Perdagangan	11,81	88,19	10,10	89,90
Jasa	18,54	81,46	21,23	78,77
Angkutan	9,47	90,53	10,29	89,71
Lainnya	12,96	87,04	9,66	90,34
Jawa Barat	11,58	88,42	10,30	89,70

Sumber : BPS Hasil SP 2000

Menurut lapangan pekerjaan utama, migran seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar bekerja atau berusaha di sektor industri kemudian diikuti sektor jasa dan perdagangan. Bila dibandingkan dengan penduduk non migran, migran lebih banyak yang bekerja di sektor tersier dan sekunder, sedangkan penduduk non migran lebih banyak bekerja di sektor primer yaitu pertanian.

Tabel 2.12 menunjukkan migran seumur hidup berdasarkan status pekerjaan ternyata lebih banyak yang bekerja sebagai buruh atau pekerja yang dibayar baik migran laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar migran yang masuk ke Jawa Barat bekerja di sektor industri sebagai buruh. Untuk migran yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap persentasenya sedikit sekali, sedangkan bila melihat pada data non migran tampak mereka yang bekerja dengan dibantu buruh tidak tetap persentasenya 90 persen lebih, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

Status pekerja yang tidak dibayar, tampak persentase migran baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan dengan non migran. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk migran cenderung memilih status pekerjaan yang lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan penduduk non migran.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Berusaha Sendiri	8,31	91,69	8,14	91,86
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	2,57	97,43	2,46	97,54
Berusaha dibantu buruh tetap	12,20	87,80	12,29	87,71
Pekerja/buruh dibayar	17,90	82,10	19,32	80,68
Pekerja tdk dibayar	6,86	93,14	5,52	94,48
Jawa Barat	11,58	88,42	10,30	89,70

Sumber : BPS Hasil SP 2000

Bila diklasifikasikan menurut sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/pekerja dibayar) dan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja tidak dibayar), penduduk migran persentasenya lebih besar daripada penduduk non migran. Migran yang bekerja di sektor formal sebanyak 66,74 persen sedangkan non migran sebesar 37,82 persen. Faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut salah satunya adalah faktor pendidikan. Tingkat pendidikan migran cenderung lebih tinggi daripada penduduk non migran, sehingga migran cenderung lebih banyak yang bekerja di sektor formal.

Kondisi ini kalau ditarik ke tingkat kabupaten/kota juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Laporan Setiawan (1999) memberikan gambaran di wilayah pinggiran Kota Bandung proporsi migran yang bekerja di sektor formal sebesar 72,0 persen sedangkan 28,0 persen lainnya di sektor informal. Sementara pekerja non migran yang bekerja di sektor formal hanya 59,2 persen, dan yang bekerja di sektor informal 41,0 persen. Kondisi ini dikhawatirkan berlanjut pada ketimpangan ekonomi dan merupakan potensi konflik.

2.3.2 Migrasi Risen

Berbeda dengan status migrasi seumur hidup, pada migran risen penduduk yang masuk ke Jawa Barat seperti terlihat pada Tabel 2.13 sebagian besar berumur 20–24 tahun, sedangkan untuk migrasi seumur hidup yang dominan adalah kelompok umur 25–29 tahun. Ini dimungkinkan, pada lima tahun terakhir sebagian besar migran bertujuan untuk melanjutkan pendidikan di Jawa Barat, sehingga migran yang masuk ke Jawa Barat lebih banyak dari kelompok usia pendidikan tinggi.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Kelompok Umur, Jawa Barat Tahun 2000

Kel. Umur	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
05 - 09	8,48	11,48	8,66	11,97
10 - 14	6,81	11,00	7,46	11,15
15 - 19	10,08	11,43	13,66	11,42
20 - 24	18,37	10,15	20,89	11,39
25 - 29	15,61	10,21	16,08	10,68
30 - 34	13,79	9,03	11,74	9,00
35 - 39	9,56	8,13	7,12	8,14
40 - 44	5,86	7,18	4,44	6,56
45 - 49	3,76	5,68	2,89	4,92
50 - 54	2,42	4,33	2,08	3,92
55 - 59	1,76	3,17	1,43	2,87
60 - 64	1,30	2,99	1,17	2,80
65 - 69	0,73	1,82	0,79	1,89
70 - 74	0,61	1,66	0,63	1,57
75+	0,84	1,73	0,96	1,71
TT	0,01	0,02	0,01	0,02
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS; tahun 2002

Migrasi risen yang paling sedikit adalah mereka yang berada pada kelompok umur 70–74 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas (lihat Tabel 2.13). Tampaknya migran seumur hidup maupun migran risen didominasi oleh penduduk kelompok umur muda. Fenomena ini terdapat hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebagian besar dari pelaku migrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan penduduk usia muda (15–35 tahun) memiliki kemampuan serta kemauan yang relatif tinggi dibandingkan dengan penduduk usia senja.

Secara umum migran risen laki-laki lebih banyak daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar. Namun bila dilihat menurut kelompok umur, tampak pada kelompok umur tertentu migran perempuan cenderung persentasenya lebih besar daripada laki-laki, yaitu kelompok umur muda (10-29). Banyaknya migran risen perempuan membuktikan telah terjadi pergeseran nilai norma yang membatasi gerak penduduk perempuan.

Migran risen dilihat berdasarkan status perkawinannya, persentase yang berstatus kawin baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak yang kawin dibandingkan dengan status lainnya, gambaran ini sama dengan penduduk non migran.

Tabel 2.14
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Perkawinan, Jawa Barat Tahun 2000

Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Belum Kawin	37,91	36,84	40,81	31,06
Kawin	60,87	60,66	55,11	60,41
Cerai hidup	0,67	1,41	1,34	2,31
Cerai Mati	0,55	1,09	2,74	6,22
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, tahun 2002

Migran risen perempuan yang belum kawin persentasenya lebih besar dari migran laki-laki. Biasanya migran perempuan yang masuk ke Jawa Barat sebagian besar mempunyai tujuan untuk bekerja di sektor industri, dimana sektor ini banyak yang mensyaratkan buruh wanitanya belum kawin. Namun demikian bila dibandingkan dengan penduduk non migran, tampak persentase penduduk non migran yang belum kawin lebih rendah daripada migran.

Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu dari faktor pendidikan, dengan melihat dari ijazah tertinggi yang dimilikinya. Data pada Tabel 2.15 tampak bahwa pendidikan para migran lebih rendah daripada penduduk non migran baik laki-laki maupun perempuan. Bila dilihat menurut jenis kelamin, pendidikan migran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan migran laki-laki. Fakta ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi dengan migrasi, semakin tinggi pendidikan maka semakin kuat dorongan untuk melakukan migrasi.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jawa Barat Tahun 2000

Ijazah Yang dimiliki	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Belum/tdk punya	1,52	98,48	1,57	98,43
SD/Setara	1,69	98,31	2,08	97,92
SLTP/Setara	4,10	95,90	5,08	94,92
SLTA/Setara	8,72	91,28	9,68	90,32
Diploma I/II	6,58	93,42	6,71	93,29
Akademi/DIII	11,67	88,33	12,57	87,43
Perg. Tinggi/Univ	12,51	87,49	12,60	87,40
Jawa Barat	3,56	96,44	3,54	96,46

Sumber : BPS, tahun 2002

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, migran risen memiliki lapangan pekerjaan yang lebih maju. Mereka lebih banyak

bekerja di sektor tersier dan sekunder, sedangkan penduduk non migran lebih banyak yang bekerja di sektor pertanian. Artinya, penduduk migran memiliki kemampuan/keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk non migran. Hal ini dapat dipahami, mengingat migran yang masuk ke Jawa Barat rata-rata berpendidikan SLTA ke atas. Dengan modal pendidikan dan semangat yang tinggi, menyebabkan migran lebih kompetitif daripada penduduk non migran.

Dirinci menurut per sektor, tampak migran risen lebih banyak yang bekerja di sektor jasa, industri, dan perdagangan, tampaknya ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang dominan dimasuki oleh para migran. Begitu pula dengan penduduk non migran sektor jasa dan lainnya yang paling banyak dimasuki oleh penduduk tersebut. Ada hal yang menarik dari Tabel 2.16 tersebut, yaitu penduduk non migran perempuan persentase tertinggi adalah pada sektor lainnya. Tampaknya sektor ini perlu dikaji lebih dalam agar dapat dilihat dan dikaji faktor-faktor penyebabnya.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Lapangan Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Pertanian	7,80	31,67	7,62	31,92
Industri	25,30	11,39	27,23	10,43
Perdagangan	17,03	16,82	10,89	13,88
Jasa	32,84	22,25	29,04	14,28
Angkutan	3,62	4,57	0,36	0,37
Lainnya	13,41	13,31	24,86	29,13
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, tahun 2002.

Migran risen menurut status pekerjaan, persentase tertinggi adalah bekerja dengan status pekerja/buruh yang dibayar, dan yang berusaha sendiri. Begitu pula dengan penduduk non migran sebagian besar bekerja sebagai pekerja yang dibayar. Migran

perempuan yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar memiliki persentase yang tinggi begitu pula dengan penduduk perempuan non migran. Hal ini karena banyak migran perempuan maupun non migran yang bekerja dengan keluarga atau famili yang sifatnya hanya membantu dan tidak dibayar dengan bentuk uang atau upah, biasanya mereka ini diberi kompensasi seperti makan, maupun keperluan sandangnya tidak digolongkan sebagai upah.

Migran yang bekerja di sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/pekerja dibayar) dan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja tidak dibayar), persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk non migran. Penduduk nigran yang bekerja si sektor formal sebesar 66,85 persen, sedangkan penduduk non migran sebesar 39,98 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa, migran cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk non migran. Untuk menghindari adanya kesenjangan yang lebih jauh antara migran dengan penduduk non migran maka harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan daya saing penduduk non migran. Penduduk non migran perlu lebih ditingkatkan lagi daya kompetitifnya dalam hal memasuki lapangan usaha atau pekerjaan

Tabel 2.17
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Pekerjaan, Jawa Barat Tahun 2000

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
	Migran	Non Migran	Migran	Non Migran
Berusaha Sendiri	23,41	33,42	14,04	21,27
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	4,55	16,67	2,25	7,38
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	1,90	1,89	1,19	1,10
Pekerja/Buruh Dibayar	67,17	42,89	61,92	30,47
Pekerja Tidak Dibayar	2,97	4,93	20,60	39,78
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber, BPS, tahun 2002.

Selanjutnya Tabel 2.18 menunjukkan, dari total migran risen 2,52 juta orang yang masuk ke Jawa Barat, sebanyak 22,4 persen masuk ke Kota Bekasi, 18,2 persen ke Kota Depok, dan 12,5 persen ke Kota Bandung. Sedangkan pada kategori kabupaten yang banyak menerima migran risen adalah Kabupaten Bogor (7,2 persen), Kabupaten Bekasi (6,0 persen), dan Kabupaten Bandung (5,7 persen). Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa migran risen yang masuk ke Jawa Barat terutama menuju ke Ibukota Provinsi dan ke wilayah Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi).

Tabel 2.18
Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/Pedesaan Jawa Barat Tahun 2000

No.	Kabupaten/Kota	Kota	Pedesaan	Kota + Pedesaan
1	Bogor	6,8%	9,4%	7,2%
2	Sukabumi	0,8%	10,0%	2,2%
3	Cianjur	0,7%	7,6%	1,8%
4	Bandung	5,7%	5,8%	5,7%
5	Garut	0,6%	7,2%	1,6%
6	Tasikmalaya	0,8%	4,9%	1,5%
7	Ciamis	0,7%	8,8%	1,9%
8	Kuningan	0,5%	4,0%	1,0%
9	Cirebon	1,0%	2,5%	1,3%
10	Majalengka	0,4%	2,5%	0,7%
11	Sumedang	1,4%	3,4%	1,7%
12	Indramayu	0,5%	4,2%	1,1%
13	Subang	0,4%	6,3%	1,3%
14	Purwakarta	0,9%	3,8%	1,3%
15	Karawang	2,1%	11,6%	3,6%
16	Bekasi	6,4%	4,2%	6,0%
17	Kota Bogor	5,0%	0,0%	4,2%
18	Kota Sukabumi	1,1%	0,1%	1,0%
19	Kota Bandung	14,8%	0,0%	12,5%
20	Kota Cirebon	1,9%	0,0%	1,6%
21	Kota Bekasi	26,1%	2,8%	22,4%
22	Kota Depok	21,5%	0,9%	18,2%
Jawa Barat		100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000

Jika wilayah tujuan migran risen dikontraskan berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan, ternyata sebagian besar migran menuju daerah perkotaan (2,01 juta orang) dan hanya sekitar seperlimanya (0,51 juta orang) yang masuk ke daerah pedesaan Jawa Barat. Wilayah perkotaan Kota Bekasi merupakan tujuan utama para migran risen dengan persentase yang menuju kota tersebut sebesar 26,1 persen. Sementara tujuan selanjutnya adalah wilayah perkotaan Kota Depok dan Kota Bandung dengan persentase migran risen masing sebanyak 21,5 persen dan 14,8 persen.

Tabel 2.19
Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Jawa Barat Tahun 2000

No.	Kabupaten/Kota	Laki2	Perempuan	Lk + Pr
1	Bogor	7,5%	6,9%	7,2%
2	Sukabumi	2,3%	2,2%	2,2%
3	Cianjur	1,9%	1,7%	1,8%
4	Bandung	6,0%	5,5%	5,7%
5	Garut	1,6%	1,7%	1,6%
6	Tasikmalaya	1,5%	1,4%	1,5%
7	Ciamis	1,9%	2,0%	1,9%
8	Kuningan	1,1%	1,0%	1,0%
9	Cirebon	1,3%	1,2%	1,3%
10	Majalengka	0,7%	0,7%	0,7%
11	Sumedang	1,7%	1,7%	1,7%
12	Indramayu	1,0%	1,1%	1,1%
13	Subang	1,4%	1,3%	1,3%
14	Purwakarta	1,4%	1,3%	1,3%
15	Karawang	3,5%	3,7%	3,6%
16	Bekasi	5,8%	6,3%	6,0%
17	Kota Bogor	4,2%	4,3%	4,2%
18	Kota Sukabumi	1,0%	1,0%	1,0%
19	Kota Bandung	12,3%	12,7%	12,5%
20	Kota Cirebon	1,6%	1,5%	1,6%
21	Kota Bekasi	22,4%	22,4%	22,4%
22	Kota Depok	18,0%	18,5%	18,2%
Jawa Barat		100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000

Dicermati dari jenis kelamin, ternyata migran risen laki-laki dan perempuan yang masuk ke Jawa Barat jumlahnya cukup berimbang walaupun ada kecenderungan laki-laki jumlahnya sedikit di atas jumlah migran risen perempuan (lihat Tabel 2.19). Migran risen yang datang ke Bekasi proporsinya berimbang antara laki-laki dan perempuan masing-masing 22,4 persen dan 22,4 persen. Sementara yang menuju Kota Depok dan Kota Bandung proporsi perempuan 0,5 persen lebih tinggi dari proporsi laki-laki.

Kalau tujuan migrasi di Jawa Barat dikelompokkan secara umum antara kelompok kabupaten dan kota, ada kecenderungan kota-kota di Jawa Barat lebih banyak didatangi oleh migran risen perempuan, sementara wilayah kabupaten lebih banyak didatangi oleh migran risen laki-laki.

Walaupun sedikit menyinggung "SARA" tidak ada salahnya kajian mengenai migran risen ini dikaitkan dengan agama yang dianut, kewarganegaraan, dan etnis. Data seperti ini bahkan berguna untuk melihat berbagai kemungkinan dinamika sosial yang mungkin akan terjadi. Tabel 2.20 memperlihatkan migran risen beragama non Islam yang masuk ke Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota. Secara keseluruhan migran risen masuk ke Jawa Barat yang beragama non Islam berjumlah 839 ribu orang. Sebagian besar masuk ke wilayah perkotaan, hanya 51,6 ribu yang menuju wilayah pedesaan.

Proporsi migran risen non Islam terbesar masuk ke Kota Bekasi (23,0 persen) dan Kota Bandung (22,0 persen). Dari angka tersebut kita bisa menyebutkan angkanya agak berimbang, padahal jika dilihat dari total migran risen yang masuk Kota Bekasi dan Kota Bandung angkanya agak jomplang (lihat kembali Tabel 2.18). Hal ini berarti secara proporsional migran non Islam lebih banyak yang masuk ke Kota Bandung dibandingkan ke Kota Bekasi. Pada kategori kabupaten yang banyak didatangi oleh migran risen non Islam adalah Kabupaten Bandung dan kabupaten-kabupaten di wilayah Bodebek.

Tabel 2.20
Migran Lima Tahun yang Lalu Penganut Agama Non Islam
Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/Pedesaan
Jawa Barat Tahun 2000

No.	Kabupaten/Kota	Kota	Desa	Lk + Pr
1	Bogor	7,9%	23,4%	8,8%
2	Sukabumi	0,5%	7,2%	0,9%
3	Cianjur	1,1%	11,7%	1,8%
4	Bandung	9,6%	8,7%	9,5%
5	Garut	0,5%	4,5%	0,8%
6	Tasikmalaya	1,1%	2,1%	1,2%
7	Ciamis	0,4%	2,9%	0,5%
8	Kuningan	0,7%	5,3%	1,0%
9	Cirebon	1,0%	3,6%	1,2%
10	Majalengka	0,3%	2,0%	0,5%
11	Sumedang	0,5%	1,1%	0,6%
12	Indramayu	0,6%	4,1%	0,9%
13	Subang	0,5%	3,7%	0,7%
14	Purwakarta	0,6%	2,1%	0,7%
15	Karawang	2,6%	5,7%	2,7%
16	Bekasi	6,3%	6,9%	6,3%
17	Kota Bogor	6,6%	0,0%	6,2%
18	Kota Sukabumi	1,4%	0,1%	1,3%
19	Kota Bandung	22,0%	0,0%	20,7%
20	Kota Cirebon	2,9%	0,0%	2,8%
21	Kota Bekasi	23,0%	3,9%	21,8%
22	Kota Depok	9,8%	1,0%	9,3%
Jawa Barat		100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000

Pola yang sama dengan agama non Islam yang dianut oleh migran risen yang masuk ke kabupaten/kota Jawa Barat, terjadi juga jika kita mengkaji migran risen berdasarkan kewarganegaraannya (Tabel 2.21). Sebagian besar warga negara asing (WNA) lebih memilih tujuan ke perkotaan dibandingkan dengan ke pedesaan. Kota yang menjadi tujuan utama migran risen WNA adalah Kota Bandung (24,3 persen) dan Kota Bekasi (12,3 persen), ke Kota lain proposinya tidak terlampaui banyak. Sedangkan Kabupaten yang menjadi tujuan utama migran risen WNA adalah Kabupaten Bandung (11,9 persen) dan Kabupaten Bogor (9,2 persen), kabupaten lainnya umumnya di bawah 5 persen.

Tabel 2.21
Migran Lima Tahun yang Lalu WNA Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Kota/Pedesaan Jawa Barat Tahun 2000

No.	Kabupaten/Kota	Kota	Pedesaan	Kota + Pedesaan
1	Bogor	9,2%	48,0%	12,2%
2	Sukabumi	0,6%	4,5%	0,9%
3	Cianjur	3,5%	2,8%	3,4%
4	Bandung	11,9%	3,7%	11,2%
5	Garut	4,8%	6,3%	4,9%
6	Tasikmalaya	2,0%	1,4%	2,0%
7	Ciamis	2,0%	2,9%	2,1%
8	Kuningan	0,3%	1,4%	0,4%
9	Cirebon	2,1%	3,2%	2,1%
10	Majalengka	0,3%	0,3%	0,3%
11	Sumedang	2,4%	0,8%	2,3%
12	Indramayu	0,8%	2,5%	1,0%
13	Subang	0,5%	2,8%	0,6%
14	Purwakarta	0,9%	5,2%	1,2%
15	Karawang	3,8%	4,0%	3,8%
16	Bekasi	5,2%	8,7%	5,5%
17	Kota Bogor	5,8%	0,2%	5,4%
18	Kota Sukabumi	1,9%	0,0%	1,7%
19	Kota Bandung	24,3%	0,0%	22,5%
20	Kota Cirebon	1,6%	0,0%	1,4%
21	Kota Bekasi	12,3%	0,6%	11,4%
22	Kota Depok	3,8%	0,7%	3,6%
Jawa Barat		100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000

2.3.3 Urbanisasi di Jawa Barat

2.3.3.1 Penduduk Pedesaan dan Perkotaan

Penggolongan suatu wilayah menjadi daerah pedesaan atau perkotaan mengikuti klasifikasi yang digunakan Badan Pusat Statistik. Status perkotaan didasarkan pada skor tertentu yang dihitung dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, dan tersedianya fasilitas kota seperti sekolah, rumah sakit, jalan aspal, dan listrik. Jumlah penduduk

Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten/kota serta daerah pedesaan dan perkotaan pada tahun 2002 dan 2005 ditampilkan dalam Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
dan Daerah Pedesaan/Perkotaan Tahun 2002 dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	2002 ^{*)}			2005 ^{**)}		
		Pds	Pkt	Pds +Pkt	Pds	Pkt	Pds+Pkt
1	Bogor	1.418.908	2.180.554	3.599.462	1.308.942	2.450.523	3.759.465
2	Sukabumi	1.624.998	501.406	2.126.404	1.712.290	490.169	2.202.459
3	Cianjur	1.505.663	488.064	1.993.727	1.562.065	493.641	2.055.706
4	Bandung	1.452.419	2.883.159	4.335.578	1.372.247	3.237.446	4.609.693
5	Garut	1.489.988	611.546	2.101.534	1.510.044	658.840	2.168.883
6	Tasikmalaya	1.498.388	605.203	2.103.591	1.546.851	606.692	2.153.543
7	Ciamis	1.275.952	363.036	1.638.988	1.290.947	371.266	1.662.213
8	Kuningan	716.812	281.672	998.484	727.574	287.031	1.014.605
9	Cirebon	843.148	1.134.680	1.977.828	830.829	1.210.595	2.041.423
10	Majalengka	747.099	387.103	1.134.202	736.647	412.843	1.149.491
11	Sumedang	666.068	325.399	991.467	652.392	373.114	1.025.507
12	Indramayu	1.191.146	419.599	1.610.745	1.204.059	430.749	1.634.808
13	Subang	1.072.146	280.208	1.352.354	1.114.365	268.752	1.383.117
14	Punwakarta	427.925	296.635	724.560	431.905	327.379	759.284
15	Karawang	1.148.890	689.040	1.837.930	1.176.423	729.410	1.905.833
16	Bekasi	631.244	1.155.465	1.786.709	538.381	1.503.829	2.042.210
17	Kota Bogor	5.530	886.350	891.880	9.321	1.143.073	1.152.394
18	Kota Sukabumi	5.892	255.969	261.861	3.290	274.786	278.076
19	Kota Bandung	-	2.142.914	2.142.914	-	2.145.315	2.145.315
20	Kota Cirebon	-	274.542	274.542	-	276.845	276.845
21	Kota Bekasi	41.252	1.768.054	1.809.306	40.591	2.007.016	2.047.607
22	Kota Depok	16.847	1.203.970	1.220.817	10.882	1.337.103	1.347.985
JAWA BARAT		17.780.314	19.134.569	36.914.883	17.780.045	21.036.416	38.816.461

Sumber : Hasil Susenas 2002, dan proyeksi 2005 (diolah kembali).

Keterangan: Pds=pedesaan, Pkt=perkotaan.

*) Diestimasi berdasarkan persebaran rumah tangga di desa/kota.

**) Diestimasi berdasarkan tren persebaran penduduk desa/kota 2000-2002.

Sebelum membahas data yang ada pada Tabel 2.22 tersebut, ada baiknya diketahui dahulu metode untuk mendapatkan angka-angka itu. Pada publikasi Susenas 2002 yang dipakai pada tulisan ini, tidak diperoleh data jumlah penduduk menurut daerah pedesaan dan perkotaan, yang ada hanya jumlah rumah tangga menurut daerah tempat tinggal. Data tersebut dipakai untuk memperkirakan jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan, dengan cara membuat proporsi rumah tangga menurut klasifikasi tersebut.

Dengan cara ini diharapkan, estimasi tidak terlampaui melenceng. Sebab menurut perhitungan penulis terhadap data hasil SP 2000 kabupaten/kota Jawa Barat, antara jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga berhubungan sangat erat, dengan koefisien korelasi sebesar $r=0,98$ (korelasi Pearson). Berdasarkan proporsi yang dihasilkan dan dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di daerah pedesaan serta perkotaan, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk total dari masing-masing kabupaten/kota, dapat diperoleh angka-angka jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan Jawa Barat tahun 2002 seperti yang tercantum dalam Tabel 2.22.

Penduduk pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Barat tahun 2005 diperoleh melalui cara perhitungan sebagai berikut:

1. Dengan memanfaatkan metode geometrik dihitung laju pertumbuhan penduduk pedesaan dan perkotaan dari masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan mempergunakan data dasar SP 2000 dan penduduk pedesaan dan perkotaan tahun 2002 hasil estimasi seperti yang ada pada Tabel 2.22, sehingga diperoleh angka laju pertumbuhan periode tahun 2000-2002.
2. Berdasarkan angka laju pertumbuhan tersebut, dapat dihitung penduduk pedesaan dan perkotaan tahun 2005 dengan memakai data dasar penduduk pedesaan dan perkotaan hasil estimasi tahun 2002. Adapun asumsi yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk pedesaan dan perkotaan tahun 2002-2005 mengikuti kecenderungan yang terjadi pada tahun 2000-2002.
3. Hasil dari perhitungan pada butir (2) hanya dipakai untuk memperkirakan proporsi penduduk pedesaan dan perkotaan menurut kabupaten/kota. Proporsi yang dihasilkan kemudian dikalikan dengan penduduk total kabupaten/kota tahun 2005 yang sudah diproyeksikan terlebih dahulu, dan akhirnya dapat diperoleh angka jumlah penduduk tahun 2005 Jawa Barat menurut kabupaten/kota serta daerah pedesaan/perkotaan seperti yang disajikan dalam Tabel 2.22.

Pada Tabel 2.22 nampak, bahwa penduduk pedesaan Jawa Barat jumlahnya lebih sedikit dari penduduk perkotaan, baik pada tahun 2002 maupun 2005. Hal ini agak berlainan dengan provinsi lain di Indonesia yang pada umumnya masih memiliki jumlah penduduk pedesaan yang banyak. Di Jawa Barat, kejadian jumlah penduduk pedesaan lebih sedikit dari penduduk perkotaan baru terjadi pada tahun 2000. Kemungkinan karena begitu cepatnya perkembangan pedesaan, sehingga pada tahun 2000 banyak pedesaan yang sudah berubah menjadi perkotaan, sementara jika dilihat dari tingkat fertilitas, umumnya pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.

Walaupun pada tingkat provinsi penduduk pedesaan tahun 2005 lebih sedikit, tetapi jika dilihat menurut kabupaten/kota, masih ada 12 atau 54,55 persen kabupaten yang memiliki jumlah penduduk pedesaan lebih banyak dari perkotaan. Kabupaten Subang memiliki jumlah penduduk pedesaan terbanyak (80,55 persen). Kabupaten lainnya yang memiliki jumlah penduduk pedesaan di atas 75 persen adalah Sukabumi, Ciamis, dan Cianjur. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk pedesaan lebih sedikit dari perkotaan hanya Kabupaten Bogor, Bandung, dan Cirebon. Adapun di kelompok kota, seluruhnya telah memiliki jumlah penduduk pedesaan yang sangat sedikit, bahkan di Kota Bandung dan Cirebon tidak memiliki penduduk pedesaan, sebab semua wilayah yang ada sudah terklasifikasi sebagai daerah perkotaan.

2.3.3.2 Tingkat Urbanisasi

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai tingkat urbanisasi di Jawa Barat, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian urbanisasi, sebab istilah ini sering dikacaukan dengan istilah migrasi desa-kota. Pengertian urbanisasi yang digunakan dalam tulisan ini adalah bertambahnya penduduk kota, baik itu karena adanya perluasan wilayah kota, kelahiran di kota, maupun karena terjadinya migrasi desa-kota. Tingkat urbanisasi merupakan ukuran yang menyatakan proporsi penduduk kota terhadap total penduduk suatu wilayah pada waktu tertentu.

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 2.23 terlihat, bahwa tingkat urbanisasi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Bahkan menurut Setiawan (1998) peningkatan ini telah terjadi sejak tahun 1971. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, juga memperlihatkan kecenderungan yang sama kecuali untuk Kabupaten Subang, Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya.

Kecenderungan yang terjadi di empat kabupaten tersebut, agak berbeda dengan kecenderungan umum. Mungkin hal ini karena pengaruh dari cara penghitungan jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan pada tahun 2002 yang menggunakan pendekatan jumlah rumah tangga dan rata-rata jumlah anggota keluarga. Rata-rata jumlah anggota keluarga yang digunakan adalah untuk tingkat provinsi, sehingga sangat mungkin berbeda jauh dengan di empat kabupaten tadi, sedangkan di kabupaten lain perbedaannya tidak terlalu menyolok.

Kabupaten yang memiliki kenaikan tingkat urbanisasi paling cepat antara tahun 2000-2005, adalah Kabupaten Bekasi yang telah bertambah sebanyak 18,14 persen, Bogor (8,29 persen), Bandung (6,73 persen), dan Sumedang (6,00 persen). Pola yang sama pada tiga kabupaten yang disebut terdahulu sangat mungkin terjadi, yaitu karena berperan sebagai wilayah penyangga pusat-pusat kegiatan kota besar, sehingga terjadi percepatan perubahan daerah pedesaan menjadi perkotaan. Namun khusus untuk Sumedang, diperkirakan penyebabnya sangat berlainan. Perubahan status pedesaan jadi perkotaan lebih banyak terjadi karena pesatnya pertumbuhan fasilitas kota di wilayah Jatinangor yang menjadi pusat pendidikan tinggi berskala nasional, seperti Unpad dan STPDN.

Sementara itu, Kabupaten Ciamis, Kuningan, dan Indramayu, pada periode 2000-2005 menjadi tiga kabupaten yang kenaikan tingkat urbanisasinya paling lambat, masing-masing hanya sebesar 0,13 persen, 0,31 persen, dan 0,50 persen. Lambatnya kenaikan tingkat urbanisasi di kabupaten tersebut, mungkin disebabkan kurang berkembangnya aktivitas ekonomi. Pada kelompok kota, kenaikan tingkat urbanisasinya juga terlihat lambat. Tetapi hal ini sangat mudah dipahami, yaitu karena telah tingginya tingkat urbanisasi di seluruh kelompok kota yang berada pada kisaran 98,05 persen hingga 100,00 persen pada tahun 2005.

Tabel 2.23
Tingkat Urbanisasi di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2000, 2002, dan 2005

No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Urbanisasi (%)		
		2000	2002	2005
1	Bogor	57,40	60,58	65,69
2	Sukabumi	24,49	23,58	22,27
3	Cianjur	24,79	24,48	24,02
4	Bandung	63,89	66,50	70,62
5	Garut	28,27	29,10	30,40
6	Tasikmalaya	29,17	28,77	28,18
7	Ciamis	22,03	22,15	22,34
8	Kuningan	28,16	28,21	28,29
9	Cirebon	56,07	57,37	59,38
10	Majalengka	32,96	34,13	35,96
11	Sumedang	30,55	32,82	36,55
12	Indramayu	25,85	26,05	26,35
13	Subang	21,61	20,72	19,45
14	Purwakarta	39,51	40,94	43,19
15	Karawang	36,97	37,49	38,28
16	Bekasi	58,00	64,67	76,14
17	Kota Bogor	99,48	99,38	99,23
18	Kota Sukabumi	96,56	97,75	99,56
19	Kota Bandung	100,00	100,00	100,00
20	Kota Cirebon	100,00	100,00	100,00
21	Kota Bekasi	97,50	97,72	98,05
22	Kota Depok	98,03	98,62	99,51
JAWA BARAT		50,31	51,83	54,40

Sumber: Hasil SP 2000, Susenas2002, proyeksi 2005 (diolah kembali).

Tingkat urbanisasi yang tinggi pada kelompok kabupaten di tahun 2005, dimiliki oleh Kabupaten Bekasi (76,14 persen), Bandung (70,62 persen), dan Bogor (65,69 persen). Tingginya tingkat urbanisasi di ketiga kabupaten itu disertai pula dengan cepatnya peningkatan tingkat urbanisasi. Keadaan ini berbeda dengan kelompok kota yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, namun kecepatan peningkatannya rendah karena hampir semua wilayahnya sudah berstatus sebagai perkotaan.

Kabupaten lain, pada tahun 2005 umumnya hanya memiliki tingkat urbanisasi di bawah 50,00 persen, bahkan Kabupaten Subang hanya 19,45 persen dan merupakan kabupaten yang paling rendah tingkat urbanisasinya. Di kabupaten ini, menurut Statistik Potensi Desa tahun 2000 hanya memiliki 20 buah desa/kelurahan

yang terklasifikasi sebagai perkotaan, dan 230 desa/kelurahan lainnya masih berstatus sebagai daerah pedesaan.

Laporan Bank Dunia (1994) dalam Keban (1996) menyebutkan, ada hubungan positif antara tingkat urbanisasi di suatu negara dengan tingkat pendapatan per kapita. Korelasi positif tersebut telah didukung dengan data empiris, sehingga memberikan keyakinan bahwa urbanisasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan, artinya untuk mempercepat pembangunan diperlukan peningkatan urbanisasi.

Selanjutnya dikatakan oleh Smith dan Nemeth (1988), bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak terkendali justru bisa menimbulkan terjadinya dampak negatif, baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan, maupun pengaruh makro terhadap negara. Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan, yang sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *overurbanization*, dalam istilah lain sering disebut juga sebagai urbanisasi semu atau *pseudourbanization*. Jika ini terjadi bisa menjadi penyebab yang menghambat pembangunan.

2.4. Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan walaupun tidak secara tegas diatur, namun memiliki hirarki yang secara umum diakui atau dipahami oleh para pengambil keputusan di bidang kependudukan. Pada hirarki paling atas, ada kebijakan atau konsensus kependudukan internasional tingkat dunia, kemudian regional, nasional (negara), dan daerah (kabupaten/kota). Negara-negara Asia seringkali merujuk konsensus kependudukan yang dikeluarkan *United Nation Population Division* dan dalam aksi kebijakannya merujuk pada *International Conference Population and Development* (ICPD) Cairo 1994. Indonesia seringkali merujuk pada kesepakatan yang telah disetujui pada konsensus tersebut, dan kebijakan kependudukan nasional harus menjadi sumber rujukan kebijakan kependudukan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, hirarki pemikiran ini perlu dipertegas baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga, walaupun pemerintah daerah

diberi hak otonom untuk mengurus kebijakan kependudukannya namun pengambil kebijakan di daerah harus menyelaraskan kependudukannya dengan kebijakan kependudukan nasional. Namun bukan berarti bahwa kebijakan kependudukan daerah harus sama dengan kebijakan nasional. Sebab, keunikan, karakteristik dan potensi penduduk di daerah tetap menjadi fokus kebijakan kependudukan di masing-masing daerah, sehingga kebijakan kependudukannya berbeda dengan daerah lain.

Kebijakan kependudukan yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam GBHN 1999-2004. Dalam GBHN 1999-2004 kebijakan yang menyangkut kependudukan memang tidak menjadi kebijakan tersendiri tetapi merupakan bagian integral dari kebijakan di bidang sosial dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan di bidang kependudukan seperti tercantum dalam GBHN bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial adalah; "meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana".

Selain kebijakan transmigrasi (redistribusi penduduk), kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran telah menjadi kebijakan prioritas dalam sejarah kebijakan kependudukan di Indonesia. Pada era orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menganut kebijakan kependudukan yang bersifat pronatalis. Sebab menurut persepsi Soekarno, jumlah penduduk yang besar dan merata di seluruh Indonesia merupakan sumberdaya yang bernilai untuk melawan kapitalis. Pada masa ini kebijakan kependudukan lebih diarahkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Masa orde baru (Presiden Soeharto) kebijakan kependudukannya lebih diprioritaskan pada penekanan angka kelahiran dengan dibentuknya program keluarga berencana dan terbentuknya badan yang mengelola kependudukan yaitu Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dipimpin oleh seorang menteri. Dalam era reformasi, dari segi kelembagaan, kebijakan kependudukan seperti kehilangan arah. Era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, status menteri negara kependudukan yang menjadi dapur kebijakan

kependudukan malah dilikuidasi ke kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kemudian dibentuk Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk (BAKMP). Namun, status lembaga ini kemudian ditiadakan dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan hanya membuka Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan di Departemen Dalam Negeri, dan Dirjen Mobilitas Penduduk di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meski demikian, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga kini masih dipertahankan.

Dihilangkannya kementerian negara yang mengatur kebijakan kependudukan secara nasional mengakibatkan upaya mendaerahkan kebijakan kependudukan dalam era otonomi daerah menjadi pekerjaan yang cukup sulit dilakukan. Selanjutnya, yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah eksistensi kelembagaan yang mengelola kependudukan agar kebijakan dan program-program kependudukan dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, keberadaan lembaga yang menangani kependudukan di masing-masing daerah kabupaten/kota cukup beragam, ada daerah yang memiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Kependudukan, Catatan Sipil dan sebagainya.

Secara konseptual tenaga kerja dan transmigrasi merupakan bagian atau komponen demografi yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan. Namun di Indonesia, kependudukan masuk ke dalam departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Dibentuknya kedua departemen tersebut erat kaitannya dengan politik dari pemerintah saat itu. Kedua lembaga tersebut dibentuk pertamakali pada masa era pemerintahan orde baru. Pada saat itu, isu kependudukan yang penting adalah masalah ketenagakerjaan dan ketimpangan persebaran penduduk antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, sehingga untuk menanganinya pemerintah memandang perlu untuk dibentuk badan yang khusus menangani permasalahan tersebut.

Tujuan kebijakan kependudukan tidak hanya menyangkut aspek kuantitas (jumlah, komposisi dan distribusi) penduduk, tetapi juga aspek kualitas penduduk. Kebijakan tersebut ada yang dilakukan secara langsung (*direct policy*) seperti program keluarga berencana dan transmigrasi, dan ada yang dilakukan secara tidak langsung (*indirect policy*) yaitu melalui pembangunan di sektor-

sektor lain, diantaranya pembangunan bidang pendidikan, dan ekonomi. Walaupun kebijakan kependudukan mencakup dimensi yang luas, namun aspek-aspek lain tersebut sudah ada lembaga yang menanganinya, maka kebijakan kependudukan kemudian lebih terfokus pada dua variabel pokok demografi yaitu fertilitas dan mobilitas.

Ada dua bidang kebijakan kependudukan yang menonjol yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. *Pertama*, kebijakan tentang pengendalian fertilitas (kelahiran). *Kedua*, kebijakan tentang mobilitas penduduk. Pada bagian ini yang akan dikaji hanya pada kebijakan mobilitas penduduk. Kebijakan ini di Indonesia telah berlangsung lama, sejak zaman Hindia Belanda telah dilakukan pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung Selatan, peristiwa ini menjadi awal program transmigrasi di Indonesia. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia meneruskan program pemindahan penduduk melalui program transmigrasi. Program tersebut bertujuan untuk melakukan penyebaran penduduk secara lebih merata ke seluruh daerah Indonesia. Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan mobilitas adalah kebijakan mengenai pengendalian arus migrasi. Kebijakan tersebut lebih menekankan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk menindaklanjuti hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Tahun 1994 di Cairo pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1999. Dalam Inpres tersebut, untuk penataan administrasi kependudukan direkomendasikan untuk dimulai penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian *vita* atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya pelayanan ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah diatur melalui Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Untuk pedoman pelaksanaan telah pula dikeluarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Dalam rangka Pencatatan Sipil telah dikeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pencatatan Sipil. Lahirnya Keppres No 52 Tahun 1977 maupun Keppres No 12 Tahun 1983 didasarkan pada Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu ada peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam pendaftaran penduduk, yaitu Kepmendagri No 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, belum ada kesadaran dari masyarakat untuk segera melaporkan/mendaftarkan, serta belum ada aturan atau hukum yang sifatnya mengikat bagi masyarakat.

Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan pembangunan bidang kependudukan ke dalam Pola Dasar (Propeda), Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Kebijakan pembangunan bidang kependudukan diarahkan pada empat aspek, yaitu sebagai berikut :

1. *Pengendalian kuantitas penduduk.* Untuk mengantisipasi tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat, arah kebijakan yang ditempuh difokuskan pada upaya pengendalian fertilitas, melalui peningkatan usia kawin pertama wanita, meningkatkan pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita. Mengoptimalkan partisipasi dan prevalensi KB.
2. *Peningkatan kualitas penduduk.* Arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk difokuskan kepada penyiapan sumberdaya manusia potensial yang produktif dan kompetitif melalui pendekatan siklus kehidupan secara fisik, mental dan spirit.
3. *Pengarahan mobilitas penduduk.* Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk diarahkan untuk mengendalikan arus dan volume serta sebaran migrasi masuk ke Jawa Barat serta mengantisipasi

dampak yang ditimbulkannya. Berupaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan penyediaan fasilitas sosial dan memperlancar akses penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan melalui peningkatan jaringan sarana transportasi. Memberdayakan penduduk lokal agar mampu bersaing secara kompetitif dan sehat dengan penduduk migran.

4. *Pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)*. Kebijakan ini mengoptimalkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal dan terpercaya di semua tingkatan administrasi pemerintahan.

Kebijakan mengenai pengarahannya mobilitas penduduk di Jawa Barat masih terfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan penyelenggaraan ini diharapkan dapat teridentifikasi penduduk migran dan non migran beserta karakteristik sosial demografinya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah.
3. Kepmendagri No 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Untuk memperlancar penyelenggaraan registrasi penduduk, BKKBN telah mencoba melakukan pemanfaatan institusi kemasyarakatan dalam membantu registrasi penduduk pada Tahun 1994. Namun kegiatan ini tidak berlangsung lama, karena berbagai alasan. Selain itu, pernah juga melakukan sosialisasi dan uji coba di beberapa daerah di Jawa Barat mengenai pelaksanaan Nomor Induk Kependudukan pada Tahun 1994 - 1995, namun kegiatan inipun tidak berlangsung lama. Saat itu, Depdagri mengklaim bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan departemennya, sehingga BKKBN tidak lagi meneruskan pelaksanaan pemberian NIK kepada penduduk.

Di tingkat nasional yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri pernah mencoba merumuskan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2000, namun undang-undang tersebut tidak pernah muncul. Hingga saat ini penyelenggaraan administrasi kependudukan kurang optimal, dari beberapa studi ditemukan beberapa faktor yang diduga mempengaruhinya, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Beberapa aktifitas dari pendaftaran dan pencatatan kejadian vital ditangani oleh instansi yang berbeda dan belum ada koordinasi satu dengan yang lain.
 - b. Antara pusat dan daerah dan antara daerah satu dengan yang lain, organisasi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak ada kesamaan nomenklatur.
 - c. Kalau ada kesamaan nomenklatur khususnya antara daerah satu dengan yang lain tidak berarti bahwa kedua institusi memiliki struktur serta uraian tugas dan fungsi yang sama. Untuk tingkat Provinsi dicermati ada beberapa daerah yang belum memiliki organisasi/lembaga sebagai penyelenggara administrasi kependudukan.
2. Aspek Ketatalaksanaan (Sistem)
 - a. Untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk antar daerah belum ada kesamaan sistem dan tata cara yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Di hampir semua daerah tidak mempunyai basis data yang berisi biodata penduduk. Hal ini menyulitkan untuk pemberian NIK kepada penduduk, disamping itu memberi peluang terjadinya pemalsuan KTP dan akta.
 - b. Beberapa daerah mengembangkan sistem sendiri yang cenderung sulit dirubah sehingga hasil datanya tidak dapat dintegrasikan satu dengan lainnya.

3. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendah komitmen dan kesadaran aparat untuk membangun administrasi kependudukan.
 - b. Banyak tenaga yang potensial yang belum dimanfaatkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan. Misalnya, guru, PLKB .
4. Aspek Perangkat Hukum
 - a. Belum ada landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh penduduk.
 - b. Hampir semua kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang administrasi kependudukan, tetapi landasan yang dipakai sudah tidak relevan lagi dan untuk memperbaikinya belum ada acuan yang tepat.

BAB III

ANALISIS URBANISASI

3.1 KOTA BANDUNG

3.1.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari lokasi, Kota Bandung sangat strategis baik dalam segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Adapun batas wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Cimahi

Secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi terletak di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanahnya relatif datar sedangkan wilayah kota bagian utara berbukit-bukit, menjadikan Kota Bandung memiliki panorama yang indah.

Iklm Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Temperatur rata-rata 23,1°C, curah hujan rata-rata 204,11 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 18 hari per bulannya (keadaan tahun 2003).

Kondisi ini menjadi salah satu daya tarik Kota Bandung. Selain itu, karena letaknya berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta dan ditunjang dengan kemudahan transportasi, membuat banyak penduduk yang mendatangi Kota Bandung. Apalagi saat ini telah dibuka jalan tol Cipularang sehingga waktu tempuh antara Bandung – Jakarta lewat jalur darat menjadi relatif singkat (1,5 jam) dibanding sebelumnya.

Untuk menuju Kota Bandung dapat dilakukan melalui darat, dan udara dari segala arah. Panjang jalan yang ada di Kota Bandung 1.103.710 km yang menurut klarifikasinya dibagi menjadi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Bila dibedakan menurut jenisnya, jalan yang ada di Kota Bandung terdiri dari jenis jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sementara itu, semua kegiatan perhubungan udara baik untuk bongkar muat barang/kargo,pos/paket dan penumpang dilayani oleh Bandara Husein Sastranegara.

Perhubungan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api maupun bus atau kendaraan roda empat lainnya. Frekuensi perjalanan kereta api dari atau ke Kota Bandung – Jakarta cukup tinggi, ini salah satu tanda bahwa semakin mudah sarana dan prasarana transportasi akan semakin tinggi tingkat mobilitas penduduknya.

Sarana atau fasilitas lainnya yang dimiliki Kota Bandung antara lain; fasilitas pendidikan yang dapat dilihat dari banyaknya sekolah negeri maupun swasta yang cenderung terus meningkat selama beberapa tahun, pada tahun 2002/2003 terdapat 1.751 buah dan pada tahun 2003/2004 meningkat menjadi 1.801 buah.

Di Kota Bandung terdapat perusahaan industri besar maupun sedang dengan jumlah cenderung terus bertambah, pada tahun 1998 sebanyak 537 perusahaan industri dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 577 buah perusahaan. Fasilitas lainnya yang terdapat di Kota Bandung, adalah; fasilitas kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut ditunjang dengan kemudahan dalam transportasi, menjadi daya tarik bagi penduduk untuk datang ke Kota Bandung baik yang sifatnya komuter, nglaju maupun permanen.

3.1.2 Kelembagaan Pengelolaan Kependudukan

Kota Bandung menjadi daerah otonom pada tanggal 1 April 1906 yang sampai saat ini telah beberapa kali mengalami perluasan permukaan wilayah. Pada saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1987 wilayah administrasi Kota Bandung diperluas menjadi 16.729.65 Ha.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasaskan desentralisasi, perlu ditata kembali struktur organisasi daerah. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Bandung membentuk dinas-dinas daerah Kota Bandung, salah satunya adalah Dinas Kependudukan. Dinas ini merupakan penggabungan dari Kantor Catatan Sipil dan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada bagian Tata Pemerintahan (sekarang Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah) yang secara operasional telah berjalan sejak Bulan Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 432 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada pemerintah Kota Bandung.

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan
2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kependudukan yang meliputi pencatatan mobilitas, pengendalian dan data kependudukan.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi program, kepegawaian, umum, dan administrasi keuangan dinas.

Dinas Kependudukan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut memiliki kewenangan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung, adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk :
 - a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b. Penerbitan Kartu NIK
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - e. Pengelolaan administrasi perubahan nama
 - f. Pengelolaan administrasi perubahan status kependudukan
 - g. Pengelolaan administrasi perubahan kewarganegaraan
 - h. Penerbitan keterangan kependudukan lainnya

2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil :
 - a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
 - b. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
 - c. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian
 - d. Pencatatan dan penerbitan akta kematian
 - e. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak

3. Penyelenggaraan statistik :
 - a. Pengelolaan administrasi data dan statistik kependudukan
 - b. Pelaporan dan informasi data kependudukan
 - c. Pembangunan *data base* (data dasar) kependudukan

4. Pengendalian migrasi dan urbanisasi :
 - a. Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS)
 - b. Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS)
 - c. Penerbitan Surat Ijin Menetap (SIM)
 - d. Penerbitan Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS)

- e. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK)
 - f. Penerbitan Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)
 - g. Penerbitan Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan
5. Pengendalian kewarganegaraan :
- a. Pendataan penduduk warga negara asing
 - b. Pengawasan orang asing
 - c. Penyuluhan penyelenggaraan kependudukan dan akta-akta catatan sipil
 - d. Penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan yustisi kependudukan

Dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas tersebut di atas, ada kewenangan yang dilimpahkan kepada camat, hal ini didasarkan kepada Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada camat. Pada bidang/aspek kependudukan kewenangan daerah adalah penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk, dengan rincian kewenangan yang dilimpahkan pada bidang ini meliputi :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris
4. Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk kependudukan
5. Pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran
6. Pelayanan penerbitan surat keterangan kematian
7. Pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati
8. Pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan
9. Pelayanan penerbitan surat bukti pendaftaran tamu
10. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
11. Pelayanan penerbitan jaminan bertempat tinggal

12. Pelayanan penerbitan surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswasta
13. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam wilayah Kota Bandung
14. Pelayanan penerbitan surat pengantar pindah antar daerah kota/ kabupaten atau daerah provinsi.

Mengkaji pelimpahan kewenangan tersebut di atas, tampaknya masalah migrasi termasuk urbanisasi di Kota Bandung masih merupakan kewenangan dari dinas untuk menanganinya.

3.1.3 Kebijakan Kependudukan

Visi Dinas Kependudukan, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Kependudukan”, sedangkan misi dari dinas ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan penduduk dan kesadaran hukum masyarakat
4. Membangun sistem dan jaringan informasi kependudukan terpadu
5. Menunjang pendapatan asli daerah.

Agar pencapaian misi tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh dinas, maka ditentukan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan “lebih baik, terjangkau dan tepat waktu”
2. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan

3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur-unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan warga negara asing dengan berbagai permasalahannya
4. Meningkatkan sistem dan jaringan kependudukan yang terpadu
5. Menunjang pendapatan daerah.

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, Dinas Kependudukan telah menetapkan sasaran, sebagai berikut ;

1. Terwujudnya peningkatan jumlah yang memiliki akta-akta catatan sipil, dan identitas kependudukan lainnya, rata-rata satu persen setiap tahunnya
2. Teridentifikasinya warga Kota Bandung secara bertahap
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kependudukan melalui operasi yustisi terhadap penduduk pendatang, pelayanan pendaftaran dan pencatatan serta pengendalian dan pengawasan warga negara asing (WNA)
4. Terbangunnya sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu
5. Terlaksananya intensifikasi dan penggalian potensi PAD

Dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kependudukan Tahun 2004 kebijakan yang telah dirumuskannya adalah kebijakan mengupayakan peningkatan pengelola administrasi kependudukan, dengan program peningkatan tertib administrasi kependudukan, yang dituangkan ke dalam program-program, diantaranya adalah program peningkatan tertib administrasi kependudukan. Kegiatannya antara lain ; (a) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan kependudukan, (b) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi simpatik, (c) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang dan orang asing (WNA), (d) Pengidentifikasian tingkat penyebaran migrasi non permanen.

Hingga saat ini, pengendalian arus migrasi masuk ke Kota Bandung baru dilakukan melalui kegiatan administrasi kependudukan. Dalam hal ini terutama diberlakukan bagi penduduk yang ingin menetap di Kota Bandung dengan tujuan yang belum jelas, misalnya untuk mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan, atau untuk bersekolah tetapi belum ada kepastian diterima di salah satu sekolah yang ada.

Melalui Peraturan Daerah No 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung, dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan di Kota Bandung, terhadap mereka tidak langsung diberikan Kartu Tanda penduduk (KTP) tetapi diberikan Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS) dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung. SIMS tersebut sebagai persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS). KIDS harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak menjadi calon penduduk. Masa berlaku KIDS adalah selama 6 bulan sesuai dengan masa berlaku SIMS. Pemegang KIDS wajib melapor setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu, untuk mengurangi arus migrasi ke Kota Bandung, melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 1996, disebutkan bagi setiap pendatang yang masuk dengan tujuan mencari pekerjaan diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 10.000 uang jaminan ini dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan yang tidak mendapatkan pekerjaan dan berniat untuk kembali ke daerah asal. Namun Perda tersebut diganti dengan Perda Nomor 26 Tahun 1998 tidak ada pengaturan tentang adanya uang jaminan.

Sampai saat ini, belum ada kebijakan pengarahan penduduk yang sifatnya luas, seperti adanya koordinasi dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar Kota Bandung. Bappeda Kota Bandung pada tahun 1997 pernah membuat perencanaan mengenai penanganan wilayah perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, diantaranya dengan memperketat persyaratan penerimaan pegawai yang diberlakukan baik untuk warga Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung dan perusahaan yang ada di kedua daerah tersebut. Namun perencanaan tersebut hingga tahun 1998 tampaknya belum pernah dilaksanakan.

3.1.4 Kebijakan Tata Ruang Daerah

Dalam konteks nasional, Kota Bandung mempunyai peran yang strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama-sama dengan 14 kota lainnya. Selain itu dalam RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan.

Agar penduduk tidak terkonsentrasi di pusat kota maka pemerintah daerah Tingkat II Bandung menempuh upaya-upaya yaitu dengan melakukan pengembangan wilayah pemukiman dan pembangunan pusat-pusat sekunder di 6 wilayah Kota Bandung. Pengembangan wilayah pemukiman di Kota Bandung diarahkan ke sebelah timur. Di wilayah ini terdapat kompleks-kompleks perumahan yang cukup luas yang sebagian besar dihuni oleh para pendatang.

Kebijakan struktur tata ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, wilayah Kota Bandung dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP), yaitu :

1. Wilayah pengembangan Bojonagara dengan pusat wilayah pengembangan adalah Pusat Sekunder Setrasari, mencakup Kecamatan Andir, Sukasari, Cicendo dan Sukajadi.
2. Wilayah pengembangan Cibeunying dengan pusat wilayah pengembangan adalah pusat sekunder Sadang Serang, mencakup Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler dan Sumur Bandung.
3. Wilayah pengembangan Tegalega dengan pusat wilayah pengembangan adalah pusat sekunder Kopo Kencana, mencakup Kecamatan Astanaanyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay dan Bandung Kulon

4. Wilayah pengembangan Karees dengan pusat wilayah pengembangan adalah pusat sekunder ada mencakup Kecamatan Regol, Lengkong, Batununggal, dan Kiaracondong
5. Wilayah pengembangan Ujungberung, mencakup Kecamatan Cicadas, Arcamanik, Ujungberung,
6. Wilayah pengembangan Gedebage, mencakup Kecamatan Bandung Kidul, Margacinta, dan Rancasari.

3.1.5 Kondisi Kependudukan

3.1.5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kota Bandung adalah sebanyak 2.136.260 jiwa dengan laju pertumbuhannya (LPP) 0,37 persen, pada tahun 2001 jumlahnya meningkat menjadi 2.135.260 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.081.920 (50,46 persen) dan perempuan 1.064.400 (49,6 persen) dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,47 persen. Dengan demikian, selama kurun waktu 2000 – 2001 laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung meningkat sebesar 0,10 persen.

Jumlah migrasi seumur hidup yang masuk ke Kota Bandung dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah migran seumur hidup yang masuk ke Kota Bandung adalah sebanyak 688.322 orang.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2000 sebesar 112.754 jiwa per km² meningkat menjadi 12.830 jiwa per km² tahun 2001, dan pada tahun 2002 mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu menjadi 12.805 jiwa per km², kemudian meningkat kembali pada tahun 2003 menjadi 13.320 jiwa per km². Namun demikian tingkat kepadatan antar wilayah di Kota Bandung tidak merata, ada daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatannya lebih tinggi dari wilayah lainnya, seperti di Kecamatan Bojongloa Kaler tingkat kepadatannya 39.401 jiwa per km², sedangkan daerah yang tingkat kepadatannya terendah di Kecamatan Rancasari sebanyak 5.865 jiwa per km². Rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga pada tahun 2001 rata-rata 4 jiwa dan pada tahun 2002 angka rata-rata meningkat menjadi 6 jiwa per rumah.

Tabel 3.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung

Tahun	Jumlah	LPP
2000	2.136.260	0,37
2001	2.146.360	0,47
2002	2.142.194	- 0,19
2003	2.248.758	0,10

Sumber: Suseda, 2004

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2000 sebesar 11.754 jiwa per km² meningkat menjadi 12.830 jiwa per km² Tahun 2001, dan pada tahun 2002 mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu menjadi 12.805 jiwa per km², kemudian meningkat kembali pada tahun 2003 menjadi 13.320 jiwa per km². Bahkan dalam Bulan Juli 2004, sesuai dengan hasil Suseda 2004 menunjukkan angka kepadatan Kota Bandung mencapai 13.693 jiwa per km².

Tabel 3.2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Bandung dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kepadatan Penduduk/ Km ²	Laju kenaikan Tingkat Kepadatan Penduduk
2000	11.754 jiwa/km ²	
2001	12.830 jiwa/km ²	0.092
2002	12.805 jiwa/km ²	(0.002)
2003	13.320 jiwa/km ²	0.040
2004* (Juli)	13.693 jiwa.km ²	0.028

Sumber: Kota Bandung dalam angka (2003) dan hasil Suseda, 2004

Dengan tingkat kepadatan sebagaimana digambarkan di atas, sesungguhnya Kota Bandung sudah termasuk kota yang memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi, baik dilihat dari sisi nasional maupun secara komparatif dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di kawasan Bodebek seperti Kota Bogor dan Kota Bekasi yang di bawah 10.000 jiwa per km².

3.1.5.2 Migrasi Masuk

a. Migrasi Seumur Hidup

Migran seumur hidup berbeda dengan migran risen. Migran seumur hidup adalah mereka yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat lahir mereka, sedangkan migran risen adalah mereka yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Adanya perbedaan batasan tersebut menjadi menarik untuk dikaji, sebab migrasi risen bersangkutan-paut dengan keaktualan mobilitas penduduk, sementara migrasi seumur hidup lebih terkait dengan perpindahan penduduk yang lebih mantap.

Adanya perbedaan tersebut antara lain terlihat dari karakteristik umur migran. Pada migran risen yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berumur 15-29 tahun, tetapi pada migran seumur hidup umur mereka kebanyakan antara 20-34 tahun seperti dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan angka-angka yang nampak dalam Tabel 3.3 ada hal yang patut dicermati ketika migran seumur hidup tersebut dibedakan atas jenis kelaminnya. Ternyata ada kecenderungan umur migran perempuan yang masuk Kota Bandung umurnya lebih muda dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya pada kelompok umur 15-19 tahun migran seumur hidup laki-laki hanya 8,01 persen, tetapi perempuan mencapai 11,03 persen. Mungkin hal ini berkaitan pula dengan tingkat pendidikan mereka.

Tabel 3.3
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Kelompok Umur Kota Bandung Tahun 2000

No.	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	0-4	3,34	3,46	3,40	11,86	11,21	11,53
2	5-9	3,07	3,15	3,11	10,89	10,38	10,63
3	10-14	3,15	3,73	3,44	9,78	12,25	11,01
4	15-19	8,01	11,03	9,52	11,84	11,91	11,88
5	20-24	15,81	17,48	16,65	12,07	12,40	12,23
6	25-29	14,09	13,37	13,73	10,63	10,46	10,54
7	30-34	11,62	10,22	10,92	8,43	11,07	9,75
8	35-39	9,11	8,17	8,64	6,46	6,81	6,64
9	40-44	7,17	6,84	7,00	5,38	5,68	5,53
10	45-49	5,41	5,65	5,53	4,24	4,16	4,20
11	50-54	5,12	4,71	4,91	2,48	2,60	2,54
12	55-59	4,49	3,91	4,20	2,01	2,51	2,26
13	60-64	3,49	3,05	3,27	1,59	1,80	1,70
14	65-69	2,00	2,22	2,11	0,93	1,33	1,13
15	70-74	1,40	1,56	1,48	0,73	0,93	0,83
16	75+	1,13	1,44	1,28	0,67	0,91	0,79

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tabel 3.4 memperlihatkan, migran seumur hidup yang masuk Kota Bandung sebagian besar masih berpendidikan SLTA ke bawah. Jumlah mereka yang berpendidikan SLTA 33,39 persen, disusul oleh yang berpendidikan SD 27,94 persen, dan SLTP 18,27 persen. Namun nampak pula, ada kecenderungan perempuan migran yang masuk ke Kota Bandung pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi perempuan yang berpendidikan SLTA lebih sedikit dari laki-laki, tetapi sebaliknya perempuan yang berpendidikan SD dan SLTP persentasenya lebih banyak dari laki-laki.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Pendidikan yang Ditamatkan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum/Tidak Punya	6,20	7,96	7,08	19,49	19,28	19,39
2	SD / Setara	23,98	31,90	27,94	24,11	29,53	26,82
3	SLTP / Setara	17,36	19,18	18,27	17,65	18,16	17,91
4	SLTA / Setara	36,32	30,46	33,39	30,21	25,8	28,01
5	Diploma I / II	1,24	1,39	1,32	0,97	1,27	1,12
6	Akademi / D III	4,53	3,50	4,02	2,58	2,39	2,49
7	PT/DIV	10,37	5,62	8,00	4,98	3,57	4,28

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Jika ditelaah lebih jauh, dan struktur tingkat pendidikan migran seumur hidup dibandingkan dengan non migran, terlihat ada beberapa perbedaan. Pada tingkat pendidikan tidak punya ijazah SD atau belum tamat SD, ternyata proporsi non migran lebih banyak yaitu 19,39 persen, sedangkan pada kelompok migran hanya 7,08 persen. Pada kualifikasi pendidikan SD kendisinya hampir seimbang, tetapi semakin tinggi pendidikan mulai dari tingkat SLTA hingga Perguruan Tinggi ternyata proporsi migran lebih banyak dari non migran. Keadaan ini menggambarkan kepada kita, kualitas pendidikan migran ternyata lebih baik dari non migran, atau dengan kata lain bisa dikatakan kondisi SDM migran seumur hidup lebih baik dari penduduk non migran.

Kondisi seperti di atas, akan menyebabkan penduduk non migran kalah bersaing di pasar kerja seperti tersirat dari data yang ditampilkan dalam Tabel 3.5 Terlihat dari Tabel tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk migran seumur hidup lebih besar (59,93 persen) dibandingkan dengan penduduk non migran (53,77 persen). Konsep TPAK adalah proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikali 100 persen.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung Tahun 2000

No.	TPAK	Migran	Non Migran	Jumlah
1	Laki-laki	77,31	72,54	74,44
2	Perempuan	41,33	35,68	37,79
3	Laki-laki + Perempuan	59,93	53,77	56,14

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Walaupun dalam pemahaman tentang angkatan kerja di dalamnya mencakup mereka yang telah bekerja dan mereka yang sedang dan masih mencari pekerjaan, tetapi Tabel 3.6 lebih memberikan gambaran bahwa penduduk migran seumur hidup lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2000

No.	TPT	Migran	Non Migran	Jumlah
1	Laki-laki	3,52	10,38	7,55
2	Perempuan	4,81	11,17	8,58
3	Laki-laki + Perempuan	3,95	10,65	7,89

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tingkat pengangguran terbuka penduduk migran seumur hidup yang ada di Kota Bandung angkanya hanya 3,95 persen, sedangkan mereka yang bukan migran angkanya mencapai 10,65 persen. Artinya, dari sejumlah angkatan kerja kalau dibandingkan secara proporsional, lebih banyak penduduk migran yang bekerja dari pada penduduk bukan migran.

Pekerjaan migran seumur hidup di Kota Bandung kebanyakan di sektor jasa (41,20 persen), diikuti dengan sektor perdagangan (22,57 persen). Migran perempuan yang bekerja di sektor jasa proporsinya lebih besar (42,09 persen) dibandingkan dengan laki-laki (40,76 persen), sedangkan mereka yang bekerja di sektor perdagangan umumnya laki-laki (25,25 persen) dan perempuan hanya 17,15 persen. Pola sektor pekerjaan penduduk migran ini hampir sama dengan penduduk bukan migran seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Lapangan Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	2,04	1,91	2,00	3,02	2,61	2,88
2	Industri	13,89	18,86	15,53	15,47	18,64	16,53
3	Perdagangan	25,25	17,15	22,57	18,62	17,07	18,10
4	Jasa	40,76	42,09	41,20	42,51	37,72	40,90
5	Angkutan	3,24	0,31	2,28	3,20	0,42	2,27
6	Lainnya	14,82	19,67	16,42	17,19	23,53	19,32

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Kemudian jika karakteristik struktur pekerjaan penduduk migran seumur hidup Kota Bandung dilihat dari status pekerjaannya, polanya hampir sama dengan penduduk migran risen, maupun penduduk non migran. Tabel 3.8 memperlihatkan, umumnya migran seumur hidup bekerja sebagai buruh yang dibayar, sementara proporsi kedua terbanyak adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	29,23	17,66	25,41	25,80	18,49	23,34
2	Dibantu buruh tdk tetap	2,76	1,56	2,36	3,18	1,84	2,73
3	Dibantu buruh tetap	3,36	2,44	3,06	3,14	2,33	2,87
4	Buruh/Pekerja dibayar	63,21	68,94	65,10	65,83	65,33	65,66
5	Pekerja tidak dibayar	1,44	9,40	4,07	2,05	12,01	5,40

Sumber : Analisis Volume Kecen derungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Jika status pekerjaan ini disederhanakan menjadi sektor formal yaitu mereka yang bestatus sebagai pekerja dibayar dan bekerja sendiri dengan dibantu buruh tetap, serta sektor informal yaitu terdiri atas mereka yang berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, serta bekerja tetapi tidak mendapat bayaran. Maka sebagian besar penduduk migran seumur hidup memiliki pekerjaan di sektor formal.

Berkaitan dengan status perkawinan migran seumur hidup di Kota Bandung Tabel 3.9 menunjukkan 59,70 persen migran berstatus sudah kawin. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi migran risen, pada migran sebagian besar (59,69 persen) terdiri atas mereka yang belum kawin.

Fenomena di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Ketika memasuki Kota Bandung pada umumnya penduduk migran terdiri atas kelompok umur muda yang belum menikah, baik itu mereka yang melanjutkan pendidikan maupun sekolah. Kemudian setelah mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan memutuskan untuk berkeluarga dan tetap tinggal di Kota Bandung. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan proporsi migran risen dan migran seumur hidup berdasarkan struktur kelompok umur dan status perkawinan.

Tabel 3.9
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	34,08	33,05	34,38	46,02	42,14	46,88
2	Kawin	62,37	56,87	59,70	46,03	49,53	47,81
3	Cerai Hidup	0,75	2,55	1,62	1,23	2,53	1,94
4	Cerai Mati	1,24	7,53	4,29	0,98	5,69	3,37

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Dilihat dari pola migrasi masuk yang dominan adalah permanen. Hasil Data Supas 1995 diketahui asal daerah migran yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berasal dari daerah di sekitar Kota Bandung. Apabila dilihat dari klasifikasi desa/kelurahan tempat tinggal asal mereka yang terakhir 42,1 persen migran yang masuk ke Kota Bandung berasal dari daerah perkotaan, 53,4 persen berasal dari daerah pedesaan, dan selebihnya 4,5 persen, desa/kelurahan daerah asalnya tidak teridentifikasi. Daerah asal mereka cukup beragam, 52,6 persen berasal dari kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat, dan selebihnya berasal dari kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data hasil Supas 1995 diketahui bahwa migran yang berasal dari kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, proporsi terbanyak berasal dari Kabupaten Garut (20,9 persen), Kabupaten Bandung (18,4 persen), dan Kabupaten Tasikmalaya (10,4 persen), sedangkan dari luar Provinsi Jawa Barat, terdapat empat provinsi sumber migran terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (33,1 persen), Provinsi Jawa Timur (15,5 persen), Provinsi Lampung (10,5 persen), dan Sumatera Utara (9,9 persen).

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor jarak merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pemilihan daerah tujuan (Kota Bandung). Hal ini mengikuti pola yang sering ditemui : seperti yang dikemukakan oleh Ravenstein bahwa "kebanyakan migran menempuh jarak yang dekat" dan yang dikemukakan oleh

Everett S Lee bahwa "jarak merupakan salah satu faktor perintang seseorang untuk melakukan migrasi" (Lee, 1979).

Gambaran seperti itu dijumpai juga pada data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, dimana migrasi masuk ke Jawa Barat yang berasal dari Pulau Sumatera sebagian besar masuk ke Kota Bekasi yaitu sebanyak 23,95 persen, diikuti Kota Bandung sebanyak 15,84 persen, Kota Depok sebanyak 11,94 persen dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Lebih lanjut data hasil Sensus 2000 menunjukkan, bahwa jumlah migrasi seumur hidup yang masuk ke Kota Bandung sebesar 315.841 jiwa, sedangkan migrasi risennya sebesar 150.274 jiwa. Tingginya volume migrasi, baik migrasi seumur hidup maupun migrasi risen di Kota Bandung, dikarenakan Kota Bandung merupakan salah satu pusat pendidikan dan saat ini sedang berupaya membentuk citra sebagai kota jasa dan kota wisata belanja.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota telah mendorong para migran rela meninggalkan tempat kelahirannya untuk memperoleh status sosial yang lebih baik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Hugo dan kawan-kawan (1981) yang mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengundang para penduduk untuk mendatanginya.

b. Migrasi Lima Tahun yang Lalu (Risen)

Data yang ada di Tabel 3.10 menunjukkan bahwa migran risen didominasi oleh penduduk kelompok umur muda (15 – 35 tahun). Orang banyak memilih migrasi sebagai salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup mereka, baik untuk mencari pekerjaan yang lebih layak maupun untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Umumnya kemampuan dan kemauan penduduk usia muda untuk melakukan hal-hal tersebut lebih besar daripada penduduk usia senja. Kelompok umur 20-24 tahun baik migran laki-laki maupun perempuan angkanya di atas 30 persen. Hal ini terjadi ada kemungkinan di Kota Bandung terdapat sarana pendidikan tinggi sehingga ini menjadi salah satu daya tarik penduduk untuk mendatanginya. Selain itu Kota Bandung kini mulai berkembang menjadi kota jasa yang cukup menjanjikan bagi para pencari kerja.

Tabel 3.10
Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Kota Bandung

No.	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	5-9	5,13	4,90	5,02	9,55	9,25	9,40
2	10-14	4,46	5,43	4,95	8,75	8,67	8,71
3	15-19	16,21	22,20	19,21	11,15	11,68	11,42
4	20-24	31,87	30,73	31,30	12,84	13,64	13,24
5	25-29	15,19	13,14	14,17	12,71	12,33	12,52
6	30-34	9,19	7,43	8,31	10,56	9,97	10,27
7	35-39	5,86	4,75	5,31	8,29	8,24	8,27
8	40-44	3,83	3,42	3,63	7,09	6,94	7,02
9	45-49	2,78	2,53	2,66	5,73	5,32	5,53
10	50-54	1,99	1,71	1,85	3,87	3,76	3,82
11	55-59	1,39	1,20	1,30	3,29	3,21	3,25
12	60-64	0,97	0,87	0,92	2,59	2,56	2,58
13	65-69	0,49	0,70	0,60	1,51	1,87	1,69
14	70-74	0,37	0,49	0,43	1,12	1,31	1,22
15	75+	0,36	0,48	0,42	0,96	1,25	1,11

Sumber: BPS Prop Jabar Hasil SP 2000.

Secara umum tampak bahwa persentase migran laki-laki cenderung lebih tinggi dari pada migran perempuan, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa laki-laki lebih *migratory* dibandingkan perempuan, namun pada kelompok umur tertentu persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mendorong untuk lebih migratori. Hasil data SP 2000 menunjukkan, migran risen yang ada di Kota Bandung umumnya berpendidikan SLTA atau setara, dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan Diploma (D1 atau DII). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa pendidikan migran risen laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

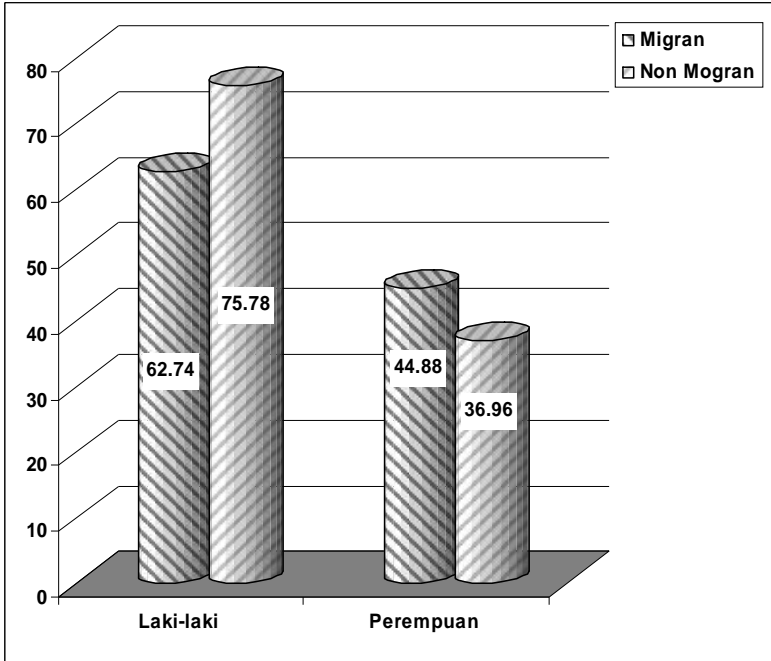
Tabel 3.11
Persentase Migrasi Lima Tahun yang Lalu,
Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kota Bandung

No	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Blm/Tdk Punya	3,38	4,48	3,93	6,58	7,65	7,12
2	SD / Setara	19,75	27,96	23,86	27,22	33,84	30,53
3	SLTP / Setara	17,49	20,04	18,77	19,51	20,32	19,92
4	SLTA / Setara	46,72	38,40	42,56	34,40	29,06	31,73
5	Diploma I / II	1,36	1,55	1,46	1,15	1,43	1,29
6	Akademi / D III	3,68	3,14	3,41	3,58	3,01	3,30
7	PT / D IV	7,63	4,43	6,03	7,55	4,69	6,12

Sumber: BPS Prop Jabar Hasil SP 2000.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) migran risen umur 15 tahun ke atas di Kota Bandung menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan TPAK non migran, sedangkan pada TPAK migran perempuan lebih tinggi daripada non migran. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa migran perempuan di Kota Bandung banyak yang termasuk ke dalam kelompok angkata kerja. Artinya migran perempuan yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar adalah mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan. Pekerjaan yang banyak memanfaatkan tenaga kerja perempuan seperti pabrik tekstil, pusat-pusat perdagangan (mall atau supermarket, serta sektor informal).

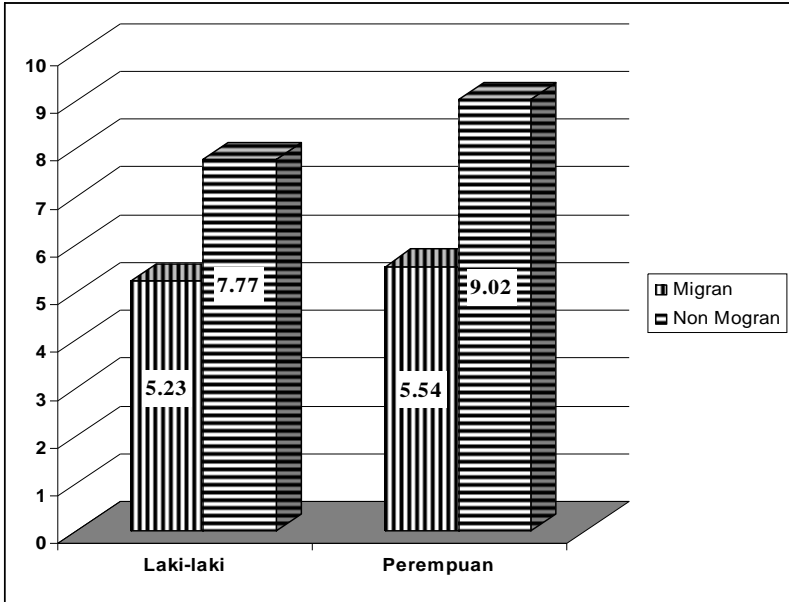
Gambar 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Migran Lima Tahun yang Lalu Di Kota Bandung



Sumber BPS, SP 2000

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara penduduk migran risen dengan non migran di Kota Bandung secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu TPT penduduk non migran lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk migran, baik untuk penduduk migran laki-laki maupun migran perempuan. Seperti hasil temuan dalam kajian-kajian sebelumnya yang mengatakan bahwa penduduk yang melakukan migrasi salah satunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini terbukti dengan data pada Gambar 3.2 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kalangan para migran angkanya lebih rendah daripada non migran.

Gambar 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Kota Bandung



Sumber BPS, SP 2000

Migran risen menurut lapangan pekerjaan, tampak bahwa sektor industri, perdagangan dan jasa didominasi oleh para migran yang ada di Kota Bandung, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase migran yang bekerja di sektor Jasa paling tinggi dibandingkan di sektor-sektor lainnya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pelayan di pusat-pusat pertokoan yang banyak tumbuh di Kota Bandung. Selain itu, sektor perdagangan juga banyak dimasuki oleh para migran, sektor ini merupakan alternatif bagi para migran. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima baik berdagang makanan, pakaian, maupun keperluan rumah tangga lainnya. Sektor ini walaupun membutuhkan modal, namun cukup banyak migran yang berkecimpung didalamnya, salah satu alasannya adanya kebebasan dalam bekerja.

Tabel 3.12
Persentase Migran Lima Tahun yang Lalu
Menurut Lapangan Pekerjaan dan
Jenis Kelamin di Kota Bandung

No.	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	2,04	1,65	1,88	2,65	2,41	2,57
2	Industri	15,53	23,77	18,97	14,71	18,00	15,78
3	Perdagangan	26,76	11,25	20,29	20,96	17,97	19,99
4	Jasa	38,57	46,05	41,69	42,06	38,63	40,95
5	Angkutan	2,88	0,29	1,80	3,25	0,39	2,33
6	Lainnya	14,21	16,98	15,37	16,36	22,61	18,38

Sumber BPS, SP 2000

Di Kota Bandung banyak terdapat industri garment yang memanfaatkan tenaga kerja perempuan, hal ini menjadi daya tarik para migran. Persentase migran yang bekerja di sektor industri cukup tinggi, biasanya pada industri garmen tidak membutuhkan modal, serta tidak memprioritaskan pada pendidikan tinggi dan keterampilan khusus, sehingga menyebabkan sektor ini menjadi primadona bagi migran dengan modal pendidikan dan keuangan yang terbatas.

Selanjutnya, jika migran risen di Kota Bandung dibedakan berdasarkan status pekerjaannya, nampak sebagian besar migran bekerja di sektor formal (74,35 persen) yaitu sebagai pekerja yang dibayar dan bekerja sendiri dengan memakai buruh tetap. Migran yang bekerja di sektor informal (yaitu mereka yang bekerja sendiri, bekerja sendiri dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja tidak dibayar) hanya 25,65 persen, sementara penduduk non migran Kota Bandung yang bekerja di sektor informal mencapai 32,31 persen. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kota Bandung tetapi merupakan kondisi umum migran jika dilihat dari status pekerjaannya.

Kalau dibedakan berdasarkan jenis kelamin Tabel 3.13 juga memperlihatkan perempuan migran risen lebih banyak yang bekerja di sektor formal dengan dominasi pada status pekerjaan sebagai buruh yang dibayar (80,19 persen), sedangkan laki-laki yang bekerja sebagai buruh yang dibayar hanya 65,75 persen. Mungkin hal ini erat kaitannya dengan berkembangnya sektor industri dan jasa di Kota Bandung, dan ada kecenderungan untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu lebih banyak merekrut pekerja perempuan.

Tabel 3.13
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	27,07	10,11	19,99	27,30	19,31	24,71
2	Dibantu buruh tidak tetap	2,46	1,01	1,85	3,05	1,82	2,66
3	Dibantu buruh tetap	2,97	2,01	2,57	3,26	2,43	2,99
4	Buruh/Pekerja dibayar	65,75	80,19	71,78	64,59	64,91	64,70
5	Pekerja tidak dibayar	1,75	6,68	3,81	1,79	11,52	4,94

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Berkaitan dengan status perkawinan migran risen Tabel 3.14 menunjukkan 59,61 persen migran berstatus belum kawin, baik itu migran risen lapi-laki maupun perempuan. Kelihatannya hal ini berkaitan erat dengan umur mereka yang rata-rata masih berusia muda yaitu antara 15-29 tahun dengan persentase sebesar 63,27 persen.

Tabel 3.14
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	62,35	56,86	59,61	43,92	36,94	40,43
2	Kawin	36,42	37,84	37,13	53,85	53,71	53,78
3	Cerai Hidup	0,69	2,43	1,56	1,09	2,62	1,86
4	Cerai Mati	0,54	2,87	1,71	1,13	6,73	3,93

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

3.1.5.3 Penyebab dan Dampak Urbanisasi

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penyebab terjadinya arus migrasi masuk ke Kota Bandung adalah faktor ekonomi, dan sosial. Di samping itu ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan dapat menyebabkan penduduk pedesaan melakukan mobilitas menuju ke wilayah perkotaan sehingga penduduk perkotaan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Migran masuk ke Kota Bandung sebarannya merata, namun untuk migrasi sirkuler atau ulang alik biasanya terkonsentrasi di sekitar pusat-pusat kota dan perbelanjaan, seperti di wilayah kecamatan-kecamatan yang dekat dengan pusat kota dan pusat perdagangan, seperti Kecamatan Ujungberung, Cicadas, Cibeunying Kidul, dan Sumur Bandung karena sebagian besar dari komuter menjadi pedagang atau buruh bangunan di Kota Bandung.

Tingginya tingkat urbanisasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif bagi pemerintah Kota Bandung, diantaranya dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat, dan retribusi. Sedangkan dampak negatif adalah jalan-jalan di Kota Bandung menjadi macet terutama pada jam-jam sibuk maupun pada hari libur, timbul pemukiman kumuh terutama di daerah sekitar industri atau pabrik-pabrik, dan tidak menutup kemungkinan timbul konflik.

Penanganan urbanisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan yaitu dengan melakukan Yustisi Kependudukan, terutama di pusat-pusat kegiatan perdagangan, dengan alasan di daerah tersebut banyak penduduk pendatang. Selain itu, kegiatan Yustisi juga dilaksanakan dengan cara *door to door*, serta di stasiun kereta api maupun terminal bus. Rencana dari pemerintah kota untuk melakukan penertiban rumah-rumah kos atau kontrakan, dengan maksud agar ada redistribusi masuk ke pemkot. Walau demikian kegiatan Yustisi Kependudukan masih perlu terus diefektifkan lagi, sehingga penduduk yang berada di Kota Bandung dapat teridentifikasi baik yang migran musiman maupun komuter.

Berdasarkan peraturan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung, bagi mereka yang berstatus sebagai komuter yang mempunyai pekerjaan atau kegiatan rutin setiap hari di wilayah Kota Bandung diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Kerja (KIK), kartu

tersebut dapat digunakan sebagai legitimasi atau bukti diri dan harus diperbaharui setiap satu tahun sekali dengan biaya Rp. 2000.

Kepemilikan KIK hanya sebagian kecil saja dari seluruh komuter yang ada, terbukti dari data hasil rekapitulasi pelayanan KIK pada Sub Dinas Mobilitas Dinas Kependudukan selama periode Januari – Desember 2004 sebanyak 2.626 dan pada periode Januari-April 2005 turun menjadi 112. Banyaknya pembuatan KIK pada tahun 2004, disebabkan pada tahun tersebut dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai KIK di lingkungan pemerintah kota, sedangkan tahun 2005 tidak ada kegiatan sosialisasi sehingga kepemilikan KIK sedikit sekali. Berdasarkan data tersebut, tampaknya kegiatan sosialisasi KIK masih perlu lebih digiatkan lagi ke seluruh instansi maupun sektor lainnya. Mungkin saja komuter yang belum memiliki KIK karena belum mengetahui bahwa harus memiliki KIK.

Selama ini data tentang jumlah penduduk yang ulang alik atau komuter belum tersedia, dengan adanya KIK sebenarnya dapat membantu tersedianya data tentang jumlah penduduk komuter, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Di samping itu, data tentang jumlah penduduk musiman juga merupakan data yang hingga saat ini relatif sulit diperoleh. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi bila saja penduduk musiman dapat terdata dengan akurat yaitu dengan melihat dari Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Kartu ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Tabel 3.15
Jenis Pelayanan KIPEM dan KIK Tahun 2000 – 2005
di Dinas Kependudukan Kota Bandung

Tahun	KIPEM	KIK	Keterangan
2000	1.691	-	
2001	2.902	-	
2002	1.400	1.014	
2003	2.629	1.514	
2004	3.207	3.632	
2005	1.864	112	s/d April 2005
Jumlah	13.693	6.272	

Sumber : Rekap Keg Potensi Pelayanan. Disduk. 2005

Berdasarkan data hasil rekapitulasi, jumlah penduduk musiman di Kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat, artinya Bandung masih menjadi daerah tujuan utama bagi penduduk. Mencermati data dalam Tabel 3.15, hanya sebagian saja dari seluruh penduduk musiman maupun komuter yang mendaftarkan diri (telah memiliki KIK atau KIPEM), padahal menurut informasi yang didapat dari Dinas Kependudukan, dikatakan bahwa jumlah penduduk Kota Bandung sebagian besar terdiri dari para komuter dan penduduk musiman. Namun data persisnya hingga kini belum tersedia. Hal ini akan menyulitkan bagi pemerintah kota dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

3.2 KOTA BEKASI

3.2.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Bekasi merupakan salah satu dari 25 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Secara geografi Kota Bekasi berada diantara $106^{\circ}55'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ BT dan $6^{\circ}71'6''$ – $6^{\circ}15'6''$ LS. Letak Kota Bekasi sangat strategis yaitu suatu daerah yang berada diantara dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Keadaan Iklim di Kota Bekasi cenderung panas. Hal ini dimungkinkan oleh karena berada pada ketinggian 19 m dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara $28 - 32^{\circ}\text{C}$. Sepanjang tahun 2003 jumlah hujan yang cukup tinggi hanya terjadi pada bulan Februari dan Maret yaitu masing-masing tercatat 4.139 mm dan 2.985 mm. Jumlah curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria pada bulan Februari yaitu sebanyak 573 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari. Sedangkan jumlah curah hujan pada bulan lainnya di musim hujan rata-rata 324 mm. Kelembabannya sekitar 80 persen, dengan curah hujan 1.500 mm per tahun dan jumlah hari hujan 85 hari per tahunnya.

Kota yang menjadi daerah otonom pada tahun 1996 ini, pada tahun 2003 penduduknya berjumlah sebanyak 1.845.005 jiwa yang terdiri dari 930.143 jiwa penduduk laki-laki dan 914.862 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 10 kecamatan 52 kelurahan. Namun demikian sebaran di setiap kecamatan tidak

merata. Kecamatan Bekasi Utara yang luasnya 12,49 km² relatif kecil dibandingkan dengan Kecamatan Bantargebang misalnya, mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 236.303 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Pondok Gede sebesar 232.110 jiwa dan Kecamatan Jatisampurna mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu berjumlah 103.952 jiwa.

Luas wilayah Kota Bekasi sekitar 210,49 km². Kota ini berada di sebelah Barat Ibu Kota Provinsi dengan jarak sekitar 90 km. Kota ini berbatasan dengan DKI Jakarta khususnya Kota Jakarta Timur di sebelah barat yang merupakan bagian dari ibu kota negara dan menjadi salah satu tujuan utama para urbanit atau *mouvers*. Relatif ketatnya peraturan DKI Jakarta dalam mengurangi para urbanit, tidak sedikit dari mereka yang memilih dan atau menetap di Kota Bekasi, sehingga dikategorikan sebagai daerah penyangga.

Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi yang juga merupakan salah satu daerah penyangga bagi DKI Jakarta. Perkembangan penduduk di kabupaten ini rata-rata 3,40 persen per tahun sedikit lebih rendah dari Kota Bekasi yang mencapai 4,20 persen per tahun. Perkembangan penduduk di Kota Bogor yang mencapai 8,90 persen per tahun yang berada di sebelah Selatan Kota Bekasi pertumbuhannya cukup tinggi, oleh karena kota ini juga berbatasan dengan DKI Jakarta yang menjadi tujuan urbanit.

Kota Bekasi sudah terhubung baik dengan ibu kota provinsi maupun dengan ibu kota negara. Aksesibilitas, semakin mudah dengan terbangunnya jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang (Cipularang), sehingga mempercepat jarak tempuh. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa Kota Bekasi relatif tidak memiliki masalah dalam aksesibilitas, sehingga penduduk dengan mudah ke luar masuk.

Selain adanya sarana atau fasilitas pendidikan di Kota Bekasi seperti Universitas "45" (Unisma) juga terdapat industri besar maupun sedang dengan jumlah cenderung terus bertambah, sehingga dikategorikan sebagai kota industri. Fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan, hiburan dan sebagainya. Sarana dan prasarana tersebut khususnya industri merupakan daya tarik (*pull factors*) bagi *mouvers* untuk datang ke Kota Bekasi, baik yang sifatnya permanen maupun yang non permanen.

Tabel 3.16
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Bekasi Tahun 2003

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pondok Gede	117.016	115.094	232.110
2.	Jatisampurna	52.406	51.546	103.952
3.	Jati Asih	90.260	88.778	179.038
4.	Bantar Gebang	80.850	79.521	160.371
5.	Bekasi Timur	103.426	101.724	205.150
6.	Rawa Lumbu	87.049	85.619	172.668
7.	Bekasi Selatan	95.666	94.095	189.761
8.	Bekasi Barat	112.023	110.183	222.206
9.	Medan satria	72.317	71.129	143.446
10.	Bekasi Utara	119.130	117.173	236.303
Jumlah		930.143	914.862	1.845.005

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2003

3.2.2 Kelembagaan Pengelolaan Kependudukan

Secara resmi Kota Administratif Bekasi menjadi Kota Bekasi tahun 1996, berdasarkan Undang-undang No. 9 tanggal 10 Desember 1996. Penataan struktur organisasi Kota Bekasi dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kota Bekasi.

Struktur pemerintahan di setiap kabupaten/kota dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu nama lembaga yang menangani bidang kependudukan misalnya, di setiap kabupaten/kota dapat berbeda-beda. Di Kota Bekasi, lembaga yang mengurus bidang kependudukan disebut Badan Kependudukan yang mencakup administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (KB). Badan Kependudukan yang semula bernama Dinas Kependudukan, dibentuk berdasarkan Perda No.16 tahun 2003. Dengan demikian badan ini diharapkan lebih efisien dalam mengorganisasikan kegiatannya yang terkait dengan aspek kependudukan. Kemudian, agar dalam menjalankan kegiatannya

tidak tumpang tindih, maka disusunlah Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB melalui keputusan Walikota Bekasi Nomor 08 tahun 2004.

Seperti tercantum dalam pasal 3 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 08 tahun 2004, Badan Kependudukan ini mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi. Fungsinya adalah :

1. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan program kerja badan;
2. Perumusan visi dan misi badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. Penetapan rencana strategik dan program kerja badan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan bagian;
5. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
6. Pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan badan;
7. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tugas bawahan;
8. Pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
9. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai badan;
10. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
11. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
12. Pembinaan dan pengendalian tugas UPT di lingkungan badan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tugas badan;
14. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan;

15. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
16. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada walikota melalui Sekretaris Daerah, termasuk LAKIP.

Selain itu Keputusan Walikota Bekasi Nomor 08 tahun 2004 pasal 7 berbunyi bahwa bidang kependudukan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melaksanakan tertib administrasi kependudukan. Fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi badan;
2. Perumusan penjabaran kebijakan teknis badan di bidang kependudukan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas sub bidang di bawahnya;
4. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada sub bidang di bawahnya;
5. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
6. Penyiapan bahan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pendaftaran penduduk;
8. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan terkait;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala badan;
11. Penyiapan bahan laporan kepada badan sesuai bidang tugasnya;
12. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atau setiap saat diperlukan;
13. Penyiapan bahan penyusunan LAKIP badan sesuai bidang tugasnya.

Lebih lanjut Kepala Badan Kependudukan tersebut dibantu oleh sub bidang pencatatan dan penertiban administrasi kependudukan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang menghimpun data penduduk dari registrasi kecamatan dan kelurahan serta mengolah perubahan data penduduk akibat perubahan status kependudukan, kewarganegaraan penduduk, pindah atau datang, perceraian dan perubahan data lainnya dan menerbitkan surat keterangan pindah dan pencabutan status kependudukan (Pasal 8). Fungsi dari sub bidang pencatatan dan penerbitan administrasi kependudukan tersebut adalah :

1. Penyusunan langkah kegiatan sub bidang pencatatan dan pendaftaran penduduk, persebaran dan perpindahan penduduk;
2. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi bidang pencatatan dan pendaftaran penduduk, persebaran dan perpindahan penduduk;
3. Penyusunan bahan petunjuk teknis bidang pencatatan dan pendaftaran penduduk, persebaran dan perpindahan penduduk;
4. Pencatatan atas perubahan mutasi penduduk;
5. Pelaksanaan pengumpulan data penduduk akibat perubahan status penduduk;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
7. Pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
8. Penerbitan Nomor Pokok Penduduk;
9. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keterangan Perpindahan Penduduk Sementara (SKPPS) dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
10. Pengendalian Surat Keterangan Domisili;
11. Pengendalian dan pengawasan administrasi kependudukan di kecamatan dan kelurahan;
12. Pelaksanaan kegiatan perpindahan penduduk;
13. Penyusunan program dan evaluasi kegiatan pelaksanaan persebaran dan perpindahan penduduk;
14. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kegiatan persebaran penduduk antar kelurahan-kota, antar daerah dan antar sektor;

15. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta kegiatan pengarahan perpindahan penduduk;
16. Pemberian pelayanan pengarahan perpindahan penduduk dan pengembangan institusi;
17. Pelaksanaan pemberian fasilitas perjalanan dan administrasi perpindahan penduduk;
18. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
19. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
20. Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP badan sesuai bidang tugasnya.

Kepala badan kependudukan juga dibantu oleh sub bidang informasi dan pelaporan kependudukan. Tugasnya adalah membantu kepala bidang melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kependudukan serta merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Pasal 9). Fungsi dari sub bidang informasi dan pelaporan kependudukan ini adalah :

1. Penyusunan langkah kegiatan sub bidang informasi dan pelaporan kependudukan;
2. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi bidang informasi dan pelaporan penduduk;
3. Penyusunan bahan petunjuk teknis bidang informasi dan pelaporan penduduk;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan register kependudukan;
5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan surat-surat kependudukan;
6. Pelaksanaan pencatatan atas perubahan-perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam masalah administrasi kependudukan;
8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan administrasi kependudukan;

9. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sub bidang informasi dan pelaporan kependudukan;
10. Penyusunan langkah kegiatan pelaksanaan tugas di bidang statistik kependudukan;
11. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi bidang statistik kependudukan;
12. Pembuatan data monografi dan penyediaan informasi penduduk;
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
14. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
15. Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP badan sesuai bidang tugasnya

Kepala badan juga dibantu oleh bidang catatan sipil. Tugas pokoknya adalah membantu kepala badan melaksanakan penjabaran teknis badan di bidang pelayanan dan pengelolaan catatan sipil (Pasal 10). Fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi badan;
2. Perumusan penjabaran kebijakan teknis badan di bidang pelayanan dan pengelolaan catatan sipil;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas sub bidang di bawahnya;
4. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada sub bidang di bawahnya;

3.2.3 Kebijakan Kependudukan

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang menghendaki adanya *good governance* (tata pemerintahan yang baik), maka perangkat daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat (pelayanan prima). Untuk itu Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, memiliki Visi "Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima Menuju Kota Jasa dan Perdagangan Tahun 2008".

Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, menetapkan misi-misi yang diharapkan mewujudkan visi. Yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya aparat kependudukan
2. Meningkatkan pengendalian kependudukan
3. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.

Tujuan:

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur kependudukan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan sistem pelayanan cepat, tepat dan mudah
4. Mewujudkan penyebaran penduduk yang tertib dan seimbang
5. Meningkatkan peserta KB aktif
6. Meningkatkan motivasi instruktur sebagai motivator keluarga sejahtera
7. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat ber KTP

Sasaran:

1. Tersedianya SDM / aparatur yang memiliki keahlian
2. Meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan aparatur
3. Meningkatnya disiplin aparatur
4. Tersedianya peralatan kantor
5. Terpeliharanya gedung kantor
6. Terpeliharanya alat angkutan kendaraan bermotor
7. Tersedianya ruang arsip penyimpanan
8. Tersedianya sistem standar pelayanan minimal
9. Tersedianya penyuluhan pelayanan jemput bola di kelurahan
10. Tersedianya pelayanan pembuatan akte kelahiran bagi masyarakat kurang mampu

11. Tersedianya pelayanan di dinas secara cepat, tepat dan mudah
12. Terwujudnya penyebaran penduduk
13. Terwujudnya pasangan usia subur ber KB
14. Meningkatkan akseptor melalui kegiatan program KB usia subur
15. Meningkatkan kualitas program KB, peningkatan program terealisasi
16. Termotivasinya instruksi Kota Bekasi
17. Tersedianya *server data base* untuk WNI dan WNA
18. Terdatanya warga masyarakat untuk memiliki KTP yang berusia 17 tahun ke atas
19. Terdatanya WNA yang memiliki KIPEM
20. Penegakan hukum untuk WNA /WNI terlaksana
21. Semua masyarakat usia 17 tahun ber KTP.

Kebijakan:

1. Peningkatan SDM aparatur
2. Peningkatan disiplin
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Peningkatan sistem informasi pelayanan
5. Peningkatan penyuluhan di kelurahan
6. Peningkatan pelayanan masyarakat kurang mampu
7. Peningkatan pelayanan pensiunan
8. Penempatan keseimbangan penduduk
9. Peningkatan peserta KB Aktif
10. Mendorong peningkatan motivasi intansi
11. Peningkatan administrasi kependudukan
12. Pelayanan KTP

Program:

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Pemberian *reward* dan sanksi
3. Pengadaan
4. Pemeliharaan
5. Pembangunan
6. Pengembangan sistem
7. Pelayanan jemput bola
8. Akte masyarakat kurang mampu
9. Perijinan
10. Penyebaran penduduk
11. Pendataan pelayanan KB usia subur
12. Sosialisasi
13. Pendataan administrasi WNA
14. Pendataan warga usia 17 tahun ke atas
15. Pendataan KIPEM
16. Operasi Yustisi
17. Penerbitan KTP

Kebijakan Badan Kependudukan, Casip dan KB, yang berkaitan langsung dengan permasalahan kependudukan di Kota Bekasi adalah kegiatan peningkatan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran masyarakat ber-KTP, dan mengendalikan persebaran penduduk. Dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, Pemda Kota Bekasi bersama-sama dengan masyarakat menyelenggarakan FORKASI (Forum Konsultasi Koordinasi dan Komunikasi) Operasi Yustisi. Adapun peserta FORKASI ini adalah para pengurus RW dari kelurahan se Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria. Diharapkan FORKASI ini dapat dijadikan media untuk penyampaian informasi dari pemkot kepada masyarakat dan sebaliknya. Kemudian pihak RW dapat meneruskannya dalam forum temu warga di lingkungannya masing-masing.

Pengendalian persebaran penduduk, dimaksudkan agar terjadi distribusi penduduk ke seluruh Kota Bekasi secara merata. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi penduduk penduduk pada satu tempat (pusat kegiatan). Kebijakan ini tidak dapat dilakukan langsung oleh Badan Kependudukan Casip dan KB, tetapi merupakan program umum Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. Upaya untuk mengendalikan distribusi penduduk yaitu melalui upaya pembangunan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan perencanaan pemukiman yang tersebar dalam Bagian Wilayah Kota (BWK). Untuk menjangkau pusat-pusat kegiatan itu dibentuk pula sarana dan prasarana yang memadai melalui pembuatan, perbaikan, dan pelebaran jalan, dan penyediaan alat-alat transportasi. Diharapkan dengan tersebarnya pusat-pusat kegiatan lokal, yang diikuti dengan pembangunan perumahan yang terencana, persebaran penduduk di Kota Bekasi akan lebih terkendali.

3.2.4 Kebijakan Tata Ruang Daerah

Kota Bekasi merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus pula mengikuti perkembangan dan dinamika Kota Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu kebijakan tataruang Kota Bekasi tidak akan terlepas dari kebijakan pembangunan Kota Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Dalam struktur pengembangan wilayah nasional (RTRWN) Kota Bekasi merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat. Sedangkan dalam struktur pengembangan wilayah Jawa Barat (RTRWP Jabar) Kota Bekasi diarahkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan perkotaan (industri dan permukiman perkotaan), selain itu ditetapkan sebagai kota dengan hirarki IIA di Wilayah Pengembangan (WP) Tengah yang mencakup Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sumedang, dan Subang.

Dalam RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek Tahun 1999, arahan pengembangan Kota Bekasi dalam struktur tata ruang kawasan Jabotabek adalah: (1) sebagai Kota Pengimbang (*counter*

magnet) dalam sistem pusat permukiman untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya ke Jakarta, (2) diarahkan untuk pengembangan jasa, perdagangan, industri dan permukiman seperti tercantum pada Tabel 3.17, dan (3) merupakan bagian dari pengembangan kawasan terbangun/perkotaan dengan pola koridor timur-barat sepanjang jalan tol yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan sepanjang koridor jaringan transportasi yang telah terbentuk.

Kedudukan Kota Bekasi yang strategis dan memiliki akses transportasi yang baik ke berbagai kota lainnya, dan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam skala nasional maupun provinsi dengan fungsi sebagai kota jasa, perdagangan, industri, dan permukiman, maka Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan utama para migran.

Tabel 3.17
Sistem Pusat Permukiman
Kawasan Tertentu Jabotabek, Tahun 2015

No	Hirarki Pusat	Lokasi	Proyeksi Penduduk	Kegiatan Usaha
1.	PKN	DKI Jakarta	12.500.000	Jasa/Perkantoran/Perdagangan/ Industri/ Tranportasi/Permukiman
2.	PKW	Kota Tangerang	2.750.000	Jasa//Perdagangan/Industri/ Permukiman
3.	PKW	Kota Bekasi	2.250.000	Jasa//Perdagangan/Industri/ Permukiman
4.	PKW	Kota Bogor	750.000	Jasa//Perdagangan/Industri/ Permukiman
5.	PKW	Kota Depok	650.000	Jasa//Perdagangan/ Pendidikan/ Permukiman
6.	PKL	Cikarang	421.000	Industri/Permukiman
7.	PKL	Serang	346.000	Permukiman
8.	PKL	Cileungsi	200.000	Industri/Permukiman
9.	PKL	Cibinong	175.000	Jasa/Industri/Permukiman
10.	PKL	Parung	165.000	Jasa/Perdagangan/Permukiman
11.	PKL	Serpong	265.000	Jasa/Permukiman
12.	PKL	Balaraja	450.000	Industri/Permukiman
13.	PKL	Mauk	310.000	Permukiman
14.	PKL	Teluk Naga	150.000	Permukiman
15.	PKL	Leuwi Liang	175.000	Permukiman

Sumber: RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, 1999

Besarnya minat para migran dari luar Bekasi, baik yang berasal dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat dengan berbagai karakteristik sosial budaya dan status ekonomi, untuk bermukim dan melakukan segala aktivitas di Kota Bekasi, menuntut upaya pemerintah daerah untuk melakukan manajemen kependudukan yang diserasikan dengan kebijakan pembangunan lainnya. Sampai sejauh ini pola penanganan yang dilakukan oleh Pemda Kota Bekasi terhadap fenomena migran masih bersifat mengakomodasi dan memfasilitasi keberadaan mereka, dan belum mengarah pada upaya pembatasan migran ---seperti yang sudah dilakukan oleh kota-kota besar lain. Bentuk akomodasi dan memfasilitasi para migran adalah dengan cara mengarahkan perkembangan penduduk lebih menyebar ke seluruh kota, yaitu dengan membuat, memperlebar dan atau memperbaiki jalan-jalan baru, membuat pusat-pusat kegiatan penduduk yang lebih tersebar.

Pada intinya penanganan masalah kependudukan (migran) yang dikaitkan dengan pola pemanfaatan ruang wilayah adalah mengarahkan penduduk agar tidak terkonsentrasi pada satu tempat, karena kepadatan penduduk yang terlalu tinggi bisa menyebabkan *multiplier effect*, sehingga timbul masalah-masalah lain yang lebih besar. Seperti masalah lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya.

Penanganan kebijakan pembangunan Kota Bekasi selain memperhatikan RTRWN dan RTRWP Jabar, juga memperhatikan dampak sosial kependudukan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010, struktur pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi diarahkan pada terbentuknya 4 wilayah pengembangan (WP) atau bagian wilayah kota (BWK), yaitu:

1. BWK Pusat Kota, berpusat di Kelurahan Margahayu dan Margajaya yang selama ini merupakan aglomerasi kegiatan perdagangan, jasa dan pemerintahan. Sedangkan pusat-pusat sub-BWK dikembangkan di Kelurahan Sepangjaya, Jakamulya, Kalibaru, dan Perwira.
2. BWK Pondokgede, berpusat di Desa Jatimakmur dan Jatirahayu, dengan sekala pelayanan mencakup seluruh Kecamatan Pondokgede dan sebagian Kecamatan Jatiasih.
3. BWK Bantargebang, berpusat di Desa Bantargebang pada simpul jalan Siliwangi-Narogong dan jalan ke arah Tambun-Kabupaten Bekasi. Mencakup seluruh Kecamatan Bantargebang.

4. BWK Jatisampurna, berpusat di Kelurahan Jatisampurna, mencakup Kecamatan Jatisampurna dan sebagian Kecamatan Jatiasih.

3.2.5 Kondisi Kependudukan

3.2.5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sebetulnya menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Dari data yang tersedia, pada tahun 1990-an rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bekasi masih di atas 6 persen per tahun. Sedangkan pada awal tahun 2000-an mengalami penurunan yaitu 5,19 persen dan menurun lagi menjadi 4,79 persen pada tahun 2003 (Kota Bekasi Dalam Angka, 2003). Pertumbuhan penduduk tersebut merupakan pertumbuhan alami dan non alami. Pertambahan penduduk non-alamiah ini lebih besar dari pertumbuhan alamiah. Oleh karena itu akibat dari urbanisasi laju pertumbuhan penduduknya cukup besar yaitu hampir dua kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Tingginya tingkat urbanisasi Kota Bekasi ini, merupakan daerah yang paling besar sumbangannya terhadap pertumbuhan penduduk provinsi.

Kepadatan penduduk Kota Bekasi selama periode tahun 2001-2003 dapat dikatakan mengalami perubahan yang cukup berarti. Pada tahun 2003 kepadatan penduduk sekitar 8.765 jiwa per km², meningkat dari 8.596 jiwa per km² pada tahun 2002. Dari 10 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bekasi ini. Kecamatan yang luasnya paling sedikit tetapi tertinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bekasi Timur yaitu mencapai 15.208 jiwa per km², suatu kepadatan yang cukup tinggi hampir dua kali lipat dari kepadatan kota. Tingginya kepadatan penduduk di kecamatan ini dimungkinkan oleh letaknya yang berbatasan dengan ibu kota negara, khususnya Jakarta Timur. Sedangkan kecamatan yang terluas wilayahnya, tetapi terendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bantar Gebang yaitu 3.838 jiwa per km².

Tabel 3.18
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per km²
Kota Bekasi Tahun 2003

No	Kecamatan	Luas wilayah	Jml Penduduk	Kepadatan
1.	Pondok Gede	24,37	232.110	9.524
2.	Jatisampurna	22,48	103.952	4.624
3.	Jati Asih	24,49	179.038	7.310
4.	Bantar Gebang	41,78	160.371	3.838
5.	Bekasi Timur	13,49	205.150	15.208
6.	Rawa Lumbu	15,67	172.668	11.019
7.	Bekasi Selatan	14,96	189.761	12.684
8.	Bekasi Barat	18,89	222.206	11.763
9.	Medan satria	14,71	143.446	9.752
10.	Bekasi Utara	19,65	236.303	12.025
Jumlah		210,49	1.845.005	8.765

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2003

Sebaran penduduk dan tingkat kepadatan rata-rata per km² untuk semua kecamatan atau lokasi relatif tidak merata. Daerah-daerah padat penduduk umumnya terkonsentrasi di wilayah sekitar pusat industri, jasa, perdagangan dan akses yang relatif dekat ke DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kuatnya daya tarik sektor-sektor tersebut dan pengaruh perkembangan DKI Jakarta. Kepadatan penduduk juga dapat disebabkan oleh faktor kemudahan aksesibilitas yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat kepadatan disekitar jalan-jalan utama.

3.2.5.2 Migrasi Masuk

a. Migrasi Seumur Hidup

Berdasarkan analisis volume kecenderungan dan karakteristik migrasi masuk ke Jawa Barat khususnya ke Kota Bekasi (BPS dan

Bappeda, 2002) jumlah migran masuk seumur hidup lebih banyak daripada jumlah non-migran dan berdasarkan kelompok umur cukup beragam. Seperti disajikan pada Tabel 3.19 bila dibandingkan jumlah migran dan non migran penduduk Kota Bekasi hampir dua pertiga dihuni oleh migran seumur hidup yaitu masing-masing 62,1 persen dan 37,9 persen.

Tabel 3.19
Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Kelompok Umur, Kota Bekasi, Tahun 2000

No.	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	0-4	5,17	6,08	5,62	16,07	17,85	16,96
2	5-9	6,47	7,51	6,99	12,90	15,63	14,27
3	10-14	7,00	8,68	7,84	10,56	12,78	11,67
4	15-19	9,18	10,78	9,98	11,00	10,34	10,67
5	20-24	11,92	12,97	12,44	9,66	9,33	9,50
6	25-29	12,71	13,11	12,91	8,41	8,62	8,52
7	30-34	12,14	12,01	12,08	7,16	6,17	6,67
8	35-39	10,49	10,13	10,31	5,61	5,23	5,42
9	40-44	8,99	7,34	8,16	5,15	4,17	4,66
10	45-49	6,57	4,40	5,48	3,74	2,71	3,22
11	50-54	3,68	2,42	3,05	2,76	2,02	2,39
12	55-59	2,33	1,49	1,91	1,84	1,37	1,60
13	60-64	1,43	1,08	1,25	1,55	1,34	1,44
14	65-69	0,72	0,69	0,70	1,03	8,79	4,91
15	70-74	0,50	0,51	0,51	0,91	0,76	0,83
16	75+	0,70	0,80	0,75	1,63	1,42	1,53
	Jumlah	50,17	49,30	62,10	48,40	51,60	37,9

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Pada tabel yang sama, jumlah migran seumur hidup atau seumur hidup (*life time migrant*) di Kota Bekasi ternyata lebih banyak migran laki-laki daripada migran perempuan, yaitu masing-masing 50,7 persen dan 49,3 persen. Seperti halnya hasil

penelitian-penelitian sebelumnya (Mantra, 1981, 1985, Lee, 1987 dan Hugo, 1974) bahwa migran laki-laki lebih banyak dari migran perempuan atau dengan kata lain laki-laki lebih banyak melakukan migrasi dari pada perempuan. Hal ini nampaknya erat terkait dengan alasan migran itu sendiri yaitu kaum laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya mencoba pergi ke kota untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi rumah tangganya.

Berdasarkan kelompok umur baik migran laki-laki maupun perempuan menunjukkan hal yang sama bahwa migran seumur hidup lebih banyak dilakukan oleh mereka yang berada pada kelompok umur 20 – 24 sampai dengan 35 – 39 tahun, yaitu berkisar 10 persen sampai dengan 12,91 persen terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun baik migran laki-laki maupun migran perempuan. Pada kelompok tersebut, migran laki-laki sebanyak 12,71 dan migran perempuan 13,11, persen. Migran pada kelompok umur tersebut lebih banyak dibandingkan migran kelompok umur 30 – 34 dan 35 – 39 tahun yaitu masing-masing sekitar 12,08 dan 10,31 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan migran seumur hidup (*life time migrant*), relatif lebih baik dibandingkan dengan non-migran. Seperti disajikan pada Tabel 3.20 tingkat pendidikan migran dan non-migran, migran yang menamatkan jenjang SLTA/setara misalnya, lebih baik dari non-migran dan begitu pula berdasarkan jenis kelamin.

Pada tabel yang sama tingkat pendidikan migran seumur hidup ini, tingkat pendidikan migran laki-laki lebih baik dari tingkat pendidikan migran perempuan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada SLTA/ Setara misalnya, migran laki-laki sebanyak 40,55 persen lebih banyak dari migran perempuan yang mencapai 33,79 persen. Begitupula tingkat pendidikan yang ditamatkan migran pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, migran yang menamatkan perguruan tinggi tingkat pendidikan migran laki-laki lebih baik dari tingkat pendidikan migran perempuan yaitu masing-masing 8,48 dan 4,69 persen. Tingkat pendidikan migran perempuan masih cukup rendah yaitu sekitar 37,63 persen berpendidikan SD ke bawah dan yang menamatkan sampai pada tingkat pendidikan SLTP/Setara sebesar 18,08 persen

Tabel 3.20
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Bekasi 2000

No	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum / Tidak Punya	13,60	16,53	15,07	32,37	39,71	36,04
2	SD / Setara	15,34	21,10	18,22	25,82	28,68	27,25
3	SLTP / Setara	15,55	18,08	16,82	16,09	14,26	15,18
4	SLTA / Setara	40,55	33,79	37,17	21,02	14,42	17,72
5	Diploma I / II	1,28	1,34	1,31	0,69	0,60	0,65
6	Akademi / D III	5,20	4,48	4,84	1,57	1,19	1,38
7	Perguruan Tinggi / D IV	8,48	4,69	6,59	2,45	1,14	1,80

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Pada Tabel 3.21 menunjukkan bahwa status migrasi masuk seumur hidup berdasarkan status perkawinan antara migran dan non-migran menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik migran maupun non-migran lebih banyak yang sudah kawin yaitu masing-masing 62,1 dan 51,5 persen. Pada tabel yang sama, migran yang berstatus kawin berdasarkan jenis kelamin lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang berstatus kawin yaitu masing-masing 64,9 dan 59,1 persen. Sebaliknya dengan migran yang berstatus kawin. Migran laki-laki yang belum kawin lebih sedikit dibandingkan dengan migran perempuan yang berstatus belum kawin, yaitu masing-masing 34,8 dan 37,7 persen.

Lebih lanjut, persentase migran berdasarkan marital status, selain terdapat yang berstatus kawin dan belum kawin juga terdapat yang berstatus cerai hidup dan atau cerai mati. Migran yang berstatus janda, yang berstatus janda cerai mati lebih banyak dari cerai hidup yaitu 2,28 persen berbanding 0,52 persen. Ini artinya bahwa migran yang berstatus janda karena ditinggal mati, menunjukkan bahwa kematian laki-laki atau suami lebih banyak daripada istri atau kaum perempuan. Hal ini nampaknya terjadi karena tantangan kehidupan di kota bagi suami atau sebagai kepala rumah tangga lebih berat jika dibandingkan dengan di

daerah pedesaan, sehingga mudah stress dalam menghadapi tantangan kota dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Tabel 3.21
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Seumur Hidup dan Status Perkawinan, Kota Bekasi 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	34,08	37,73	35,86	46,02	44,75	45,39
2	Kawin	64,87	59,12	62,07	52,31	50,70	51,50
3	Cerai Hidup	0,53	0,87	0,70	0,87	1,12	0,99
4	Cerai Mati	0,52	2,28	1,38	0,81	3,43	2,12

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Terbukanya lapangan pekerjaan di suatu daerah akan menjadikan daerah tujuan banyak didatangi oleh migran baik yang permanen maupun yang sirkuler. Bagi yang permanen tentunya kedatangannya berharap dapat bekerja dan bagi yang sirkulasi bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Peluang kerja dan peluang usaha ini dijumpai di Kota Bekasi sebagai kota industri.

Lapangan pekerjaan yang terdapat di Kota Bekasi meliputi 6 lapangan pekerjaan yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, angkutan dan lainnya. Dari lapangan pekerjaan tersebut yang diminati oleh migran maupun non migran adalah bidang jasa yaitu 39,55 dan 29,30 persen. Begitu pula lapangan pekerjaan yang diminati oleh migran laki-laki dan migran perempuan menunjukkan hal yang sama bagi keduanya bahwa lapangan pekerjaan yang diminati adalah di bidang jasa, masing-masing 40,65 dan 37,40 persen. Kemudian bidang industri menempati urutan kedua baik oleh migran laki-laki maupun perempuan masing-masing 21,36 dan 17,48 persen (Tabel 3.22). Lapangan pekerjaan yang paling kurang diminati oleh migran dan non-migran adalah sektor pertanian. Hal ini kiranya dapat dipahami oleh karena Kota Bekasi merupakan kota

industri dan lahan pertanian relatif sempit dan terkesan semakin berkurang karena desakan industri dan kebutuhan akan permukiman. Kesamaan lapangan kerja yang diminati oleh migran maupun non-migran tersebut menunjukkan kemampuan dan atau keahlian yang sama dan ini sebetulnya meningkatkan persaingan diantara keduanya.

Tabel 3.22
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Lapangan Pekerjaan, Kota Bekasi Tahun 2000

No	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	1,56	1,02	1,38	6,46	2,00	4,97
2	Industri	21,36	17,48	20,05	18,07	17,82	17,99
3	Perdagangan	16,00	11,10	14,34	18,60	12,36	16,51
4	Jasa	40,65	37,40	39,55	32,76	22,39	29,30
5	Angkutan	3,64	0,42	2,55	5,02	0,55	3,52
6	Lainnya	16,79	32,58	22,13	19,09	44,99	27,70

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tabel 3.23 menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut migrasi masuk seumur hidup dan status pekerjaan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa bidang pekerjaan yang menonjol yang dilakukan migran dan non-migran adalah bekerja sebagai buruh/pekerja dibayar yaitu masing-masing 67,67 dan 49,58 persen. Bidang pekerjaan berikutnya yang dilakukan oleh migran dan non-migran adalah berusaha sendiri, sekalipun dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh non migran masing-masing 20,28 dan 30,89 persen. Ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi juga sebagai lahan di sektor perdagangan.

Tabel 3.23
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Pekerjaan Kota Bekasi Tahun 2000

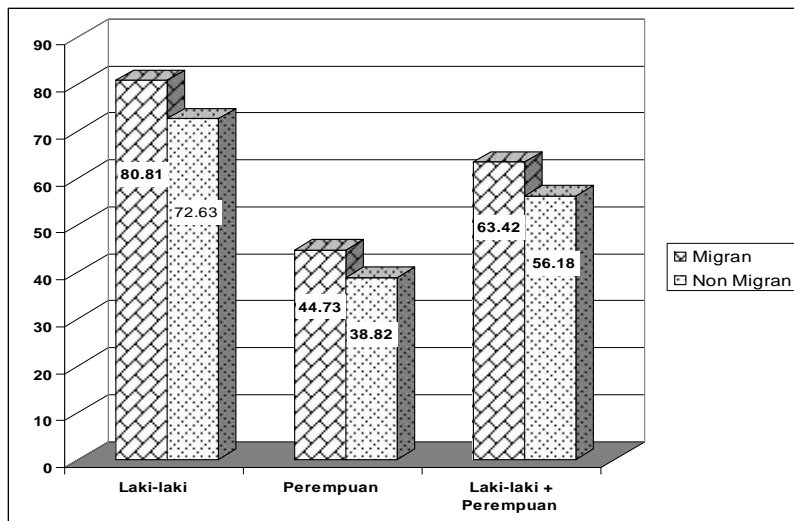
No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	22,64	15,66	20,28	34,95	19,66	30,89
2	Dibantu buruh tdk tetap	1,51	0,84	1,29	2,15	1,22	2,06
3	Dibantu buruh tetap	1,43	1,05	1,30	0,97	0,84	1,12
4	Buruh/Pekerja dibayar	71,04	61,09	67,67	53,53	41,7	49,58
5	Pekerja tidak dibayar	3,38	21,36	9,46	6,22	36,57	16,35

Sumber : Analisis Volume Kecen derungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Pada tabel yang sama, status pekerjaan berdasarkan jenis kelamin migran, keduanya menunjukkan hal yang sama yaitu sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh/pekerja dibayar, masing-masing 71,04 dan 61,09 persen, yang lebih banyak dilakukan oleh migran laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa para migran, baik migran laki-laki maupun perempuan tidak dapat masuk ke sektor industri atau perdagangan. Hal ini dimungkinkan terkait tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan serta keahlian yang dimiliki juga rendah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Bekasi TPAK laki-laki sebesar 78,3 persen, lebih besar dari TPAK perempuan. Begitu pula bila dibandingkan migran dan non-migran. TPAK migran sebesar 63,4 dan 56,2 persen. TPAK migran dan non-migran berdasarkan jenis kelamin, migran laki-laki 80,8 persen lebih besar dari TPAK laki-laki non migran yang jumlahnya sebesar 72,6 persen. Begitu pula perempuannya menunjukkan hal yang sama yaitu masing-masing 44,7 dan 38,8 persen. Ini artinya berdasarkan status migrasi dan jenis kelamin, migran laki-laki yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan lebih besar (Gambar 3.3).

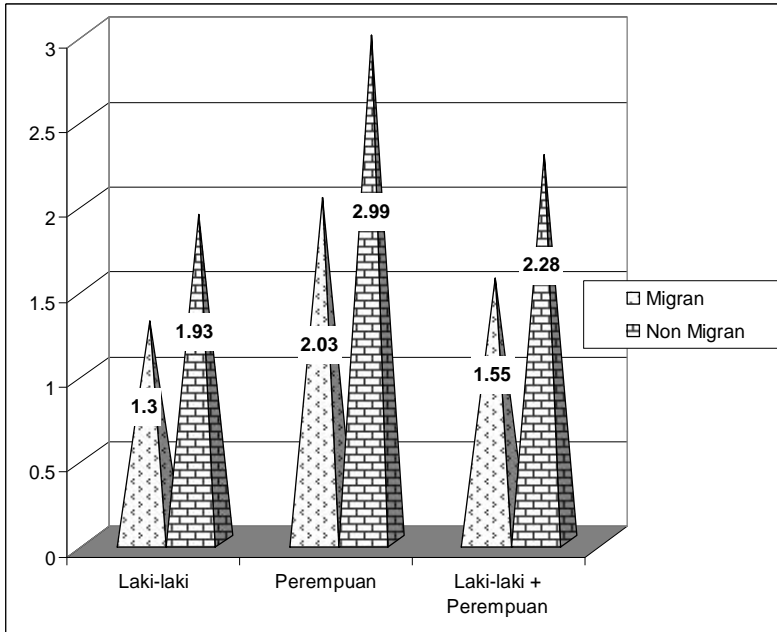
Gambar 3.3
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Bekasi Tahun 2000



Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Berbeda dengan TPAK, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menonjol adalah perempuan, baik migran maupun non-migran dan juga berdasarkan jenis kelamin. Gambar 3.4. Menunjukkan bahwa TPT migran sebesar 1,55 lebih kecil dari TPT Non-migran yaitu 2,28 persen. Begitupula TPT migran berdasarkan jenis kelamin, TPT migran laki-laki lebih kecil dari TPT migran perempuan yaitu masing-masing 1,30 dan 1,93 persen. Ini artinya bahwa pengangguran terbuka pada laki-laki baik berdasarkan status migrasi maupun berdasarkan jenis kelamin lebih kecil daripada perempuan atau tingkat pengangguran perempuan lebih besar daripada tingkat pengangguran laki-laki. Hal ini dimungkinkan bahwa laki-laki lebih banyak yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan terkait dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menghidupi ekonomi rumah tangganya.

Gambar 3.4
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Bekasi Tahun 2000



Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

b. Migrasi Lima Tahun yang Lalu (Risen)

Sebelum Supas 1995, Kota Bekasi belum terbentuk. Kota Bekasi berdiri pada tahun 1996 an, oleh karena itu data kependudukannya belum ada. Sebagai gambaran data yang digunakan masih menggunakan data Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data SUPAS 1995 misalnya, migran risen yang masuk ke Kabupaten Bekasi, yang berasal dari DKI Jakarta cukup menonjol yaitu mencapai 35,3 persen dan dari provinsi lainnya sebesar 64,7 persen. Migran yang berasal dari DKI Jakarta ini yang

paling menonjol berasal dari Jakarta Timur yaitu sebesar 14,7 persen dan yang paling rendah berasal dari Jakarta Barat sebesar 1,6 persen (Tabel 3.24). Hal ini dimungkinkan oleh karena Kabupaten/Kota Bekasi dan Jakarta Timur letaknya berbatasan, sehingga dimungkinkan mereka itu menetap di Kabupaten/Kota Bekasi dengan lapangan usahanya di Jakarta Timur. Asumsi yang kedua, Kabupaten/Kota Bekasi menjadi daerah industri sehingga lapangan kerja relatif terbuka. Rendahnya migran dari Jakarta Barat dimungkinkan terkait dengan jarak karena daerahnya relatif jauh.

Tabel 3.24
Persentase Migran Masuk Lima Tahun yang Lalu,
ke Kota Bekasi Tahun 2000

No.	Daerah asal	Jumlah (%)
1.	Jakarta Selatan	4,5
2.	Jakarta Timur	14,7
3.	Jakarta Pusat	11,2
4.	Jakarta Barat	1,6
5.	Jakarta Utara	3,4
6.	Jakarta	35,3
7.	Provinsi Lain	64,7
Jumlah		100,0

Sumber : Supas, BPS 1995.

Lebih lanjut, jumlah penduduk berdasarkan status migrasi risen (lima tahun yang lalu) dengan karakteristik yang sama dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam mengkaji migrasi atau urbanisasi di Kota Bekasi.

Pada Tabel 3.25 menunjukkan bahwa berdasarkan status migrasi lima tahun yang lalu, jumlah migran sebanyak 22,4 persen (322.423 jiwa) lebih sedikit dibandingkan dengan non-migran yaitu 77,60 persen (1.116.262 jiwa). Namun demikian berdasarkan jenis kelamin, baik migran maupun non migran jumlah penduduk laki-laki lebih besar yaitu masing-masing 52,10 dan 52,40 persen.

Tabel 3.25
Persentase Penduduk Menurut
Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu dan Kelompok Umur
Kota Bekasi Tahun 2000

No	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	5-9	8,11	8,99	8,55	10,19	12,77	11,48
2	10-14	6,73	8,52	7,62	9,85	12,34	11,10
3	15-19	9,56	13,10	11,33	11,21	11,52	11,37
4	20-24	15,37	17,02	16,20	11,30	11,77	11,54
5	25-29	16,13	16,44	16,28	11,15	11,33	11,24
6	30-34	14,62	12,70	13,66	10,41	10,39	10,40
7	35-39	10,50	8,21	9,36	9,31	9,49	9,40
8	40-44	6,80	5,10	5,95	8,78	7,32	8,05
9	45-49	4,42	3,20	3,81	6,57	4,46	5,52
10	50-54	2,59	2,11	2,35	3,97	2,65	3,31
11	55-59	1,85	1,39	1,62	2,51	1,67	2,09
12	60-64	1,32	1,04	1,18	1,71	1,40	1,55
13	65-69	0,67	0,73	0,70	0,99	0,89	0,94
14	70-74	0,50	0,53	0,51	0,77	0,72	0,75
15	75+	0,78	0,89	0,84	1,25	1,24	1,25
Jumlah		52,10	47,90	22,40	52,40	47,60	77,60

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Seperti halnya pada migrasi seumur hidup, pelaku migrasi lima tahun yang lalu berdasarkan kelompok umur berada pada kelompok umur yang sama yaitu pada kelompok umur 20-24 tahun sampai dengan 35-39 tahun. Migran lima tahun yang lalu terkonsentrasi pada kelompok umur tersebut adalah pada kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun yaitu sebanyak 16,2 persen. Ini artinya bahwa migrasi masuk lima tahun yang lalu menunjukkan pola yang sama dengan migrasi seumur hidup (Tabel 3.19).

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh migran lima tahun yang lalu yang bermur 10 tahun ke atas relatif sama dengan tingkat pendidikan migran seumur hidup. Sebagai contoh migran lima tahun yang lalu yang menamatkan SLTA sebanyak 37,19 persen dan migran seumur hidup dalam jenjang yang sama sebanyak 37,17 persen. Namun pada jenjang pendidikan strata 1 (S1) tingkat pendidikan migran lima tahun yang lalu sebanyak 7,3 persen sedikit lebih baik dari migran seumur hidup yaitu sebanyak

6,6 persen. Hal ini dimungkinkan terkait dengan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan sebelumnya bahwa migran lima tahun yang lalu berbekal pendidikan pada jenjang yang lebih baik sesuai dengan lapangan kerja yang ada di tempat tujuan. Selain itu dimungkinkan juga bahwa migran yang berada di Kota Bekasi adalah karyawan DKI yang menetap di Kota Bekasi yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu sebelum datang ketempat tujuan.

Tabel 3.26
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Bekasi Tahun 2000

No.	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum / Tidak Punya	8,02	10,27	9,15	12,34	15,92	14,13
2	SD / Setara	18,30	25,66	21,98	21,72	27,45	24,59
3	SLTP / Setara	16,64	19,37	18,01	17,66	18,86	18,26
4	SLTA / Setara	41,02	33,36	37,19	36,55	29,65	33,10
5	Diploma I / II	1,46	1,46	1,46	1,11	1,15	1,13
6	Akademi / D III	5,28	4,68	4,98	4,13	3,47	3,80
7	Perguruan Tinggi / D IV	9,29	5,20	7,25	6,48	3,49	4,99

Sumber : Analisis Volume Kecederaan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Marital status migran lima tahun yang lalu lebih banyak yang berstatus sudah kawin yaitu sebanyak 61,71 persen. Sedangkan yang belum kawin sebanyak 36,18 persen. Bila dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, migran laki-laki lebih banyak yang sudah kawin yaitu 66,05 persen dan perempuan 57,36 persen. Sebaliknya yang belum kawin, migran perempuan lebih banyak yaitu 39,43 persen dari migran laki-laki yaitu sebanyak 32,93 persen (Tabel 3.27). Data tersebut menunjukkan konsistensi antara penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan marital status ini.

Tabel 3.27
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Status Perkawinan Kota Bekasi Tahun 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	32,93	39,43	36,18	39,34	40,22	39,78
2	Kawin	66,05	57,36	61,71	59,34	56,05	57,70
3	Cerai Hidup	0,51	1,07	0,79	0,67	0,92	0,80
4	Cerai Mati	0,49	2,14	1,32	0,65	2,81	1,73

Sumber : Analisis Volume Kecederungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Bila dibandingkan dengan migran seumur hidup (Tabel 3.21), marital status migran lima tahun yang lalu yang berstatus kawin lebih banyak migran seumur hidup. Ini artinya bahwa migran lima tahun yang lalu yang datang ke daerah tujuan dalam status bujangan/perawan atau belum kawin. Migran yang berstatus belum kawin ini dimungkinkan menikah di tempat tujuannya dan mempunyai keturunan, sehingga akan menambah jumlah penduduk di Kota Bekasi baik yang memilih Kota Bekasi sebagai daerah usaha atau menjadi daerah tempat tinggal.

Seperti halnya migran seumur hidup. Lapangan pekerjaan migran lima tahun yang lalu lebih banyak yang bekerja di sektor jasa dan industri yaitu masing-masing sebanyak 36,61 dan 22,55 persen (Tabel 3.28). Namun bila dibandingkan khususnya lapangan pekerjaan di bidang industri lebih banyak dilakukan oleh migran lima tahun yang lalu daripada migran seumur hidup yaitu 20,05 persen (Tabel 3.22). Ini artinya bahwa dengan tingkat pendidikan yang dibawanya relatif baik dan mencari pekerjaan di Kota Bekasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Tidak seperti halnya jenjang pendidikan yang dimiliki oleh migran seumur hidup yang relatif lebih rendah dan tidak sesuai dengan lapangan usaha yang tersedia atau yang muncul kemudian. Dengan demikian lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Bekasi lebih banyak diserap oleh migran lima tahun yang lalu.

Tabel 3.28
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Lapangan Pekerjaan, Kota Bekasi Tahun 2000

No	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	2,39	1,65	2,12	3,11	1,15	2,46
2	Industri	24,28	19,43	22,55	19,16	16,87	18,40
3	Perdagangan	17,30	10,15	14,93	16,43	11,93	14,95
4	Jasa	36,22	37,32	36,61	39,20	31,75	36,74
5	Angkutan	3,96	0,45	2,70	4,05	0,45	2,66
6	Lainnya	15,58	31,00	21,08	18,06	37,84	24,58

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Status pekerjaan migran lima tahun yang lalu yang menonjol adalah bekerja sebagai buruh /pekerja dibayar dan berusaha sendiri yaitu masing-masing 67,22 dan 20,17 persen (Tabel 3.29). Jika dibandingkan dengan migran seumur hidup (Tabel 3.23), bidang pekerjaan bagi kedua kriteria migran tersebut dapat dikatakan menunjukkan hal yang sama.

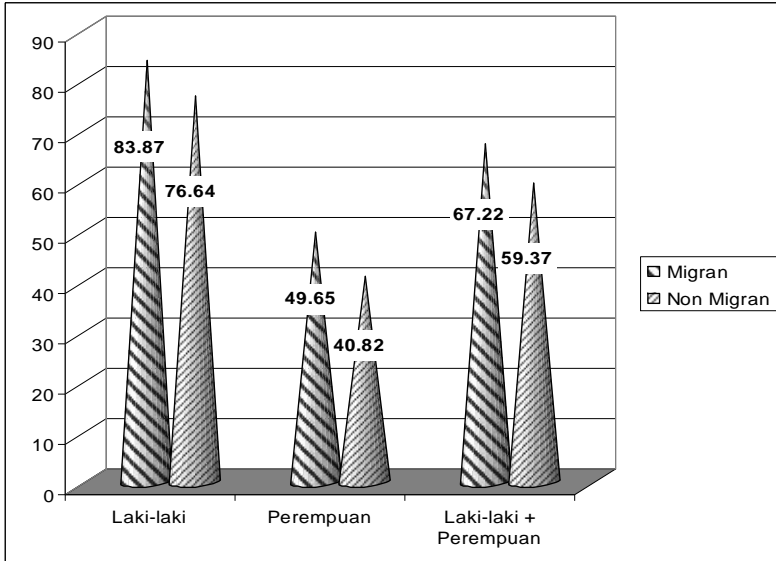
Tabel 3.29
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Status Pekerjaan Kota Bekasi Tahun 2000

No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	23,57	14,05	20,17	27,49	17,78	24,29
2	Dibantu buruh tidak tetap	1,92	1,00	1,59	1,74	0,92	1,47
3	Dibantu buruh tetap	1,72	1,11	1,50	1,27	0,95	1,16
4	Buruh/Pekerja dibayar	69,35	63,38	67,22	65,09	52,89	61,06
5	Pekerja tidak dibayar	3,44	20,46	9,53	4,41	27,45	12,02

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) migran lima tahun yang lalu lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Pada Gambar 3.5 terlihat bahwa TPAK laki-laki 83,87 persen dan TPAK perempuan 49,65 persen. TPAK berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan hal yang sama dengan TPAK migran seumur hidup. Namun demikian TPAK migran lima tahun yang lalu laki-laki dan perempuan lebih baik dari TPAK migran seumur hidup, yaitu 67,22 dan 63,42 persen. Begitu pula berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki saja maupun perempuannya saja menunjukkan hal yang sama yaitu TPAK laki-laki migran seumur hidup sebanyak 80,81 persen lebih kecil dari migran lima tahun yang lalu yaitu sebanyak 83,87 persen dan TPPAK perempuan 44,73 persen lebih kecil dari TPAK perempuan migran lima tahun yang lalu.

Gambar 3.5
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Bekasi Tahun 2000



Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Pada tingkat pengangguran terbuka (TPT), migran sedikit lebih banyak yang menganggur dibandingkan dengan non migran. Perbedaan ini sekalipun tidak signifikan yaitu masing-masing 1,90 persen dan 1,70 persen (Tabel 3.30) tetapi aktif mencari pekerjaan. Pada tabel yang sama berdasarkan jenis kelamin TPT perempuan migran lima tahun yang lalu lebih besar dari TPT laki-laki yaitu masing-masing 2,49 dan 1,57 persen. TPT migran lima tahun yang lalu ini jika dibandingkan dengan TPT migran seumur hidup masih lebih baik TPT migran seumur hidup. Artinya sekalipun perbedaannya tidak signifikan TPT migran lima tahun yang lalu baik laki-laki maupun perempuannya terkesan lebih banyak yang menganggur. Hal ini dimungkinkan terkait dengan status migran lima tahun yang lalu yaitu sedang menunggu panggilan kerja dan aktif mencari pekerjaan.

Tabel 3.30
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kota Bekasi
Tahun 2000

No.	TPT	Migran	Non Migran	Jumlah
1	Laki-laki	1,57	1,45	1,48
2	Perempuan	2,49	2,22	2,30
3	Laki-laki + Perempuan	1,90	1,70	1,76

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

3.2.5.3 Penyebab dan Dampak Urbanisasi

Secara umum pengertian urbanisasi (Goede, 1974) merujuk pada : (1) Arus pindahan ke kota, (2) Bertambah besar jumlah tenaga kerja non agraria di sektor industri dan sektor tersier, (3) Tumbuhnya pemukiman menjadi kota, (4) Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi. Mengacu kepada konsep tersebut mengingatkan kita terhadap perubahan yang terjadi di perkotaan

Masalah urbanisasi timbul erat terkait dengan adanya modernisasi, pembangunan, perkembangan suatu bangsa, sehingga merupakan gejala yang tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan, akan tetapi perlu diperhitungkan dan diusahakan pemecahannya sekaligus dalam program-program pembangunan. Urbanisasi dan migrasi merupakan konsekuensi logis dari adanya pembangunan di perkotaan. Bagi perkotaan sering kali migrasi merupakan masalah besar, apabila tidak diikuti oleh pembangunan yang terstruktur dan tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kota yang memadai. Astrid Susanto (1985) menyatakan bahwa migrasi dan urbanisasi mengakibatkan perubahan besar terhadap struktur masyarakat bahkan dapat mengadakan *reshaping of society*, atau pembentukan wajah baru masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbandingan penduduk dengan infrastruktur yang terganggu antara lain karena kepadatan penduduk yang meningkat di kota telah mengakibatkan masalah-masalah sosial yang baru.

Ada beberapa hal yang menimbulkan terjadinya urbanisasi seperti dikemukakan Tjipto Herijanto (1999) bahwa terjadinya urbanisasi terkait dengan tiga hal yaitu : (1). arus perpindahan penduduk dari desa ke kota; (2). penambahan penduduk secara alami; (3) tertariknya pemukiman pedesaan ke dalam konteks kota, karena perkembangan kota yang kuat secara horizontal.

Fenomena migrasi penduduk dari desa ke kota berlangsung hampir di seluruh kota-kota di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Schoorl (1974), (Lee, 1987) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab adanya migrasi dari desa ke kota yang membedakannya menjadi faktor pendorong dan faktor penarik.

Faktor pendorong migrasi adalah:

1. Kemiskinan. Penyebab kemiskinan di pedesaan antara lain: cepatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan persediaan tanah pertanian; mekanisasi pertanian; dan terdesaknya kerajinan rumah tangga oleh industri
2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di desa. Jumlah penduduk di pedesaan lebih banyak daripada yang dapat dijamin oleh situasi ekonominya.
3. Ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Faktor penarik kota:

1. Daya tarik kehidupan ekonomi kota, kesempatan mencari uang lebih besar.
2. Usaha mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pendidikan. → mengangkat posisi sosial. Pendidikan modern menciptakan pola nilai dan pola harapan baru. Kehidupan kota sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
3. Di kota terdapat bermacam-macam fasilitas: pendidikan, kesehatan yang lebih baik dari pada di desa.
4. Kota memberikan kesempatan untuk menghindarkan kontrol sosial yang terlalu ketat atau mengangkat diri dari posisi sosial yang rendah.
5. Kota merupakan pusat hiburan dan kesenangan.

Namun demikian sebenarnya proses seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi ke kota tidak secara sederhana seperti disebutkan di atas. Proses seseorang untuk pindah juga bergantung pada kondisi dalam masyarakat yang menyangkut norma, nilai, kepercayaan, sikap, tata kelakuan dan harapan-harapan.

Dalam konteks Kota Bekasi, ada beberapa hal yang menjadi daya pikat sehingga menjadi tujuan migran yaitu:

1. Kota Bekasi berada pada lokasi yang strategis. Dari sebelah selatan dan sebelah timur Kota Bekasi, menghubungkan wilayah Jawa Barat, dan Jawa Tengah ke arah Jakarta, dan sebaliknya.
2. Kota Bekasi menjadi alternatif pemukiman bagi penduduk yang bekerja di DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta harga lahan di Kota Bekasi relatif lebih murah. Sementara akses ke DKI Jakarta tidak terlalu sulit karena sarana transportasi umum baik kereta api maupun bus tersedia, walaupun harus sedikit bersabar karena terjebak kemacetan, dan padatnya penumpang terutama pada jam-jam sibuk. Data Supas 1995 menunjukkan bahwa migran lima tahun yang lalu (risen) di Jawa Barat 48,41 persen berasal dari DKI, 21,41

persen dari Jawa Tengah, dan 7,56 persen dari Jawa Timur. Sebagian besar migran dari DKI ke Jawa Barat adalah menuju kawasan Botabek. Bekasi dan Bogor menjadi tujuan utama migran asal DKI. Di Bekasi sendiri (kota + kabupaten) jumlah migran yang berasal dari DKI terdapat 35,30 persen (Tabel 3.31). Sedangkan di Kabupaten Bogor terdapat 32,78 persen.

Tabel 3.31
Banyaknya dan Distribusi Persentase Migran Masuk ke Masing-masing Kabupaten/Kota di Botabek Menurut Tempat Tinggal Lima Tahun yang Lalu, Hasil SUPAS 1995

Tempat Tinggal Lima Tahun yang lalu	Tempat Tinggal Sekarang				
	Kab. Bogor	Kab. Bekasi	Kab. Tangerang	Kota Bogor	Kota Tangerang
DKI Jakarta	32,78%	35,30%	29,61%	13,62%	25,79%
Provinsi Lainnya	67,22%	64,70%	70,39%	86,38%	74,21%
Semua Migran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Supas 1995

3. Kota Bekasi sebagai kota perdagangan, jasa dan industri. Dengan demikian banyak orang yang ingin mencari penghidupan/ mata pencaharian di Kota Bekasi. Sebagai kota industri Kota Bekasi membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang dan spesifikasi pendidikan tertentu yang tidak tercukupi oleh penduduk Bekasi. Selain itu tidak sedikit pengusaha, baik besar maupun kecil lebih senang membuka usaha di Kota Bekasi, karena memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan bahan baku, maupun pemasaran. PDRB Kota Bekasi lebih dari 70 persen bersumber dari usaha Industri pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan restoran yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan (Tabel 3.32).

Tabel 3.32
Distribusi Produk Domestik Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003
Pertanian	1.11	1.30	1.15	1.12
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	0
Industri pengolahan	44.41	47.29	47.14	46.19
Listrik Gas dan air Bersih	3.00	3.04	3.01	3.00
Bangunan	4.25	5.72	5.98	5.90
Perdagangan, Hotel dan restouran	28.51	24.53	25.42	26.85
Pengangkutan dan Komunikasi	7.62	5.76	5.72	5.65
Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	4.18	4.38	4.31	4.23
Jasa-jasa	6.93	7.37	7.26	7.06

Sumber: Bekasi Dalam Angka 2003

4. Iklim persaingan usaha di Kota Bekasi relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. Bagi para migran yang tidak memiliki keterampilan atau tingkat pendidikan yang tinggi Kota Bekasi juga merupakan pilihan, karena persaingan SDM relatif tidak terlalu tinggi dibanding Jakarta.
5. Kota Bekasi dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan tertentu yang tidak dapat disediakan oleh daerah. Faktor mencari pekerjaan yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan menjadi pendorong untuk bermigrasi. Selain itu biaya upah tenaga kerja (UMK) kota Bekasi tergolong tinggi. UMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pada tahun 2005 sebesar Rp 710.000,- merupakan UMK tertinggi jika dibandingkan dengan kota-kota di Jawa Barat.
6. Dari segi administratif kependudukan, Kota Bekasi tidak seketat Jakarta. Sehingga orang relatif dapat ke luar dan masuk dengan mudah. Namun demikian pada satu tahun terakhir Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, sering mengadakan operasi yustisi baik di jalan umum maupun di lingkungan pemukiman. Hal tersebut bertujuan untuk lebih menertibkan para pendatang.

Lebih lanjut, disadari bahwa migrasi dan urbanisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi daerah asal dan daerah tujuan. Dampak positif bagi daerah asal dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerahnya baik itu berupa penanaman modal maupun partisipasi langsung terhadap pembangunan. Dampak negatifnya adalah kekurangan tenaga kerja terutama di sektor pertanian. Sedangkan dampak positif bagi daerah tujuan adalah turut membangun daerah tersebut dan atau meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat baik langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung melalui pajak dan atau retribusi dan tidak langsung bekerja sebagai buruh atau karyawan di suatu perusahaan/industri. Dampak negatifnya adalah menimbulkan permasalahan sosial seperti kriminalitas, daerah kumuh (*slums*), kemacetan lalu lintas dan konflik sosial. Masalah ini diperberat lagi dengan adanya arus migrasi yang terus meningkat, terutama para migran banyak yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup.

Meningkatnya migrasi masuk yang tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan, dapat meningkatkan masalah-masalah yang saling kait-mengkait. Jumlah penduduk yang banyak akan membutuhkan banyak sumber yang harus digunakan. Seperti perumahan, transportasi, air bersih, pengelolaan sampah, listrik, sarana pendidikan dan sosial lainnya, dan sebagainya.

Persaingan usaha yang cenderung meningkat, menyebabkan banyak penduduk tidak memiliki kekuatan untuk bertahan atau penduduk yang tidak memiliki keterampilan/pendidikan yang cukup akan tersisih, yang pada akhirnya jatuh miskin. Mereka ini kemudian memilih tinggal atau menetap di perkampungan-perkampungan kumuh (*slums*) yang pada gilirannya menimbulkan kemiskinan di Kota Bekasi. Munculnya daerah kumuh seperti tersebut di atas berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini terjadi disebabkan buruknya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah; tingginya volume kendaraan; dan kurang tertatanya saluran pembuangan air. Buruknya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah dan kurang tertatanya saluran air ditambah hilangnya daerah resapan menjadi lahan-lahan pemukiman dan gedung-gedung mengakibatkan banjir. Hampir setiap tahun di beberapa tempat di Kota Bekasi selalu mengalami banjir.

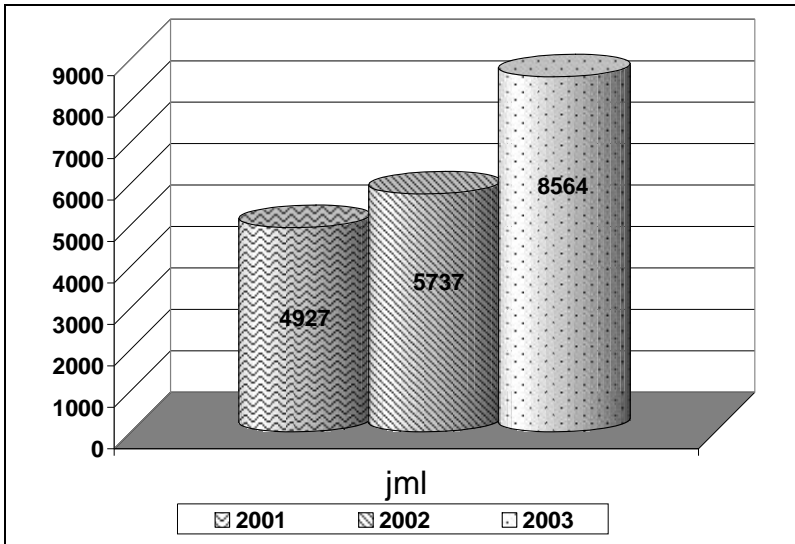
Demikian pula masalah sosial lainnya memiliki potensi yang cukup tinggi. Dalam hal ini disebabkan banyak penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang memiliki adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma yang berbeda bertemu dalam suatu lingkungan. Apabila para migran maupun non migran tidak memiliki toleransi yang cukup dan adaptasi yang tinggi, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik sosial. Hal ini diperberat lagi dengan adanya kontrol sosial yang longgar yang pada gilirannya meningkatkan masalah sosial seperti, kriminalitas, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

Tingginya urbanisasi membutuhkan keterampilan (kapasitas) yang tinggi yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan dan pembangunan. Kapasitas pemerintah dituntut lebih besar dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan melakukan perencanaan-perencanaan yang matang yang bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan ke depan. Mengurangi kemiskinan di perkotaan, memberikan pelayanan yang memadai, dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota.

Persaingan yang tinggi di kalangan penduduk yang sebenarnya merupakan mekanisme yang dapat mengarah pada pendemokrasian. Berdasarkan UU 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dalam UU No. 32 tahun 2004, maka pemerintah daerah sebenarnya memiliki cukup kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai daerah otonom. Diharapkan dengan kewenangan yang muncul pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengatur dan membangun daerahnya.

Besarnya minat masyarakat terutama penduduk yang bekerja di Jakarta untuk memiliki rumah di daerah Bekasi, menyebabkan tingginya investor pengembang perumahan menanamkan modalnya di Bekasi. Gambar 3.6 menunjukkan perkembangan jumlah masyarakat yang mengajukan IMB baik untuk izin perumahan, toko, maupun gedung-gedung perkantoran. Kegiatan tersebut dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Gambar 3.6
Banyak IMB yang dikeluarkan Kota Bekasi Tahun 2001 – 2003



Sumber: Bekasi Dalam Angka 2003

Dari segi transportasi, dengan adanya penduduk yang bekerja di Jakarta mengakibatkan volume kendaraan menuju Jakarta sangat tinggi. Terutama pada jam-jam pergi dan pulang kerja. Tingginya volume kendaraan di pagi dan sore hari tersebut berdampak pada memburuknya kualitas udara yang disebabkan oleh asap knalpot kendaraan. Kualitas udara juga bertambah buruk oleh banyaknya industri yang membuang gas ke udara yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan suhu udara akan tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat.

Dampak urbanisasi juga secara tidak langsung menyebabkan tidak terkendalinya tata ruang. Lahan-lahan yang semula diperuntukan untuk jalur hijau dan daerah resapan diganti dengan lahan terbangun, yang digunakan untuk perumahan, gedung-gedung perkantoran, jalan-jalan besar, dan lain-lain. Pembangunan yang tidak terkendali dan tidak disertai dengan perencanaan yang baik selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan juga menyumbang

pada terjadinya banjir. Hal ini disebabkan berkurangnya daerah resapan, sementara saluran pembuangan tidak tertata dengan baik dan seringkali dipenuhi oleh sampah.

Permasalahan lain dampak urbanisasi yang berhubungan dengan tata kota adalah banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan badan trotoar dan badan jalan untuk berdagang. Penggunaan badan jalan untuk berdagang mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kesemerawutan kota. Hal ini dapat kita lihat di sekitar Pasar Baru, dan depan Terminal Bekasi, dimana aktivitas pedagang kaki lima sampai ke Jalan Ir. Juanda.

Pola kehidupan perkotaan dengan segala aktivitas masyarakatnya secara sosiologis menyebabkan berkurangnya intensitas hubungan sosial diantara masyarakat. Masing-masing orang sibuk dengan kehidupan dan pekerjaannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk berinteraksi dan memikirkan masalah-masalah sosial yang berkembang disekitar mereka. Pola kehidupan perkotaan juga mendorong perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan sosial yang cepat membutuhkan tingkat adaptasi masyarakat yang tinggi. Dampak sosial yang kemudian timbul seiring dengan perkembangan kota yang sering terjadi di kota-kota besar pada umumnya adalah meningkatnya masalah-masalah sosial, maupun kriminalitas. Seperti meningkatnya jumlah gelandangan, anak terlantar, penyakit kejiwaan, kriminalitas, penyalahgunaan Narkoba dan prostitusi.

BAB IV

KEBIJAKAN

PENANGANAN URBANISASI

4.1. Alternatif Kebijakan Penanganan Urbanisasi

Dari hasil kajian diperoleh gambaran bahwa permasalahan umum dari urbanisasi yang dihadapi kota-kota terutama kota-kota besar adalah :

1. Peraturan atau kebijakan untuk menangani kependudukan yang dikeluarkan provinsi khususnya Provinsi Jawa Barat belum ada yang secara langsung untuk menangani masalah urbanisasi.
2. Permasalahan urbanisasi yang dihadapi Kota Bandung dan Kota Bekasi cenderung sama, yaitu belum memiliki peraturan atau program yang khusus menangani urbanisasi. Hal ini cerminan dari visi dinas kependudukan dari kedua kota tersebut yang tidak menyentuh langsung urbanisasi. Begitu pula bila dilihat baik tujuan maupun sasaran dari program dinas tersebut hanya sebatas pada pengawasan dan operasi yustisi. Tujuan dan sasaran tersebut belum secara langsung menyentuh permasalahan urbanisasi.

Kebijakan penanganan urbanisasi tidak terlepas dari berkembangnya permasalahan kependudukan yang terkait dengan urbanisasi. Oleh karena arus migrasi merupakan hak setiap orang dan tidak memungkinkan untuk dilarang secara langsung, maka alternatif kebijakannya yang dilakukan oleh dinas/badan yang menangani bidang kependudukan baik bersifat langsung dan tidak langsung.

4.1.1 Kebijakan Langsung

Dinas/badan yang menangani kependudukan di tiap kabupaten/ kota mempunyai visi dan misi yang relatif sama. Namun dalam implementasinya setiap kabupaten/kota mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga kebijakan yang dicanangkan belum tentu dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Ketidak-seragaman dalam penanganan kependudukan ini sebagai akibat dari tidak sinkronnya penanganan kependudukan daerah satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi suatu daerah. Dalam mengatasi, mengantisipasi dan memantau administrasi kependudukan diperlukan adanya komitmen bersama antar kabupaten/kota, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu diperlukan peran fasilitator yang mengatur atau memfasilitasi antar daerah dalam administrasi kependudukan khususnya penanganan arus migrasi dan dampaknya.

Pemerintah provinsi yang meliputi beberapa kabupaten/kota sebagai fasilitator mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan urbanisasi. Seperti, pengkajian, sosialisasi, fasilitator, memberikan rekomendasi dan atau mengusulkan rancangan peraturan daerah mengenai :

1. Pengkajian masalah-masalah kependudukan yang ditimbulkan oleh adanya urbanisasi. Dalam hal ini melaksanakan pendataan dan penelitian di kelurahan padat penduduk di masing-masing kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi penanganan masalah kependudukan di setiap kabupaten/ kota yang timbul oleh adanya arus migrasi dan atau urbanisasi.
3. Melakukan penataan manajemen kependudukan dan merekomendasikannya kepada kabupaten/kota dengan membuat *data base* berupa pendaftaran dan pencatatan penduduk secara komprehensif dengan tujuan sebagai berikut :
 - Menekan laju migrasi desa-kota (penduduk pendatang/ migran) ke kota-kota tujuan di Provinsi Jawa Barat.
 - Melakukan pengelolaan pelayanan kependudukan yang menyediakan pilihan-pilihan pelayanan dan jaminan kepastian.

- Menyediakan data kependudukan yang *up to date*.
- Memfasilitasi dalam penanganan masalah-masalah yang timbul antar daerah kabupaten/kota.
- Memberi rekomendasi alternatif pola penanganan masalah-masalah kependudukan.
- Mempunyai peraturan daerah mengenai penanganan urbanisasi, dan migrasi secara umum.

4.1.2 Kebijakan Tidak Langsung

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan urbanisasi adalah bagaimana memecahkan masalah urbanisasi tersebut yang menguntungkan semua pihak. Masalah urbanisasi merupakan masalah yang kompleks dengan melibatkan dua wilayah, yaitu wilayah desa dan kota. Secara tidak langsung, untuk memecahkan masalah itu dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kebijakan

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya mengintensifkan kembali Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pijakan/payung hukum, mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - Bagi pendatang, enam bulan pertama mereka harus memegang KTP sementara (ada uang jaminan yang didepositkan ke pemerintah kota). Setelah mendapat pekerjaan, mereka harus mengajukan KTP Tetap. Bila setelah enam bulan tidak dapat pekerjaan, mereka akan diminta pulang atau dipulangkan ke daerah asal secara paksa (dengan biaya dari uang jaminan yang telah mereka depositkan ke pemerintah kota).
 - Bagi warga miskin diberikan pelayanan pembuatan KTP secara gratis, dengan pelayanan standar.

- b. Keterlambatan penerbitan KTP yang disebabkan faktor kelalaian aparat pelaksana pelayanan (pemerintah daerah) tidak dikenakan denda.
 - c. Seluruh pemegang KTP WNI Tetap (di luar pemegang KTP Sementara), diikutsertakan dalam asuransi jiwa untuk jangka waktu sesuai masa berlaku KTP.
 - d. Mengefektifkan pelaksanaan uji coba program SIAK baik dari sisi SDM maupun perangkatnya
 - e. Melaksanakan komputerisasi data kependudukan yang *online* antar dinas atau instansi/lembaga di seluruh Jawa Barat yang didasarkan pada hasil uji coba program SIAK, sehingga mudah untuk diakses.
 - f. Kegiatan sosialisasi tentang identitas kependudukan bagi seluruh warga di Jawa Barat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jalur media massa.
2. Pengorganisasian pelaksanaan dan peningkatan kapasitas
- Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan secara insti-tusional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil serta kantor-kantor kecamatan, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil sebagai pusat kendali bertugas untuk mengolah dan menyajikan data kependudukan dan melakukan *updating* data kependudukan
 - b. Kantor Kecamatan sebagai pusat pelayanan terdepan bertugas :
 - Untuk mendukung komputerisasi kependudukan, kantor-kantor kecamatan di Provinsi Jawa Barat harus dilengkapi dengan sarana pendukung pembuatan KTP yang modern (kamera digital, mesin cetak embos, dan lain-lain).
 - Kantor-kantor kecamatan terhubung secara *online* ke Kantor Catatan Sipil, sedangkan Kantor Catatan Sipil terhubung secara *online* ke Kantor Bupati/Walikota, dan juga ke Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat.

3. Pengawasan dan sanksi
 - a. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan administrasi kependudukan, secara simultan pemerintah kabupaten/kota bersama instansi terkait menggelar razia KTP.
 - b. Penduduk yang melakukan pelanggaran, misalnya tidak memiliki KTP, KTP ganda atau tidak melapor diberikan teguran/sanksi/ denda.
 - c. Bagi pendatang yang KTP Sementaranya habis dan/atau tidak memiliki pekerjaan akan dipulangkan secara paksa dengan biaya dari uang jaminan (deposit).
 - d. Pengawasan bagi para pendatang dilakukan pada tingkat RT (Rukun Tetangga). Ketua RT wajib mengetahui bila ada pendatang baru tinggal di wilayahnya, dan untuk menjalankan fungsinya tersebut para Ketua RT harus diberikan insentif setiap bulannya.

4.1.3 Target Pencapaian (*Outcome*)

Pembenahan/penataan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dapat memberikan pencapaian/*outcome* sebagai berikut:

1. Tersedianya data kependudukan yang akurat dan *up to date*.
2. Penduduk yang masuk maupun yang ke luar Provinsi Jawa Barat serta antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat tercatat dan tertata dengan baik.
3. Tidak adanya KTP ganda.
4. Keluhan/*complaint* masyarakat terhadap kinerja pelayanan kependudukan dapat diturunkan.
5. Penduduk yang masuk ke Provinsi Jawa Barat dapat lebih selektif. Hanya pendatang yang memiliki pekerjaan, setelah enam bulan tinggal di wilayah hukum/administratif Provinsi Jawa Barat yang bisa mengajukan diri sebagai penduduk tetap Provinsi Jawa Barat.

6. Pemberi maupun penerima layanan harus sama-sama dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran atau kelalaian, sehingga tercipta penyediaan layanan yang transparan dan dapat dipercaya.

4.2. Pola Penanganan Alternatif

1. Daerah kabupaten/kota asal migran (*supply*) berkewajiban melakukan pencatatan atas warganya yang melakukan aktivitas harian (*commuting*) di luar wilayah administratifnya. Hasil pencatatan kemudian diserahkan kepada badan kependudukan di tingkat provinsi untuk kemudian dilakukan rekapitulasi pencatatan dan koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Pencatatan penduduk sementara harus lebih dioptimalkan dengan mengefektifkan kewajiban lapor 1 X 24 jam untuk warga yang bertamu atau berniat tinggal/menetap untuk sementara waktu.
3. Meningkatkan pola penangan partisipatif dengan melibatkan fihak-fihak lain, misalnya LSM, untuk turut serta menangani dampak negatif langsung urbanisasi.
4. Khusus untuk pola ulang-alik (*cummuting*) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Untuk daerah tujuan yang dijadikan tujuan bertempat tinggal (*settlement*):
 - Mengoptimalkan pencatatan/pendataan penduduk yang berada di wilayah administratifnya, sehingga diketahui proporsi dan distribusi penduduk setempat/asli dan sementara.
 - Optimalisasi kewajiban lapor 1 X 24 jam atas tamu yang berniat tinggal sementara.

- b. Untuk daerah tujuan yang dijadikan tujuan beraktivitas harian (*daily activity driven*) :
 - Melakukan penyebaran pusat-pusat aktivitas ekonomi, industri, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain sesuai dengan RUTR setempat. Atau melakukan pemusatan aktivitas dengan pola CBD (*Central Business District*).
 - Penertiban gelandangan dan pengemis (*gepeng*) dan penataan daerah-daerah kumuh
 - Reaktualisasi RUTR/RTRW sesuai dengan lebih memperhatikan aspek kependudukan yang berkembang di perkotaan.
5. Mengembangkan daerah-daerah pengirim. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melalui :
 - a. Pembangun fasilitas-fasilitas perkotaan, dengan tetap mempertahankan ciri-ciri perdesaan.
 - b. Meningkatkan diversifikasi usaha dengan menambah jumlah mata pencaharian non-pertanian,
6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kebijakan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan lokal (PKL) dan wilayah (PKW), dalam upaya untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Migrasi masuk ke Jawa Barat terkonsentrasi di kota daripada di kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduknya yaitu Kota Bandung, Bogor, dan Kota Bekasi (Tabel 2.6). Terkonsentrasinya penduduk di wilayah tersebut karena merupakan daerah industri dan lebih banyak tertanam investasi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Selain itu migran masuk ke Jawa Barat juga banyak terdapat di Kota Bekasi dan Kota Depok. Tingginya migran di perkotaan tersebut lebih banyak disebabkan terkait dengan pertumbuhan kota sebagai daerah-daerah industri, jasa, perdagangan, dan letaknya yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Dari hasil temuan lapangan, baik migran seumur hidup maupun migran risen lebih banyak laki-laki dan terkonsentrasi pada kelompok umur 20 sampai dengan 34 tahun. Karakteristik migran masuk ke kota Bandung didominasi oleh migran non permanen (sirkuler/komuter), sedangkan migran di Kota Bekasi didominasi oleh migran permanen. Migran masuk ke Kota Bandung sebagian besar dari migran menjadikan Bandung sebagai tempat kegiatan usaha/kerja, sedangkan migran di Kota Bekasi umumnya menjadikan Kota Bekasi sebagai tempat tinggal.

Legalitas hukum yang terkait dengan kebijakan kependudukan telah banyak dikeluarkan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih banyak mengatur pada tertib administrasi kependudukan dan belum banyak menyentuh aspek urbanisasi dan atau migrasi desa-kota. Namun demikian ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan tersebut dalam implementasinya masih belum berjalan sesuai yang diharapkan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan :

1. Adanya lembaga yang menangani kependudukan di tingkat Provinsi.
2. Perlu segera dikeluarkannya peraturan daerah (Perda) ditingkat provinsi yang akan dijadikan payung bagi daerah-daerah di dalam menangani kependudukan terutama masalah urbanisasi, karena Perda maupun kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh secara langsung dalam menangani migrasi terutama urbanisasi dan dampak yang ditimbulkannya.
3. Mengoptimalkan lembaga-lembaga lokal dalam kegiatan pencatatan kependudukan.
4. Kebijakan-kebijakan maupun program kependudukan harus memperhatikan karakteristik migran di masing-masing wilayah.
5. Kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan perlu lebih digiatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013*. Bandung.
- Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi. 2003. *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2003*. Bekasi.
- Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2002. *Analisis Volume Kecenderungan Dan Karakteristik Migran Masuk Ke Jawa Barat Tahun 2000*. Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2002. *Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk ke Jawa Barat*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. 2004. *Rencanan Tahunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2005*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2003. *Bandung Dalam Angka Tahun 2003*. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 1997. *Perpindahan Penduduk dan Urbanisasi di Indonesia*, Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 Seri: S4.
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Dinamika Petumbuhan Penduduk Tujuh Kotra Besar di Indonesia: Bandung dan Sekitarnya*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Jawa Barat : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000* Seri L 2.2. Bandung.
- Bagian Humas dan Infokom Pemerintah Kota Bekasi. 2001. *Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2000, Program Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2001 – 2005*
- Black dan Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Dinas Kependudukan Kota Bekasi. 2004. *Buku Panduan Forkasi Operasi Yustisi Kependudukan Bagi Pengurus Rukun Warga Kota Bekasi*.

- Drakakis dan Smith, D 1988. *Urbanization in the Developing World*. Routledge. New York.
- Evers, Hans-Dieter dan Rudiger Korff.2000. *Urbanisme di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Horstman dan Rutz. 1980. *The Population on Java 1971*. Institute of Developing Economic. Tokyo.
- Hugo, Graeme J.1981."Village-Community Ties,Village Norms, and Ethnic and Social Networks : A Review of evidence from the Third World". Dalam Gordon F. De Jong dan Robert W. Gardner, ed., *Migration Decision Making : Multidisciplinary Approaches to Mocrelevel Studies in Develeped and Developing Countries*. United States of America : perganon Policy Studies on International Development. Hlm 186 – 224.
- Keban, Yeremias T. 1996. "Analisis Urbanisasi di Indonesia Periode 1980-1990", dalam Agus Dwiyanto dkk. (ed.), *Penduduk dan Pembangunan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Keputusan Mendagri No. 54 Tahun 1999 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*.
- Keputusan Walikota Bekasi No. 35 Tahun 2001 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Akta Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi*.
- Lampiran Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2003. *Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008*.
- Lee, Everett S. 1981. *Suatu Teori Migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Lembaran Daerah Kotamadya DT II Bandung, 1998, Perda Kotamadya DT II Bandung No. 26 Tahun 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. 1992, *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. PPK-UGM. Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 1996. "Dampak Pembangunan Terhadap Mobilitas Penduduk", dalam Agus Dwiyanto dkk. (ed.), *Pemnduduk dan Pembangunan*. Aditya Media.Yogyakarta.

- Pemerintah Kota Bandung. 2001. *Lembaran Daerah Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung No. 1342 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.*
- Pemerintah Kota Bandung. 2001. *Lembaran Daerah Kota Bandung, Perda No. 5 Tahun 2001, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.*
- Pemerintah Kota Bandung. 2004. *Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2004, Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008.* Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013.* Bandung.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2000. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010*
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 2003. *Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2003 Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 – 2007.* Bandung.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 2003. *Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2003 mengenai Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Jawa Barat tahun 2003 – 2007.* Bandung
- Saefullah, A. Djadja. 1996. "Mobilitas Internal Nonpermanen", dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*, Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN dan Lembaga Demografi - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm 89-112. Jakarta
- Saefullah, A. Djadja. 1999, "Migrasi dan Perubahan Sosial Budaya", *Jurnal Kependudukan*, Vol. 1 No. 1 Januari 1999.
- Schoorl, J.W. Prof. Dr. 1988. *Modernisasi.* Gramedia. Jakarta.
- Setiawan, Nugraha. 1998. *Profil Kependudukan Jawa Barat 1997.* Kantor Menteri Negara Kependudukan. Jakarta
- Setiawan, Nugraha. 1999. Struktur Pekerja Migran dan Non Migran di Wilayah Pinggiran Kota Bandung: Sebuah Potensi Konflik?", *Jurnal Kependudukan*, 1(1): 49-53.

- Setiawan, Nugraha. 2004. "Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Barat: Proyeksi Tahun 2005", *Jurnal Kependudukan*, 6(2): 140-162.
- Shryock, Henry S. dan Jacob S. Siegel. 1976. *The Methods and materials of Demography*. Academic Press. New York.
- Smith, D.A. dan R.J. Nemeth. 1998. "Urban Development in South East Asia: an Historical Structural Analysis", dalam Drakakis dan Smith (ed.). *Urbanization in Developing World*. Routledge. New York.
- Soegijoko, B.T.S. dan I. Bulkin. 1994. "Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional: Studi Kasus Jabotabek". *Prisma* 23(2): 21-39.
- Sulastri, Sri. 1999. "*Mobilitas penduduk Menuju Kota Bandung: Analisis data Survei Urbanisasi 1995*". Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN. Jakarta.
- Sunaryo, Urip. 1995. *Changing Migration Differentials and Regional Economic Inequality in Indonesia 1971-1990*. The Flinders University of South Australia. Adelaide.
- Susanto, Astrid S. 1985. "Perubahan Sosial dan Kebudayaan" Bina Cipta . Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Mobilitas Penduduk Sebagai Penggerak Otonomi Daerah". *Jurnal Kependudukan*. Vol 1. No.1 Tahun 1999.